

BANDA ACEH

dalam Siklus Perdagangan Internasional
1500 - 1873



Direktorat
Kebudayaan

Sudirman

**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh**

KG. 422.

mlk. mt. trad.

**BANDA ACEH DALAM SIKLUS PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
1500-1873**

959 801

SUD

b.

**Oleh :
Sudirman**

**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh
2009**

Sudirman

Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional (1500-1873)
Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh, 2009

vi, hlm ; 14 x 21 cm
Bibliografi : hlm. 153
ISBN : **978-979-9164-74-2**

**Banda Aceh dalam Siklus Perdagangan Internasional
(1500-1873)**

Penulis : **Sudirman**

Diterbitkan Oleh:
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Nanggroe Aceh Darussalam
Telp/Fax. (0651) 23226

Cetakan Pertama : **2009**

Editor : **Prof. Amirul Hadi, Ph. D**

Design Cover : **Titit Lestari** Layout: **Hasbullah**

ISBN : 978-979-9164-74-2

© **All Rights Reserved**

Dilarang Mengutip Atau Memperbanyak Sebagian Atau Seluruh
Isi Buku Ini Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit/Penulis

KATA SAMBUTAN
KEPALA BALAI PELESTARIAN SEJARAH
DAN NILAI TRADISIONAL
BANDA ACEH

Sejarah merupakan bagian dari masa lalu manusia. Ia dapat menjadi potret tentang perjalanan waktu yang telah dilalui. Akan tetapi, dibalik masa lalu tersebut banyak hal kita dapat pelajari. Sebagai sebuah proses, sejarah memiliki nilai-nilai yang dapat menjadi pelajaran bagi manusia karena dalam melangkah ke masa depan. Nilai-nilai positif dapat dijadikan pegangan dan nilai-nilai negatif dapat dihilangkan. Oleh karena itu, kita jangan sekali-kali melupakan sejarah seperti dikatakan oleh Proklamator kita Bung Karno dalam pidatonya "Jasmerah"..

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yang salah satunya tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pengkajian dan penelitian yang kemudian mempublikasi hasil-hasil kajian dan penelitian tersebut ke masyarakat luas. Buku yang sampai ke tangan pembaca saat ini merupakan salah satu upaya pelaksanaan TUPOKSI tersebut.

Buku ini berisi tentang perjalanan sejarah keberadaan Banda Aceh dalam siklus perdagangan internasional. Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi masyarakat yang telah berkembang dalam sejarah kehidupan sosial-ekonomi. Dalam sejarah masa lalu, pedagang Aceh, dengan realitas dan tantangan yang melingkupinya, telah membangun tradisi usaha berdasarkan nilai sosial dan etos ekonomi tradisional. Tradisi ini telah mengembangkan hasil yang gemilang bagi masyarakat Aceh, yaitu mendorong perubahan perekonomian dan kemajuan sosial-masyarakat.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, buku ini diterbitkan untuk memahami bagaimana sesungguhnya dunia perdagangan Aceh tumbuh dan berkembang. Penerbitan buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai jembatan antara masa lalu dengan masa kini untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah bangsanya.

Terbitnya buku ini, selain menambah informasi tentang sejarah dan budaya Aceh, juga memperkaya khazanah literatur tentang Aceh. Dengan demikian ia diharapkan dapat menjadi masukan, baik untuk

kepentingan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan maupun untuk memperluas wawasan masyarakat tentang negara dan bangsanya.

Banyak pihak yang telah membantu sehingga karya tulis ini dapat disajikan. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih. Kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca kami terima dengan lapang dada demi perbaikan selanjutnya.



Banda Aceh, Juni 2009
Kepala

Djunia, S. Sos.
NIP 130 789809

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SEJARAH KOTA BANDA ACEH	7
A. Awal Mula Sejarah.....	7
B. Tata Letak.....	19
C. Masyarakat.....	21
BAB III BANDA ACEH DALAM KURUN NIAGA	24
A. Perdagangan Maritim.....	24
a. Pedagang.....	46
b. Komoditas Dagangan.....	47
c. Mata Uang.....	50
d. Pasar.....	59
e. Pelabuhan.....	69
f.. Pelayaran.....	61
B. Produksi Hasil Perdagangan.....	63
a. Pertambangan dan Perindustrian.....	63
b. Pertanian.....	66
c. Perikanan.....	66
C. Perdagangan Dalam Negeri.....	71
D. Perdagangan Luar Negeri.....	72
BAB IV LEMBAGA PERDAGANGAN DAN KEUANGAN	73
A. Balai Baitul Mal.....	73
B. Balai Furdhah.....	73
C. Syahbandar.....	77
D. Haria Peukan.....	78
E. Seuneubok.....	80

BAB V	BANDA ACEH DALAM JARINGAN PERDAGANGAN ANTARBANGSA	83
	A. Banda Aceh di antara Pertarungan Hegemoni Perdagangan Bangsa Asing.....	83
	B. Jaringan Perdagangan.....	126
	a. Arab.....	126
	b. Cina.....	127
	c. Siam.....	129
	d. India.....	130
	e. Turki.....	132
	f. Perancis.....	135
	g. Inggris.....	136
	h. Belanda.....	138
	i. Amerika.....	140
BAB VI	PENUTUP.....	147
	A. Simpulan.....	147
	B. Saran.....	151
	DAFTAR PUSTAKA.....	153
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Apabila kita merunut ke belakang, ternyata nenek moyang bangsa Indonesia merupakan suku bangsa yang mempunyai kebudayaan bahari. Berbagai bukti masa prasejarah Indonesia dapat memberikan pemahaman bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah sebagian besar bangsa pelaut atau pengembara. Mereka menggunakan potensi laut sebagai sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan, seperti halnya untuk perdagangan dan transportasi serta komunikasi dengan bangsa atau daerah lain, serta memanfaatkan sumber daya alam di laut sebagai salah satu sumber mata pencaharian hidup.

Sebelum kedatangan bangsa Barat, kegiatan perdagangan di wilayah Nusantara telah berkembang menjadi wilayah perdagangan Internasional. Jalan perniagaan melalui laut telah dimulai dari Cina melalui laut Cina, Selat Malaka, India, Teluk Persia, Suriah hingga ke laut Tengah. Dalam perkembangan peradaban Nusantara, Aceh merupakan salah satu kerajaan yang memiliki dasar nilai-nilai kebudayaan kemaritiman. Sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara, Aceh telah mendasarkan politik kerajaan pada penguasaan dalam pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan kekuatan laut yang tangguh.

Banda Aceh termasuk salah satu kota tertua di antara ibukota propinsi yang terdapat di dalam gugusan Kepulauan Nusantara. Banda Aceh dengan Malaka pernah menduduki posisi penting dalam arus lalu lintas perniagaan Timur dan Barat pada abad ke XVI - XVII. Namun

Pendahuluan

demikian, faktor usia tidak selalu menjadi kartu jaminan bagi pertumbuhan selanjutnya. Kenyataan empiris memperlihatkan kepada kita bahwa kota-kota yang tumbuh kemudian, seperti Padang, Singapura dan Medan, melaju jauh lebih cepat daripada kota Banda Aceh dalam kegiatan perniagaan internasional. Seperti kebanyakan kota besar lainnya di Asia Tenggara, kota Banda Aceh (resminya Bandar Aceh Darussalam) tumbuh di pinggir sungai yang sekaligus menjadi jalur lalu lintas perniagaan dengan dunia luar dan sumber pencaharian penduduk. Para pelancong asing yang pernah berkunjung di ibukota sebelum era Perang Aceh, seperti Sir James Lancaster pada tahun 1601M, Laksamana Beaulieu pada tahun 1620-1 M, atau John Anderson pada tahun 1820-an M", secara tegas mengatakan bahwa sungai berfungsi sebagai jalur utama untuk memasuki kota, walaupun muaranya sedikit agak dangkal dan medannya sulit. Muaranya berawa-rawa, sedangkan ibukota terletak pada suatu dataran rendah dengan tanah yang subur sekelilingnya dan dilingkari oleh perbukitan.

Posisi geografi Banda Aceh yang terletak pada ujung utara pulau Sumatera dengan sebuah teluk memungkinkan kapal-kapal niaga keluar masuk ke jurusan Birma, Benggala atau Srilangka, Kalikut, Malaka, dan pantai barat Sumatera. Kondisi ini memberi keuntungan kepada kota Banda Aceh dan daerah sekitarnya dalam kontak perniagaan Timur-Barat semenjak dahulu kala.

Berangkat dari kenyataan di atas, penelitian ini berusaha untuk menelusuri perkembangan kota Banda Aceh sebagai salah satu pusat perdagangan internasional di kawasan barat Nusantara. Bagaimana bentuk dan sifat perdagangannya, jenis komoditas apa saja yang diperdagangkan, dan kelompok sosial mana saja yang ambil bagian dalam kegiatan itu merupakan di antara beberapa pertanyaan

Pendahuluan

penting yang diangkat dalam bahasan ini. Karena penelitian ini bersifat diakronik dalam perspektif waktu yang panjang, perlu kiranya dikemukakan terlebih dahulu periodisasi kota Banda Aceh dalam dinamika perniagaan internasional. Menurut data empiris yang tersedia, dinamika kota Banda Aceh dalam perniagaan tersebut secara umum dapat dibagi dalam periode 1500 -1873, 1873 - 1945, dan setelah kemerdekaan. Meskipun masing-masing periode memiliki karakter sendiri, akan tetapi saling terkait dalam suatu kontinuitas. Untuk penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian "Banda Aceh Dalam Jaringan Perdagangan Internasional periode 1500-1873". Pada periode tersebut perdagangan di Banda Aceh berada pada puncak kejayaannya dan berjalan secara "tradisional" dan kebijakannya berbentuk keacehan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menjelaskan sejarah perdagangan di Banda Aceh dengan segala dinamikanya pada waktu itu. Gambaran seperti ini sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pengalaman masa lampau, yang berguna sebagai inspirasi bagi masa kini dan akan datang, sehingga kita senantiasa bersikap bijak dalam berbuat dan bertindak.

Karya ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan di bidang perdagangan, khususnya perdagangan di daerah, dengan memahami kelebihan dan kekurangan pengembangan perdagangan pada masa lalu. Dalam kerangka itulah mungkin sangat tepat ucapan Sir John Seeley yang mengatakan bahwa "tujuan mempelajari sejarah supaya kita dapat lebih arif sebelum sesuatu peristiwa terjadi". Apabila kita tidak mempunyai akses yang cukup terhadap fakta dan kebenaran masa lalu, maka dapat dipastikan bahwa *sense of history* kita semakin menipis. Dengan demikian, kita akan kehilangan apresiasi dengan masa lampau,

Pendahuluan

yang sesungguhnya banyak mengandung arti dan menjelaskan berbagai duduk perkara masa kini. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat mencerminkan dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan daerah, khususnya bidang sejarah, sebagai unsur penting yang dapat memperkaya dan memberi corak kebudayaan nasional. Penelitian sejarah lokal (daerah) juga berarti membina loyalitas daerah dalam rangka perjuangan nasional untuk mengadakan dan mempertahankan kehidupan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, sejarah lokal juga dapat menjelaskan peran masyarakat daerah, dalam sejarah karena selama ini lebih banyak ditonjolkan tentang peran orang asing dalam sejarah.

Penelitian ini secara garis besar dapat memberikan beberapa manfaat. Secara akademis ia dapat memberikan tambahan pengetahuan yang berguna dalam rangka pengembangan pengetahuan tentang sejarah, khususnya berkaitan dengan objek yang diteliti. Manfaat kedua adalah manfaat secara praktis. Pengalaman masa lalu yang dipaparkan dalam penelitian ini menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah dan tindakan yang lebih baik pada masa kini dan akan datang dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul, khususnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. Manfaat selanjutnya adalah menggali sumber sejarah lokal di daerah untuk memperluas wawasan masyarakat terhadap bangsa dan negara.

Kajian ini menggunakan metode sejarah. Proses penelitian sejarah tidak terlepas dari definisi sejarah secara umum. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari dinamika dan perkembangan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial pada masa lampau,¹ mengaitkan dan

¹ Taufik Abdullah, *Sejarah lokal di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Press, 1990), hlm. 6.

Pendahuluan

merekonstruksikannya dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya tulis sejarah. Hasil penulisan adalah sejarah sebagaimana dikisahkan, yang menerangkan dan memahami peristiwa sebagaimana terjadinya.

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman masa lampau.² Dengan demikian, metode penelitian sejarah kritis harus menggunakan aturan dan prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu sejarah. Ada beberapa tahap yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah dengan metode kritis, yaitu pengumpulan sumber, verifikasi, kritik interen untuk membuktikan kredibilitas, dan kritik eksteren. Tahap selanjutnya adalah interpretasi berupa analisis dan sintesis, kemudian baru dilakukan penulisan.

Adapun sifat penulisan ini adalah diskriptif-analisis. Sejarah analisis merupakan penulisan sejarah yang menguraikan mengapa sesuatu peristiwa terjadi, dan menggambarkan kejadian sebagai proses yang dicakup dalam uraian analisis.³ Perkembangan suatu peristiwa lengkap dengan faktanya tentang apa, siapa, bila, di mana, serta bagaimana, kemudian diurut secara kronologis hubungan antara sebab dan akibat, motivasi, sebagai suatu kompleksitas kejadian-kejadian untuk menjawab pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi.

Pengumpulan sumber untuk dapat menjelaskan permasalahan di atas dilakukan melalui sejumlah bacaan sumber di perpustakaan, dan arsip, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Untuk dapat

² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugroho NS), (Jakarta : UI Press, 1969), hlm. 32.

³ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta : PT Gramedia, 1992), hlm. 10.

Pendahuluan

memberikan gambaran yang jelas maka hasil penelitian ini disusun dalam beberapa bab. Penyusunan ini agar dapat disajikan suatu gambaran yang berlatar belakang historis, yakni menunjukkan kontinuitas perkembangan yang saling berkaitan. Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa tugas dari pembahasan sejarah akan lebih dipusatkan pada masalah kontinuitas dalam pembahasan tersebut.⁴ Persoalan-persoalan yang mempunyai akar pada masa lampau akan berkembang terus sampai sekarang dan masa yang akan datang.

Secara keseluruhan tulisan ini terdiri atas empat bab. **Bab pertama** Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, metode, dan sistematika penelitian dan penulisan. **Bab kedua** Sekilas Sejarah Banda Aceh, yang terdiri atas Awal Mula Sejarah, Tata Letak, dan Masyarakat Kota. **Bab ketiga** Banda Aceh dalam Kurun Niaga, yang terdiri atas Perdagangan Maritim : Pedagang, Komoditas Dagang, Mata Uang, Pasar, Pelabuhan, Pelayaran. Produksi Hasil Perdagangan : Perindustrian, Pertambangan, Pertanian, dan Perikanan. Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. **Bab keempat** Organisasi Perdagangan, yang terdiri atas Balai Baitul Mal, Balai Furdhah, Syahbandar, dan Haria Peukan. **Bab kelima** adalah Perdagangan Banda Aceh Dalam Jaringan AntarBangsa, terdiri atas Cina, Jawa, Siam, India, Turki, Peranggi : Perancis, Inggris, dan Belanda. **Bab keenam** penutup, yang terdiri atas simpulan dan saran.

⁴ Sartono Kartodirdjo, "Modernisme dalam Perspektif Historis", dalam *Buletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM*, No. 5, (1997), hlm. 134.

BAB II

SEJARAH KOTA BANDA ACEH

A. Awal Mula Sejarah

Banda Aceh adalah ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terletak di ujung pulau Sumatera. Sebagian besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikelilingi laut, yaitu sebelah utara, barat, barat daya dan timur. Hanya pada bagian tenggara berbatasan dengan daratan, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari letak geografis Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sangat strategis, karena ia merupakan pintu gerbang sebelah barat kepulauan Indonesia.

Semenjak zaman neolitikum, selat Malaka merupakan terusan penting dalam gerak migrasi bangsa-bangsa di Asia dalam gerak ekspansi kebudayaan India dan sebagai jalan niaga dunia serta jalan penghubung utama dua kebudayaan besar, Cina dan India. Muncul dan berkembangnya negara-negara sekitar selat Malaka tidak dapat dipisahkan dari letak geografis yang sangat strategis itu. Banda Aceh muncul sebagai pusat politik dan pemerintahan disebutkan di antaranya oleh faktor letak tersebut.

Aceh sudah dikenal semenjak permulaan terbentuknya jaringan-jaringan lalu lintas internasional (\pm abad I Masehi).¹ Berita tertua dari *Dinasti Han* (abad I-VI Masehi) menyebut negeri yang bernama *Huang-Tsche*. Menurut isi catatan Cina tersebut penduduk negeri itu sama dengan penduduk Hainan, hidup dari berdagang dan perampokan. Kaisar Wang Mang dari Dinasti Han meminta kepada penguasa negeri

¹D.H. Burger dan Prayudi, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, (Jakarta : Padnya Pramita, 1962), hlm. 14.

ini untuk mengirimkan seekor badak. Tempat ini identik dengan Aceh berdasarkan letaknya.²

Berita tentang *Poli* dijumpai dalam catatan Cina. Berita pertama terdapat dalam catatan Dinasti Leang (502-556 M) kemudian dari Dinasti Sui (581-617 M) dan berita terakhir dari catatan Dinasti Tang (618-908 M).³ Mengenai letak tersebut memang belum ada kata sepakat. J. G. De Casparis mengatakan bahwa *Poli* tidak kurang pentingnya dan menggemparkan. *Poli* dapat disamakan dengan *Puri*, lengkapnya *Dalam-Puri* yang disebut *Lamuri* oleh orang-orang Arab dan *Lambiri* oleh Marco Polo. Apabila penetapan ini benar maka kita mempunyai satu pegangan yang penting.⁴

Sejauh mana *Poli* itu identik dengan *Lamuri* seperti yang dikemukakan oleh De Casparis, masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Dalam naskah-naskah Aceh disebutkan bahwa Kerajaan *Lamuri* yang dieja dengan l.m.r.i. antara m dan r tidak terdapat tanda vokal, sehingga jika dituruti cara mengeja dalam naskah, maka tidak akan mungkin sama sekali bahwa nama itu akan dibaca *Lamuri* atau *Lamiri*.⁵ Dalam buku *Sejarah Melayu* ia disebut dengan *Lamiri* (L.m.y.r.y).⁶

² Nj. Krom, *Zaman Hindu*, terjemahan Arif Effendi, (Jakarta : PT. Pembangunan, 1956), hlm. 9-10. B. HM. Vlekke, *Nusantara, A History of Indonesia*, (Let Editions Mankan S.A. Bruzelles, 1961), hlm. 17.

³ W.P. Groeneveldt, *Historical Notes on Indonesia Malaya Compiled from Chinese Sources*, (Jakarta : CV. Brata, 1960), hlm. 82-84. J.G. De Casparis, *Perkembangan Pengetahuan Sejarah Indonesia Lama*, terjemahan Said Raksakusumah, (Bandung :Tetai, 1961), hlm. 32.

⁴ J. G. De Casparis, *Perkembangan Pengetahuan Sejarah Indonesia Lama*, terjemahan Said Raksakusumah, (Bandung :Tetai, 1961), hlm. 32.

⁵ T. Iskandar, *De Hikayat Atjeh* (s-Gravenhage:N.V. De Nederlandsche Boek en Steendrukkerij V.H.H.L. Smits, 1959), hlm. 24. Dalam naskah *Negara*

Berita tertua mengenai Lamuri berasal dari Ibnu Khordadbeh (844-848), Sulaiman (955), Mas'udi (943) dan Buzurg bin Shahriar (955), yang semuanya adalah penulis Arab. Mereka menyebut negeri ini dengan nama *Ramni* dan *Lamuri*, sebuah daerah yang menghasilkan kapur barus dan hasil bumi penting lainnya. Mas'udi menyebutkan pula bahwa Ramni takluk di bawah Mahara Sriwijaya.⁷

Berita Cina yang paling tua berasal dari tahun 960 M, yang menyebut nama *Lanli* sebagai tempat yang dapat disinggahi oleh utusan-utusan Parsi yang kembali dari Cina sesudah berlayar 40 hari lamanya. Di sana mereka menunggu musim teduh untuk seterusnya berlayar lagi ke negeri asal mereka.⁸

Seterusnya Chau-Yu-Kwa dalam bukunya *Chu Fan-Shi*, yang terbit pada tahun 1225 M, menyebutkan bahwa di antara jajahan-jajahan *San-fo-ts'i* (Sriwijaya) termasuk juga *Lan-wu-li* yang kemungkinan besar adalah *Lamri*.⁹ Raja Lan-wu-li disebutkan belum beragama Islam, memiliki dua buah ruang penerimaan tamu di istananya. Apabila dari negeri ini seorang bertolak di musim timur laut, maka ia akan tiba di Ceylon dalam waktu 20 hari. Pada tahun 1286, Lan-wu-li bersama-sama

Kerta Gama terdapat nama Lamuri sebagai salah satu negeri yang takluk kepada Maharaja Majapahit. Mohd. Jamin, *Gajah Mada*, (Djakarta : Balai Pustaka, 1956), hlm. 50-51.

⁶Iskandar, *op.cit.*, hlm. 25.

⁷*Ibid.*, hlm. 24-25.

⁸A.K. Dasgupta, *Aceh in Indonesia Trade and Politics ; 1600-1641*, unpublished Ph. D, Thesis (Cornel University, 1962), hlm. 6.

⁹R.O. Winstedt, *A History of Malaya*, (London : Luzak de co, 1935), hlm. 28.

Su-wen-ta-la mengirim utusan ke negeri Cina dan berdiam di sana sambil menunggu kembalinya ekspedisi Kubilai Khan dari Jawa.¹⁰

Ketika Marco Polo pada tahun 1292 M tiba di Jawa Minor (Sumatera), ia mendapatkan delapan buah kerajaan, di antaranya Lamri. Kerajaan ini katanya tunduk kepada Kaisar Cina dan mereka diwajibkan membayar upeti.¹¹ Pada tahun 1310 M, seorang penulis Parsi bernama Rashiduddin menyebut untuk pertama kalinya bahwa tempat-tempat penting “di pulau Lumari yang besar itu” selain Peureulak dan Jawa adalah Aru dan Tamiang.¹²

Seperti sudah dijelaskan di atas, semenjak tahun 1286 Lamri telah mengirim utusan-utusannya ke Cina. Dalam buku Dinasti Ming dijelaskan bahwa pada tahun 1405 M telah dikirim ke Lam-bu-li sebuah cap dan surat dan pada tahun 1411M. Negeri ini mengirimkan utusan ke Cina untuk membawa upeti. Perutusan tiba bersamaan dengan kunjungan perutusan Klantan dan Cail, kemudian kembali bersama-sama ekspedisi Cheng Ho.¹³ Tahun 1412 M, raja Maha-Ma-Shah (Muhammad Syah) dari Lam-bu-li bersama-sama Samudera mengutus sebuah delegasi ke Cina untuk membawa upeti. Di antara utusan-utusan Lam-bu-li ke Cina yang secara teratur dikirim setiap tahun terdapat nama Sha-che-han putera Mu-ha-ma-sha.¹⁴ Sewaktu Cheng Ho pada tahun 1430 membawa hadiah-hadiah ke seluruh negeri, Lamri pun memperoleh bahagian pula. Ada kemungkinan bahwa pengiriman

¹⁰Iskandar, *op. cit.*, hlm. 25.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, hlm. 26.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 27.

hadiah-hadiah bukan untuk pertama kalinya, karena lonceng bernama Cakra Donya yang dahulunya tergantung di istana sultan Aceh dan sekarang disimpan di Museum Aceh dengan tulisan Cina dan Arab padanya dibubuhi angka tahun 1409 M.¹⁵ Namun, menurut G. L. Tichelman bahwa Lonceng Cakra Donya itu dibawa dari Pase ke Aceh sesudah kerajaan itu dapat disatukan oleh Ali Mughayat Syah.¹⁶

Catatan yang tercantum dalam buku *Ying-Yai-Sheng-lan* oleh Ma-Huan disebutkan bahwa Lamri terletak tiga hari berlayar dari Samudera pada waktu angin baik. Negeri itu bersebelahan pada sisi timur Litai, bahagian utara dan barat berbatas dengan laut Lamri (laut Hindia) dan ke selatan berbatas dengan pegunungan. Berdasarkan berita Cina itu, W. P. Groenevelt mengambil kesimpulan bahwa letak Lamri di Sumatera bahagian utara, tepatnya di Aceh Besar. Berita dari Cina itu juga mengatakan bahwa Lamri terletak di tepi laut.¹⁷

Di antara penelitian yang menyebutkan bahwa Lamri sebuah kerajaan yang terletak di Aceh Besar adalah M. J. C. Lucardie dalam karangannya "Mevelies de Lindie", terbitan van der Lith 1836 M. Ia menyebutkan bahwa Lamreh yang terletak dekat Tungkop besar kemungkinan adalah peninggalan dari kerajaan Lamri.¹⁸ Tome Pires dalam karangannya mengenai pulau Sumatera menyebutkan bahwa di pantai utara daerah Aceh terdapat 6 reinos dan 2 terras, yaitu reino de Achey e Lambry, terra de Biar, reinos de Pedir, terra de Aeilabu, reino

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ G. L. Tichelman, *De Indische Gids*, 61 (Amsterdam : N.V. Drukkerij Ingervery, 1939), hlm. 23-27.

¹⁷ W. P. Groenevelt, *Historical Notes on Indonesian Malaya Compiled from Chines Sources*, (Jakarta : CV. Brata, 1960), hlm.98-100.

¹⁸ Iskandar, *op. cit.*, hlm. 27-28.

de Lide, reino de Pirada, reino de Pasee.¹⁹ Nama-nama tersebut dengan mudah dapat dikenal karena masih digunakan sampai sekarang, yaitu Aceh, Lamri, Biheue, Pidie, Ie Leubeue, Peudada, dan Pasee.

Dalam naskah *Hikayat Aceh* disebutkan tentang teluk Lamri dan dalam buku Ying-Yai-Sheng-Lan 1416 M disebut laut Lamri terletak di tepi pantai atau teluk. T. Iskandar mengatakan bahwa Lamri terletak dekat Krueng Raya. Desa Lamreh pun terletak tidak begitu jauh dari Krueng Raya. Sekitar 500 meter dari Krueng Raya terdapat sebuah reruntuhan bangunan dan sekitar 6 km dari tempat tersebut terdapat pula bangunan yang sampai sekarang dikenal dengan nama Benteng Indrapatra.

Pada akhir abad XV pusat kerajaan Lamri dipindahkan ke Makota Alam (di daerah Pango) yang terletak pada sisi utara Krueng Aceh di lembah Aceh. Pemandahan itu disebabkan karena adanya serangan dari Pidie dan pedangkalan muara sungai yang mengalir melalui pusat kerajaan Lamri sehingga tidak begitu baik lagi untuk kepentingan pelayaran. Semenjak itu, Lamri lebih dikenal dengan nama kerajaan Makota Alam.²⁰

Dalam buku *Bustanussalatin* yang ditulis oleh Nuruddin Arraniry, dalam urutan Raja-raja Aceh yang tercantum dalam buku tersebut dimulai dari Sultan Ali Mughayat Syah. Oleh karena itu, sebagian ahli berpendapat bahwa kerajaan Aceh dimulai semenjak raja

¹⁹Tome Pires, *The Suma Oriental or Tome Pire vol. I*, translated and edited by Arnando cortesao. (London Printed for the Hakluyt, Society, 1944)), hlm. 138.

²⁰Iskandar, *op. cit.*, hlm. 28-30.

tersebut memerintah sekitar tahun 1516 M.²¹ Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa nama Aceh sudah tua sekali, walaupun tidak setua Lamri tetapi setidaknya kerajaan Aceh telah tumbuh dan berkembang bersamaan. Raja-raja yang pertama di Aceh berkedudukan di Kandang Aceh (Kampung Pandee). Dalam *Hikayat Aceh* disebutkan bahwa Sultan Mahmud Syah telah memindahkan istananya ke Daruddunia (daerah Pendopo Gubernur sekarang) sesudah memerintah di Kandang Aceh selama 43 tahun. Aceh belum dikenal secara luas sebelum tahun 1500 M oleh orang-orang asing karena ia terletak lebih 1 mil ke pedalaman sehingga tidak banyak disinggahi oleh orang-orang asing yang melakukan perjalanan atau pelayaran antara India dan Cina. Hoesein Djajadiningrat mengatakan bahwa Sultan Johan Syah yang memerintah pada tahun 1205 M berkedudukan di Kandang Aceh.

Seperti sudah dijelaskan di atas, Lamri sesudah pusat kerajaannya dipindahkan lebih dikenal dengan nama Makota Alam, sedangkan Aceh, sesudah pusat kerajaannya dipindah ke Daruddunia, dipindah lagi ke Darul Kamal (daerah Darul Imarah, Aceh Besar). Semenjak itu kerajaan Aceh dikenal dengan nama kerajaan Darul Kamal atau Aceh Darul Kamal.²² Dengan demikian, pada penghujung abad XV di lembah Aceh terdapat 2 buah kerajaan, yaitu Makota Alam dan Kerajaan Darul Kamal yang daerahnya dipisahkan oleh Krueng Aceh. Kedua belah pihak tidak pernah hidup rukun. Peperangan sering terjadi tetapi tidak satu pun di antaranya mengalahkan lawannya walaupun kerajaan Makota Alam memperkuat persenjataannya dengan

²¹ R. Hoesein Djajadiningrat, "Critisch Overzicht van de in Maleische Werken Vervatte Gegevens oever Geschiedenis van het Sultanaat van Atjeh", *BKI*, 65, (1911), hlm. 142-143 dan 146.

²² Iskandar, *op.cit.*, hlm. 32.

mendatangkan meriam dari luar negeri melalui teluk Lamri. Pertentangan kedua kerajaan itu berakhir Makota Alam yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Syamsu Syah, putra Munawar Syah melakukan suatu siasat. Dalam Hikayat Aceh diceritakan bahwa Syamsu Syah berpura-pura mengakhiri permusuhan yang berlarut-larut dengan cara menjodohkan puteranya Ali Mughayat Syah dengan puteri kerajaan Darul Kamal. Perminangan itu diterima oleh Sultan Muzaffar Syah, putera Inayat Syah yang pada waktu itu memerintah di Darul Kamal. Dalam arakan-arakan mengantarkan mas kawin ke Darul Kamal disertakan senjata-senjata atau alat perang. Sesampainya di Darul Kamal pasukan Makota Alam mengadakan serangan tiba-tiba. Banyak pembesar-pembesar Darul Kamal (bahkan Sultan Muzaffar Syah) sendiri terbunuh. Semenjak itu, Sultan Syamsu Syah dari Makota Alam memerintah kedua kerajaan itu.

Putera Inayat Syah yang bernama Alauddin Riayat Syah dan ketika peristiwa itu terjadi berada di daerah Daya, tidak kembali lagi ke Darul Kamal dan mendirikan kerajaan Daya. Pada tahun 1516 M, Ali Mughayat Syah dinobatkan menjadi raja, menggantikan ayahnya Sultan Syamsu Syah.²³ Pusat kerajaan dipindahkan lagi ke Daruddunia (Banda Aceh) dan semenjak itu kedua kerajaan yang sudah dipersatukan itu diberinama Kerajaan Aceh "Darussalam" dengan pusat kerajaannya disebut juga dengan nama Bandar Aceh Darussalam.

Perkembangan kerajaan Aceh sesudah Ali Mughayat Syah naik tahta, terutama semenjak tahun 1520 M, telah menentukan nasib kerajaan-kerajaan kecil lainnya pada waktu itu. Perlak, Samudera Pasai,

²³Iskandar, *op. cit.*, hlm. 35. Hoesen Djajadiningrat menyebutkan bahwa Ali Mughayatsyah dinobatkan pada tahun 1514 M. Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 213.

Pidie dan lain-lain disatukan dalam wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Hal itu dilakukan untuk menyatukan kegiatan perdagangan dengan di pelabuhan Bandar Aceh. Selain itu, upaya itu dilakukan untuk menyatukan kekuatan dalam rangka menghadapi ancaman musuh.²⁴ Perluasan kerajaan Aceh Darussalam adalah sebagai jawaban atas pendudukan Portugis atas Malaka pada tahun 1511 M. Usaha itu mendapat dukungan pedagang-pedagang Islam yang melarikan diri dari Malaka. Hal itu menyebabkan timbulnya konfrontasi terus-menerus antara kerajaan Aceh dengan Portugis dalam waktu yang lama sekitar 125 tahun. Pertentangan itu pada hakekatnya tentu bersumber pada pertentangan agama dan bermuara dalam persaingan politik dan ekonomi. Kerajaan Aceh Darussalam tersebut berakhir pada tahun 1903, ketika Sultan Muhammad Daud Syah ditangkap oleh Belanda dan diasingkan.

Kerajaan Aceh berusaha menjalin kerjasama dengan kerajaan Islam seperti Turki dan lain-lain. F. M. Pinto, seorang Portugis mencatat bahwa Aceh telah mendapat sumbangan dari Turki sebanyak 300 orang ahli dan sejumlah besar alat-alat senjata yang diangkut oleh kapal-kapal Aceh sendiri. Di samping itu, pada sekitar tahun 1538 M seorang Admiral Angkatan Laut Turki yaitu Laksamana Sidi Ali Celebi berada di India untuk mengawasi operasi dari kesatuan gabungan Angkatan Laut Negara-negara Islam dalam usaha membantu kerajaan Aceh melawan Portugis di Malaka dan di perairan Selat Malaka.²⁵

²⁴ T. Brandel, "On the History of Acheen", *JIAEA*, vol. V (Singapore : 1851), hlm. 16.

²⁵ Dikutip dalam Zakaria Ahmad dan Muhammad Ibrahim, "Banda Aceh sebagai Pusat Pemerintahan Kesultanan Aceh", dalam *Kota Banda Aceh Hampir 1000 tahun* (Banda Aceh : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, 1988), hlm. 221.

Sejarah Kota Banda Aceh

Menjelang berakhirnya abad ke-16, fajar kegemilangan kerajaan Aceh mulai bersinar. Pada tahun 1607 M, Iskandar Muda diangkat menjadi Sultan Aceh. Hubungan dengan berbagai negara berkembang dengan baik, termasuk dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Perancis dan lain-lain. Dengan Belanda diadakan hubungan yang bersejarah dan berlangsung selama kedua belah pihak saling menghormati dan saling menguntungkan. Duta besar pertama bangsa asing yang berkunjung ke negeri Belanda adalah duta besar kerajaan Aceh yang bernama Abdul Hamid, Laksamana Sri Muhammad dan seorang bangsawan bernama Mir Hasan. Mereka meninggalkan Aceh pada 29 Juli 1601 dan tiba di negeri Belanda pada 6 Juli 1602. Abdul Hamid yang sudah berusia 70 tahun meninggal dunia di Zeeland dan dimakamkan di sana.²⁶

Iskandar Muda berhasil membawa kerajaan Aceh ke zaman keemasan dan kegemilangan. Luas kerajaan Aceh sudah meliputi sebagian besar Sumatera Utara, Tengah dan sebagian Malaysia. Pemerintahan teratur rapi, sistem perdagangan dan hubungan luar negeri cukup teratur. Demokrasi dalam pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara berbagai lembaga pemerintahan yang disesuaikan dengan kekuatan sosial dalam masyarakat menyebabkan Iskandar Muda dapat memerintah dengan aman. Keadaan ini berlainan dengan sultan-sultan Aceh sebelumnya. Iskandar Muda adalah contoh seorang raja yang taat kepada hukum yang berlaku dalam negerinya. Hal itu dibuktikan dengan peristiwa hukuman mati kepada anak kandungnya sendiri yang melanggar hukum.²⁷ Pada masanya pula hukum-hukum

²⁶ *Ibid.*, hlm. 222.

²⁷ Peristiwa ini perlu penafsiran lebih mendalam karena dimungkinkan adanya unsur politik sehingga anak Iskandar Muda yang bernama Meurah Pupok menjadi korban dalam inspirasi politik tersebut. Mungkin saja Iskandar

yang berlaku dikodifikasi yang kemudian terkenal dengan *Adat Meukuta Alam*.²⁸ Patriotisme yang ditanamkan pada setiap rakyatnya merupakan contoh abadi pada setiap putera-puteri Aceh berabad-abad kemudian. Sultan Iskandar Muda merupakan tokoh teladan yang tidak habis-habisnya bagi rakyat Aceh khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya tentang kesetiaan yang tulus terhadap tanah air. Walaupun ia tidak berhasil menghancurkan Portugis di Malaka, tetapi Sultan ini telah memaksa Portugis terpaksa di kota tersebut sehingga tidak berdaya berbuat sesuka hati di kawasan selat Malaka.

Sesudah Iskandar Muda meninggal masih satu abad lamanya kerajaan Aceh merupakan kekuatan yang disegani dan dihormati oleh lawan dan kawan. Pada abad ke-19 di selat Malaka terjadi persaingan antara Inggris, Belanda, dan Aceh. Meskipun Aceh di bawah Sultan Ibrahim Mansyur Syah berusaha memperbaiki posisi kerajaan Aceh di dunia internasional dengan perbaikan-perbaikan pemerintahan dan meningkatkan kerjasama internasional dengan beberapa negara seperti Amerika, Italia, Perancis dan Jepang, tetapi usaha tersebut sia-sia. Persekongkolan negara-negara imperialis telah melahirkan persetujuan-persetujuan yang tidak menguntungkan kerajaan Aceh. Persetujuan yang dicapai antara Inggris dan Belanda, yang dikenal dengan Traktat

Thani yang merupakan keponakan Putri Phang (istri Iskandar Muda) ingin menjadi sultan sehingga melakukan konspirasi politik. Karena apabila Meurah Pupok masih hidup maka secara otomatis sultan akan dijabat olehnya ketika Iskandar Muda meninggal.

²⁸ Sebagian dari Adat Meukuta Alam itu terdapat dalam buku K.F.H. van Langen, "De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur Onder Het Sultanaat", *BKI* 37 (1888).

Sumatera, telah menyebabkan perang antara Belanda dan Aceh tidak terelakkan.

Demikian beberapa peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan sejarah kerajaan Aceh. Banda Aceh Darussalam sebagai pusat kerajaan Aceh dalam perkembangan sejarahnya tentu berkaitan erat dengan perkembangan sejarah kerajaan Aceh sendiri. Geografis Banda Aceh terletak di pesisir dan dekat dengan muara sungai. Pemilihan letak kota pusat kerajaan tersebut erat kaitannya dengan kepentingan militer dan ekonomi dan oleh karena itu Banda Aceh adalah kota pusat kerajaan bercorak maritim. Masyarakat bercorak maritim lebih menitikberatkan kehidupannya pada perdagangan, yaitu suatu ciri yang erat hubungannya dengan kenyataan bahwa para pedagang lebih sesuai hidup dalam masyarakat kota bercorak maritim. Sesudah Malaka dikuasai Portugis banyak pedagang-pedagang Islam yang pada umumnya tidak disukai mencari alternative pelabuhan baru di sekitar selat Malaka. Sebagian besar dari mereka pindah ke Banda Aceh. Sebagai kota maritim dan pusat kerajaan, kekuatan militer lebih dititikberatkan pada angkatan laut. Semenjak terbentuknya kerajaan Aceh, para penguasanya berusaha membangun angkatan laut. Pada puncak kejayaannya kerajaan Aceh memiliki 600 buah kapal yang terdiri atas 500 buah kapal layar dan 100 buah galley yang penempatannya sebagian besar berada di pusat kerajaan. Kapal *galley* adalah kapal yang berukuran besar yang dapat memuat 600 hingga 800 orang penumpang. Agustin de Bealieu yang telah menyaksikan kapal tersebut mengatakan bahwa kapal-kapal itu besarnya tiga kali lebih besar dari kapal-kapal yang dibangun di Eropa pada masa itu.²⁹ Salah

²⁹Muhammad Ibrahim (ed), *Sejarah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta : Depdikbud, 1977/1978), hlm. 64.

satu di antaranya yang paling terkenal adalah Cakra Donya. Dalam laporan Agustin de Beaulie diketahui pula bahwa pasukan gajah merupakan inti pasukan darat yang jumlahnya 900 ekor.³⁰ Hewan itu dilatih sedemikian rupa sehingga tidak takut kepada api dan suara-suara tembakan. Alat-alat kebutuhan militer berupa mesiu dapat diproduksi sendiri karena tersedia belerang di pulau Weh dan pegunungan dekat Pidie. Minyak yang banyak terdapat di Aceh Timur telah dimanfaatkan untuk kebutuhan militer yang digunakan untuk membakar kapal-kapal musuh. Alat-alat persenjataan lain yang dimiliki berupa 2000 pucuk meriam, yang terdiri atas 800 meriam besar dan 1200 meriam biasa.³¹ Pada setiap saat kerajaan Aceh dapat mengerahkan bala tentara berpuluh ribu yang sebagian berdomisili di Banda Aceh dan sebagiannya diambil di Pidie dan tempat lain.³²

B. Tata Letak

Kota-kota kuno di Indonesia mempunyai struktur sosial dan morfologi yang umum dan jelas, seperti adanya tumbuh-tumbuhan sehingga kota-kota terlindungi.³³ Sesuai dengan lokasinya, kota-kota kuno tersebut dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, kota-kota pantai (*coastal cities*), baik yang terletak di muara sungai atau bukan, seperti

³⁰ Julius Jacobs, *Het Familie en Kampongleven op Groot Atjeh* (Leiden : E. I. Brill, 1894), hlm. 252.

³¹ *Ibid.*, hlm. 252.

³² *Kota Banda Aceh*...hlm. 224.

³³ Peter JM. Nas, "The Early Indonesian Town : Rise and Decline of the City-state and its Capital", dalam Peter JM. Nas, *The Indonesian City : Studies in Urban Development and Planning. VKI*, 117 (Leiden : Foris Publication, 1986), hlm. 23

Banda Aceh. Kedua, kota-kota pedalaman, seperti Surakarta dan Yogyakarta. Dari segi morfologi kedua tipe kota tersebut memiliki ciri-ciri atau komponen yang hampir bersamaan, yaitu alun-alun, istana, mesjid dan pasar di pusat kota.³⁴

Secara umum, kota Banda Aceh termasuk dalam kategori kota Islam bercorak maritim. Kota-kota Islam yang bercorak maritim pada umumnya terletak di pesisir dan di muara-muara sungai. Kehidupan masyarakatnya lebih banyak dititikberatkan pada perdagangan dan kekuatan militernya diarahkan kepada kekuatan angkatan laut.

Banda Aceh sebagai ibukota kerajaan Aceh berkembang di pinggir sungai dan pada jalur lalu lintas perdagangan dengan dunia luar. Sungai berfungsi sebagai jalur utama untuk memasuki kota, walaupun muaranya sedikit dangkal dan wilayahnya agak sulit serta muaranya berawa-rawa. Banda Aceh tersebut terletak pada suatu daratan rendah dengan tanah subur sekelilingnya dan dilingkari oleh perbukitan.³⁵

Letak istana kerajaan Aceh menghadap ke barat laut, hampir sama dengan istana kerajaan lain di Indonesia yang menghadap ke utara itu dapat dilihat pada peta yang dibuat oleh orang asing seperti Portugis dan Belanda serta peninggalan-peninggalan sejarah. Di sekeliling istana dibuat danau dan sungai buatan yang mengalir di tengah istana yang dinamakan *Darul Asyiki*. Di samping itu, bagian penting dari istana

³⁴*Ibid.*, hlm. 18-34.

³⁵ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*. Terjemahan Arifin Winarsih (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hlm. 61. Pierre-Yves Manguin, "Demografi dan Tata Perkotaan di Aceh pada Abad ke-16", dalam Henri Chambert-Loir & Hasan Muarif Ambary (ed.), *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard* (Jakarta : Ecole Francaise d'Extreme-Orient, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 236.

yang dinamakan *dalam* dikelilingi tembok dan di tempat itu pula bangunan tempat kediaman sultan didirikan. Kelengkapan lain adalah *Taman Sari* yang dinamakan *Taman Ghairah*, sungai *Darul Asyiki* mengalir juga di tengah-tengahnya. Di sebelah barat istana oleh Iskandar Muda dibangun sebuah mesjid raya (Mesjid Jamik) yang dinamakan Baiturrahman, sedangkan mesjid dalam istana dinamakan Baiturrahim. Di samping itu terdapat sejumlah mesjid kecil lainnya dalam kota.

C. Masyarakat

Masyarakat kota pada waktu itu bersifat heterogen yang homogen. Pada setiap kampung dihuni oleh sekelompok penduduk yang pada umumnya bersifat homogen, baik dalam arti profesi, lapisan sosial, ras dan mungkin juga agama. Tentang jumlah penduduk kota pada waktu itu belum ada catatan yang pasti. Hal itu karena terbatasnya sumber-sumber, lagi pula cara-cara sensus penduduk belum menjadi kebiasaan dan walaupun ada angka untuk itu hanya bersifat perkiraan. Didapat keterangan bahwa sultan dapat mengerahkan sekitar 30.000 prajurit dalam waktu sepuluh hari. Itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk sekitar 120.000, tetapi jumlah di atas harus dihitung jumlah laki-laki yang mampu berperang, baik dari dalam kota maupun yang dikerahkan dari luar kota.³⁶

Pada tahun 1570-an, yakni periode kegiatan ekonomi dan militer, diperkirakan angka sekitar 80.000 penduduk. Naskah Roeiro menggambarkan tofografi kota dalam 2.5 km dari muara sungai Aceh di

³⁶ Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce*, (New Haven : Yale University Press, , 1993), hlm. 69.

sebelah utara ke suatu titik yang terletak langsung di sebelah selatan lingkungan istana, dan terakhir ke titik ketiga di pantai utara, pada sungai yang bermuara di teluk Aceh di Ulee Lheue. Dengan demikian, diperoleh garis keliling sekitar 14 km dan bidang seluas sekitar 8 km, jadi sekitar 80.000 jiwa penduduk.³⁷ Anthony Reid menambahkan bahwa pada sekitar tahun 1570-1580 M, Banda Aceh merupakan sebuah kota pelabuhan khas Melayu. Lahan permukiman begitu luas, tetapi hanya pusat perdagangan dan politik saja yang berpenduduk padat, sekitar 20.000 orang penduduk per km.³⁸ Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian Denys Lombard, pada abad XVII penduduk kota Banda Aceh berjumlah sekitar 50.000 jiwa.

N. De Graaff, menyebutkan di Banda Aceh pada waktu itu terdapat 7000 atau 8000 rumah.³⁹ Apabila setiap rumah dihuni rata-rata 5 orang saja, maka jumlah penduduk kota ditaksir antara 35.000 atau 40.000 orang. Kalau dilihat jumlah pasukan Aceh yang dapat dikerahkan ke medan perang oleh Sultan Iskandar Muda, yang sebagian besar berdiam di Banda Aceh, maka taksiran penduduk Banda Aceh akan melebihi angka tersebut di atas, kemungkinan mencapai 100.000 orang.⁴⁰

³⁷Pierre-Yves Manguin, "Demografi dan Tata Perkotaan di Aceh pada Abad ke-16 : Data Baru menurut sebuah buku pedoman Portugis tahun 1584", terjemahan Ida Sundari Husen & HCL, dalam Henri Chambert-Loir & Hasan Muarif Ambary, *op.cit.*, hlm. 231.

³⁸Reid, *op. cit.*, hlm. 73.

³⁹ Nicolaus de Graaff, *Voyage de Nicolaus de Graaff aux Indes Orientales et end'autres Lieux de l'Asie* (Ansterdam, J. Fred. Bernard, 1719), hlm. 23.

⁴⁰ Reid, *op.cit.*, hlm. 69.

Penduduk yang tinggal di desa-desa terpisah oleh ladang dan kebun, semakin padat jumlahnya ketika mendekati pusat politik (*dalam*) dan pusat perdagangan (tepi sungai sebelah utara *dalam*). Desa-desa yang masih bersifat pertanian seperti Meurasa (Meuraxa) dan berangsur-angsur secara berkesinambungan dengan desa-desa urban yang lebih padat penduduk ke arah kota.

Dalam kota Banda Aceh terdapat status yang didasarkan pada status sosial-ekonomi, keagamaan, kekuasaan dalam pemerintahan. Nama kampung yang sampai sekarang masih dipakai diperkirakan bahwa kampung Emperum dan Bitai adalah tempat kediaman orang Turki dan Arab, kampung Biduen tempat kediaman orang penghibur, kampung Pandee tempat kediaman tukang-tukang. Dalam *Hikayat Aceh* disebutkan adanya kampung Birma dan Jawa, serta tempat-tempat kediaman orang asing, misalnya, kampung Kleng, Peunayong, Kampung Kedah dan lain-lain. Sekitar abad ke-16, John Davis memberitakan adanya perkampungan orang-orang Portugis, Gujarat, Arab, Benggala dan Pegu di samping perkampungan orang Cina. Selain itu, diketahui pula perkampungan tempat kediaman prajurit dan pembesar kerajaan seperti Neusu, Pelanggahan, Merduati dan lain-lain.⁴¹

Bangunan perumahan pada umumnya dibuat dari kayu, hanya bangunan tertentu saja yang dibuat dari batu, misalnya makam dan tembok istana. Rumah-rumah didirikan di atas tiang kayu yang tinggi, diatapi dengan ilalang dan rumbia, membujur arah timur barat, yang terakhir ini adalah pengaruh agama Islam yang dimaksudkan untuk memudahkan penentuan arah kiblat.

⁴¹ *Kota Banda Aceh...* hlm. 225.

BAB III

BANDA ACEH DALAM KURUN NIAGA

A. Perdagangan Maritim

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, nenek moyang bangsa Indonesia merupakan suku bangsa yang mempunyai kebudayaan bahari. Berbagai bukti masa prasejarah Indonesia dapat memberikan pemahaman bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sebagian besar bangsa pelaut atau pengembara. Mereka menggunakan potensi laut sebagai sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan antarbangsa, seperti halnya untuk perdagangan, transportasi dan komunikasi dengan bangsa atau daerah lain, serta memanfaatkan sumber daya alam di laut sebagai salah satu sumber mata pencaharian hidup.

Dalam perkembangan peradaban Nusantara, Aceh merupakan salah satu kerajaan yang memiliki dasar nilai-nilai kebudayaan kebaharian. Sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara, ia telah mendasarkan politik kerajaan pada penguasaan dalam pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan kekuatan laut yang kuat. Sebelum kedatangan bangsa Barat, kegiatan perdagangan di wilayah Nusantara telah berkembang menjadi wilayah perdagangan Internasional. Jalan perniagaan melalui laut telah dimulai dari Cina melalui laut Cina, Selat Malaka, India, Teluk Persia, Suriah hingga ke laut Tengah.¹

¹J.C. Van Leur, *Indonesian Trade and Society* (The Hague : W. Van Hoeve), 1967.

Banda Aceh dalam Kurun Niaga

Perjalanan dari satu pelabuhan tempat pemberangkatan ke pelabuhan lain sebagai tujuan perdagangan pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif lama. Burger menggambarkan pelayaran dari Aceh ke Cina menghabiskan waktu sekitar 20 hingga 30 hari. Dengan sendirinya biaya angkut barang menjadi cukup tinggi sehingga harga jual barang dagangan menjadi tinggi pula.

Tiada seorang pun kiranya yang membantah bahwa Banda Aceh tergolong ke dalam kelompok kota tertua di antara ibukota propinsi dan kota-kota besar yang terdapat di dalam gugusan kepulauan Nusantara. Ia bersama-sama dengan Malaka, telah pernah menduduki posisi penting dalam arus lalu lintas perniagaan Timur dan Barat pada abad ke XVI - XVII. Namun demikian, faktor usia tampaknya tidak selalu menjadi kartu jaminan bagi pertumbuhan selanjutnya. Kenyataan empiris memperlihatkan kepada kita bahwa kota-kota yang tumbuh kemudian, seperti Padang, Singapura dan Medan, melaju jauh lebih cepat dari kota Banda Aceh dalam kegiatan perniagaan internasional.

Seperti kota-kota lain di Asia Tenggara, Banda Aceh (Bandar Aceh Darussalam) tumbuh di pinggir sungai yang sekaligus menjadi jalur lalu lintas perniagaan dengan dunia luar dan menjadi sumber mata pencaharian penduduk. Para pelancong asing yang pernah berkunjung ke Banda Aceh sebelum era Perang Aceh, seperti Sir James Lancaster pada tahun 1601 M, Laksamana Beaulieu pada tahun 1620-1 atau Jhon Anderson pada tahun 1820-an,² secara tegas mengatakan bahwa sungai itu berfungsi sebagai jalur utama untuk memasuki kota, walaupun muaranya sedikit agak dangkal dan berawa-rawa sehingga medannya

²John Anderson, *Acheen and the Ports on the North and the East Coast of Sumatra* (edited by A. Reid), (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1970), halaman. 22.

Banda Aceh dalam Kurun Niaga

sulit. Sedangkan ibukota terletak pada dataran rendah, di sekelilingnya terdapat tanah-tanah yang subur dan dilingkari oleh perbukitan.³

Posisi geografis yang terletak pada ujung utara pulau Sumatera dan pada sebuah teluk yang memungkinkan kapal-kapal niaga keluar-masuk ke jurusan Birma, Benggala atau Srilangka, Kalikut, Malaka, dan pantai barat Sumatra, memberi keuntungan kepada kota Banda Aceh dan daerah sekitarnya dalam kontak perniagaan Timur-Barat semenjak dahulu kala.

Bersamaan dengan munculnya kerajaan-kerajaan otonom di daerah Aceh seperti Pasai dan Pedir atau Pidie sebelum tahun 1500, para pelancong asing, seperti Marco Polo dan Laksamana Cheng Ho, mencatat pula bahwa di daerah sekitar teluk tersebut telah berdiri kerajaan Lamuri yang menghasilkan rempah-rempah walaupun tidak sepenting Pedir atau Pasai.⁴

Segera setelah membangun basis kekuasaannya di kota Bandar Aceh Darussalam, sultan Ali Mughayat Syah kelihatannya melibatkan langsung kota tersebut dalam arus perniagaan internasional, walaupun porsinya tidak sesibuk Pidie dan Pasai.⁵ Tome Pires, Pejabat Portugis yang pernah lebih dua tahun bermukim di Malaka setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 M, mengatakan bahwa sultan terlibat dalam perniagaan dengan memiliki kapal (*lanchara*) sebanyak 40 buah. Komoditas yang diperniagakan adalah berupa bahan makanan, beras dan

³ *Ibid.*, p.23

⁴ W.P. Groeneveldt. Notes on the Malay Archipelago and Malacca Compiled from Chinese Sources. VBG Vol. 39 bag.1 (1887), hlm. 220 - 221.

⁵ *The Suma Oriental of Tome Pires*, Edisi Bahasa Inggris diedit oleh Armando Cortesio, vol. 1. (London : The Hakluyt Society, 1944), hlm. 139

rempah-rempah. Walaupun daerah *hinterland* Banda Aceh telah menghasilkan lada, akan tetapi produksinya lebih rendah dari apa yang dihasilkan di daerah Pidie.

C. R. Boxer menyebutkan seperti yang diberitakan oleh Jorge de Lemos, direktur perbendaharaan Portugis di Goa sekitar tahun 1590-an, mengenai hasil yang diperoleh sultan Aceh dari perdagangan luar negerinya. Dia menegaskan bahwa Aceh menghasilkan tiga hingga empat juta *darkat* emas, sebagai hasil ekspor lada dan lain-lain sebesar 30.000 sampai 40.000 kwintal.⁶

Keadaan mulai berubah setelah para sultan berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan otonom yang telah ada di kedua sisi pantai Sumatera (Daya, Singkel, Barus, Tiku, Pariaman, Lamuri, Pidie, Pasei, Peureulak, Aru, Deli, Siak dan malah Johor atau Pahang). Daerah-daerah terakhir dengan potensi daerah *hinterland* yang cukup kaya akan persediaan komoditas pertanian/hutan seperti lada, pinang, beras, damar, dan kapur barus, ataupun bahan mineral seperti emas, belerang, dan minyak tanah, merupakan sumber bagi pemasukan dan pembiayaan istana, karena kondisi ibukota mempunyai potensi daerah pedalaman yang terbatas. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila sultan Aceh memberlakukan serangkaian kebijaksanaan yang bersifat pembatasan daerah takluk dengan dunia luar dan sekaligus memaksa kapal-kapal asing untuk berhubungan langsung dengan ibukota (Banda Aceh).⁷

Akibat nyata dari kebijaksanaan di atas, Bandar Aceh Darussalam tumbuh menjadi kota perniagaan yang ramai. John Davis,

⁶C.R. Boxer. "A Note on Portuguese reaction to the revival of the Red Sea Spice trade and the rise of Aceh 1540-1600", *JSEAH* 10,3 (1969), hlm. 423.

⁷ Anderson, *op.cit* hlm. 45-46.

Kapten salah satu kapal rombongan Cornelis De Houtman yang berlabuh di ibukota (Banda Aceh) pada tahun 1599 M, memberikan kesaksian bahwa tatkala memasuki pelabuhan Aceh, ia menemukan empat buah kapal asing sedang berada di pelabuhan Banda Aceh, yaitu tiga buah berasal dari Arab dan satu buah dari Pegu.⁸ Tiga tahun kemudian, Sir James Lancaster dengan tiga buah kapal, *Dragon*, *Hector*, dan *Ascention*, tiba di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Saidil Mukamil, kakek Sultan Iskandar Muda. Ia menyaksikan 16 hingga 18 buah kapal niaga dari berbagai bangsa berlabuh di pelabuhan Aceh. Pada waktu itu, ada dua orang Belanda turut serta dengan pembesar Aceh datang untuk memeriksa kapal tersebut. Orang Belanda tersebut adalah pedagang yang ditinggalkan untuk mengurus faktori Belanda di Aceh. Lancaster meminta kapten kapal, Harry Middleton, untuk turun dari kapal. Ketika mendarat, Middleton disambut dengan baik dan ia diberikan hadiah sepasang pakaian yang mahal dan lengkap dengan songkok yang bertekatan emas.

Pada hari ketiga Lancaster turun dari kapal dengan diiringi oleh 30 orang pengikutnya. Mereka disongsong oleh seorang pembesar yang menyediakan enam ekor gajah sebagai kendaraan menuju istana. Pada saat itu ia juga menyampaikan surat dari Ratu Elizabeth kepada sultan Aceh.⁹ Sebagai pemimpin ketiga kapal itu ia disambut oleh sultan Aceh dengan upacara dan penghargaan yang tinggi. Surat Ratu Inggris diarak ke istana dan pihak istana menyerahkan bingkisan yang berharga, terdiri atas barang yang dikagumi, di antaranya sebuah kipas bulu

⁸ *The Voyages and works of John Davis The Navigator*, edited by Albert Hasting (London : The Hakluyt Society, MDCCCLXXX, hlm. 140.

⁹ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad I*, (Medan : Waspada Medan, 1980), hlm. 235.

burung. Lancaster menyatakan niat untuk menjalin persahabatan antara Ratu Inggris dengan sultan Aceh.

Hasil perundingan James Lancaster dengan sultan Aceh pada waktu itu di antaranya adalah :

"Inggris dibenarkan masuk dan berniaga di Aceh. Barang-barang dari Inggris bebas bea masuk dan keluar. Apabila kapal Inggris, barang-barangnya, dan orang-orangnya mendapat kecelakaan, mereka berhak diberi bantuan di mana saja di Aceh. Mereka bebas menentukan sendiri tentang harta benda mereka. Segala perjanjian beli dan dagang yang sudah ditutup harus diselesaikan pembayarannya. Mereka berhak mengadili penjahat-penjahat terhadap mereka. Inggris berhak mengadili barang siapa yang memberi malu mereka. Barang-barang dagangan Inggris tidak boleh ditahan dan boleh ditentukan sendiri harganya. Inggris bebas bergerak di Aceh".¹⁰

Setelah perjanjian itu, orang Inggris langsung meminta kesempatan membeli lada ke Pariaman. Lancaster meminta agar sultan Aceh memberi surat untuk dibawa oleh Middleton ke Pariaman. Selain itu, Sultan Aceh juga mengeluarkan surat sebagai pengumuman tentang persetujuan bahwa orang Inggris telah diberi izin berniaga dan mereka telah dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh pemerintah Aceh.¹¹

Ketika armada Aceh pulang dengan kemenangan dari Johor (Juli 1613) dua buah kapal Inggris yang dikepalai oleh Thomas Best sedang berlabuh di Aceh, menunggu kesempatan menemui sultan Aceh.¹² Kedatangan Thomas Best menandai semakin berhasratnya Inggris memegang peranan lebih baik dari yang dihasilkan oleh armada niaga Inggris sebelumnya di Aceh.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 241.

¹² *Ibid.*

Dalam lalu lintas perniagaan internasional itu, posisi kota Banda Aceh kelihatannya lebih bersifat "*entrepot*" dari komoditas ekspor. Situasi demikian tentulah berkaitan erat dengan kondisi dan potensi "*hinterland*" ibukota yang tidak begitu banyak memproduksi bahan ekspor. Laksamana Beaulieu yang pernah menetap di kota Banda Aceh pada tahun 1621 M, mencatat produksi lada, yang waktu itu merupakan primadona ekspor, di sekitar kota hanya 500 bahar per tahun,¹³ sementara John Davis yang telah tiba di ibukota kesultanan dua puluh tahun sebelumnya memperkirakan produksi lada di daerah itu hanya berkisar 20 kapal per tahun.¹⁴

Keuntungan pertama yang dipetik oleh para sultan dalam pemusatan perniagaan di ibukota adalah penarikan bea cukai terhadap barang niaga yang keluar masuk pelabuhan.¹⁵ Para pedagang asing yang berlabuh di ibu kota diharuskan pula untuk mempersembahkan upeti kepada Sultan. Demikian pula kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan dikenakan pula bea jangkar atau bea kawal. Di samping itu, sultan memiliki pula beberapa hak istimewa terhadap pedagang asing, seperti hak mewarisi harta pedagang asing yang meninggal dunia di Aceh jika tidak mempunyai ahli waris.

Keuntungan yang berakumulasi dari kegiatan perniagaan itu segera dimanfaatkan untuk menyangga dan memupuk kekuasaan sultan. Porsi yang pertama tentulah diperuntukkan bagi pembiayaan istana dengan gaya hidup

¹³ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda*, terjemahan Arifin Winarsih (Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm. 88.

¹⁴ *The Voyages...op.cit.*, hlm. 146.

¹⁵ *Adat Atjeh* dari satu manuscript India Office Library, ditranskripsi oleh Teungku Anzib Lamnyong, P.L.P.I.I.S Aceh, 1976, hlm. 52 - 73.

yang berlebihan, berikutnya adalah untuk membiayai angkatan perang yang mempunyai misi untuk menegakkan kedaulatan sultan.¹⁶

Sukar diketahui apakah pemusatan perniagaan internasional di ibu kota Bandar Aceh Darussalam itu benar-benar efektif. Suatu hal yang jelas bahwa semenjak bagian kedua abad ke - 17, posisi Bandar Aceh Darussalam sebagai ekspor komoditas perniagaan internasional terus merosot, walaupun bersamaan dengan kemerosotan kesultanan itu pantai barat Aceh dan pantai utara Aceh muncul sebagai daerah produsen lada yang cukup besar. Sultan tampaknya tidak dapat berbuat banyak terhadap kota-kota pelabuhan baru, seperti Idi, Susoh, Kuala Batu, Lhok Seumawe, yang bermunculan sebagai akibat dari eksistensi penanaman lada dan pinang. William Marsden, pejabat Inggris yang lama menetap di Bengkulu (Fort Marlborough) semenjak tahun 1770 M, memberitakan bahwa pedagang-pedagang asing berhubungan langsung dengan pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di pantai barat dan utara Aceh untuk memuat atau memunggah barang niaga.¹⁷ Pemandangan serupa tetap berlangsung sampai permulaan abad ke-19. Akibatnya banyak penguasa lokal di daerah pelabuhan, seperti Leube Dappa di Susoh dan Kuala Batu, Tuanku Pakeh di Pidie, Teuku Muda Nyak Malem di Simpang Ulim, dan Teuku Paya di Lambada, muncul sebagai penguasa kaya dari hasil kegiatan dagang yang mereka lakukan di daerahnya masing-masing.¹⁸

¹⁶Lombard, *op. cit.*, hlm. 64 - 66, 182 - 193.

¹⁷William Marsden, *The History of Sumatra*, (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1975), hlm. 397-398

¹⁸ Antony Reid, *The Contest for North Sumatra. Atjeh, the Netherlands and Britain 1858 - 1898*, (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1969), hlm. 7,14,80,129-133.

Selama satu abad sesudah penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Ali Mughayat Syah, mendapatkan kekayaan ibukota dari hasil pelabuhan dan memungkinkan sultan-sultan berikutnya menundukkan kaum bangsawan yang tergantung pada pertanian sebagai sumber kekayaan mereka. Semua bangsawan diharuskan mendukung kebijakan kerajaan untuk mencapai kejayaan dalam rangka mengusir Portugis dari Selat Malaka dan memegang monopoli ekspor hasil produksi dari Sumatera dan Malaka.

Selain itu, pergulatan antara Aceh dengan negeri sekitarnya juga terjadi, seperti dengan Johor. Kepentingan-kepentingan perdagangan mendesak untuk mendapat jaminan-jaminan dalam lalu lintas perdagangan, seperti antara pulau Jawa dan negeri-negeri di luarnya. Perdagangan dengan Tiongkok ingin dikuasai oleh Johor, tetapi Aceh dan Jawa merasa terhimpit jika Johor memegang peranan yang menentukan. Ekspor tidak terlindungi begitu saja oleh posisi Johor di tengah perjalanan lalu lintas antara Aceh dan Tiongkok. Sementara Aceh sendiri memerlukan banyak barang-barang dari Tiongkok, seperti piring, kain, barang-barang kerajinan, pertukangan, dan lain-lain.

Di lain pihak, Aceh semakin ramai didatangi oleh pedagang-pedagang luar Nusantara, seperti Arab, Parsi, Habsyi, Pegu, Tiongkok, India (Gujerat dan Malabar, dll.). Kapal-kapal Turki dengan saudagar-saudagar Mesir terus berdatangan ke Aceh, kapal-kapal Aceh pulang-pergi membawa dagangan dari Aceh ke laut Merah menuju pelabuhan-pelabuhan di laut Tengah untuk melanjutkan ke pelbagai negeri di Arab, Afrika, dan sebagainya.¹⁹

¹⁹ Said, *op.cit.*, hlm. 193.

Kekuasaan kesultanan Aceh dalam negeri dan luar negeri mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Kendali kerajaan terlaksana dengan lancar di semua pelabuhan penting di pantai barat dan timur Sumatera hingga ke Asahan di selatan. Pelayaran penaklukan dilancarkan jauh hingga ke Pahang, di pantai timur Semenanjung Malaya, dan pedagang asing dipaksa tunduk kepadanya. Kerajaan Aceh menjadi kaya raya dan kondisi itu membawanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Asia Tenggara.

Di wilayah timur laut hingga Rokan di selatan, kerajaan Batak yang pernah sangat kuat, Aru, merupakan gelanggang pertarungan antara Aceh melawan Kesultanan Melayu Johor dari tahun 1540 M hingga tahun 1612 M, ketika Iskandar Muda akhirnya keluar sebagai pemenang.²⁰

Selain itu, sultan Iskandar Muda sendiri adalah seorang yang kaya raya. Sumber-sumber kekayaan yang utama adalah hasil perniagaan luar negeri yang dilakukan dan dari *wase* (upeti) pelabuhan-pelabuhan Aceh dan daerah-daerah taklukan, serta dari bea cukai yang dikenakan bagi kapal-kapal asing yang berlabuh di setiap pelabuhan Aceh. Setiap kapal asing yang memasukkan barang-barang dari luar ke Banda Aceh dipungut pajak pemasukan sebesar 5 persen dari harga barang-barang itu.²¹ Sumber pemasukan lain bagi Sultan Iskandar Muda adalah hadiah-hadiah atau upeti berharga yang diberikan kepadanya oleh semua tamu-tamu dari negeri asing yang berkunjung ke Banda Aceh, sebagaimana yang sudah diadatkan. Para pedagang asing hampir

²⁰Reid, *op.cit.*, hlm. 5.

²¹P.J. Veth, *Atchin en Zijne Betrekkingen tot Nederland*, (Leiden : Geralth Kolff, 1887), hlm. 55.

tidak dapat melakukan urusannya di kerajaan Aceh tanpa memberikan hadiah-hadiah upeti kepada Sultan Iskandar Muda. Misalnya, dalam hal pemberian lisensi, tidak akan ada lisensi atau izin bagaimanapun jenisnya yang sah oleh Sultan Iskandar Muda jika tidak disertai dengan suatu hadiah upeti untuknya. Pemberian hadiah-hadiah itu berlaku bagi setiap pedagang asing yang berdagang di Aceh.²²

Selain upeti dan hadiah-hadiah yang diberikan oleh pedagang-pedagang asing, Sultan Iskandar Muda menurut adat juga menerima persembahan-persembahan dari rakyatnya berupa kebutuhan-kebutuhan istana, seperti beras, daging, ikan, burung-burung, minyak, gula, dan sayur-sayuran.²³ Namun, orang-orang yang mengabdikan kepadanya diberi beras oleh Sultan Iskandar Muda. Beras itu didapat dari orang-orang yang mengerjakan tanah milik sultan. Sultan Iskandar Muda juga menerima warisan-warisan dari rakyatnya yang meninggal apabila yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki sebagai pewaris dari harta bendanya. Harta orang-orang asing yang meninggal di Aceh juga menjadi hak milik Sultan Iskandar Muda.

Daerah-daerah taklukan Kerajaan Aceh di pulau Sumatera sebagian besar terdiri atas kota-kota pelabuhan. Setiap kota pelabuhan terkenal dengan hasil-hasil bumi. Daerah Pedir terkenal dengan kesuburan tanahnya, banyak ditanam padi, sehingga Pedir pada waktu itu terkenal sebagai lumbung beras bagi kerajaan Aceh.²⁴ Kawasan Pasai

²²K.F.H. Van Langen, "De Inriching van Het Atjehsche Staatsbestuur Onder het Sultanaat", *BKI* 37, (1888), hlm. 493.

²³Laporan perjalanan Beaulieu dalam Rusdi Sufi, *Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda* (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2003), hlm. 53.

²⁴*Ibid.*, hlm. 54.

hingga ke Deli juga dikenal daerah yang sangat subur, sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, di Deli juga terkenal dengan hasil minyak bumi. Di daerah Daya banyak terdapat beras dan binatang ternak. Singkel banyak menghasilkan kapur barus. Di Barus juga banyak terdapat kapur Barus dan kemenyan. Daerah Pasaman banyak menghasilkan lada, demikian juga Tiku. Di daerah Pariaman banyak terdapat bahan makanan. Sedangkan kota Padang banyak menghasilkan lada dan emas.²⁵

Daerah takluk kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda di pulau Sumatera meluas sepanjang jalur pantai pada kota-kota pelabuhan, baik bagian timur maupun barat, dan pusat-pusat kegiatan ekonominya berada di kota-kota pelabuhan. Perdagangan yang berlangsung di kota-kota pelabuhan itu berada di bawah pengawasan Sultan Iskandar Muda, yang diwakili oleh pembantu-pembantunya seperti syahbandar dan panglima yang di tempatkan di setiap pelabuhan.

Di ibukota kerajaan Aceh terdapat sebuah sungai yang bernama *Krueng Aceh* (sungai Aceh). Sungai itu menghubungkan ibukota dengan pelabuhan yang terletak di muara sekitar 3 km. Di depan muara sungai terdapat beberapa pulau sehingga antara muara sungai dengan pulau-pulau itu membentuk sebuah teluk luas yang dapat digunakan sebagai tempat berlabuh kapal pada saat bersamaan. Kapal-kapal dengan ukuran 60-70 ton dapat berlayar melalui muara sungai menuju ibukota (Banda Aceh).²⁶ Selain kapal-kapal asing, kapal-kapal kerajaan Aceh sendiri banyak berlabuh di pelabuhan Aceh. Kapal-kapal itu berlayar ke seluruh

²⁵*Ibid.*

²⁶Dasgupta Arum Kumar, "Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641", Unpublished Ph. D. Thesis, Cornell University, (1962), hlm. 162.

Banda Aceh dalam Kurun Niaga

bagian kerajaan Aceh untuk mengambil barang-barang yang akan dibawa untuk diperdagangkan di Banda Aceh.

Di daerah-daerah takluk, khususnya bagian pantai barat Sumatera, Sultan Iskandar Muda menjalankan sistem monopoli perdagangan atas hasil-hasil bumi dari daerah itu. Hal itu dilakukan sesuai dengan tujuan ekspansi yang dilakukannya, yaitu untuk kepentingan ekonomi dengan menekan pengaruh saudagar asing yang imperialistis. Hasil-hasil bumi dan tambang yang berharga di daerah-daerah, seperti lada, timah, minyak tanah, emas, sutra, kemenyan, dan kapur barus hanya sultan dan wakil-wakil yang telah ditetapkan yang berhak menetapkan harga standar dan memperdagangkan kepada pedagang-pedagang asing. Dari semua barang dagangan, lada merupakan dagangan utama kerajaan Aceh.

Khusus di pelabuhan pantai barat Sumatera, Iskandar Muda menggunakan kekuasaannya untuk membeli sejumlah lada dengan harga yang relatif murah. Lada dibawa ke Banda Aceh dan dijual kepada pedagang-pedagang asing, khusus pedagang-pedagang bangsa Barat dengan harga yang relatif kompetitif tinggi, kadang-kadang seperti ditender. Pengangkutan-pengangkutan lada dari pantai barat Sumatera ke Banda Aceh dilakukan di bawah pengawasan sultan atau para wakilnya. Kerajaan Aceh menjadi kewalahan memenuhi permintaan lada dari saudagar-saudagar asing yang semakin lama semakin banyak datang berdagang ke Aceh.²⁷

Pedagang asing yang datang ke Aceh disambut secara baik oleh Sultan Iskandar Muda. Ia sangat menginginkan agar mereka datang dan

²⁷Pieter van Dam, *Beschrijvingen van de Oost-Indie Compagnie I*. ('s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1931), hlm. 260.

berdagang di Aceh, namun tidak mau memberi konsesi-konsesi khusus kepada mereka tanpa menguntungkan sultan. Para pedagang asing, khususnya pedagang-pedagang Barat, diizinkan berdagang di Aceh hanya dengan syarat-syarat tertentu yang saling menguntungkan. Misalnya, pedagang asing harus membayar pajak. Bagi mereka yang ingin berdagang langsung ke daerah-daerah takluk Aceh terlebih dahulu harus memiliki lisensi dari Sultan Iskandar Muda. Setiap lisensi yang diberikan mempunyai batas waktu tertentu. Apabila waktu telah habis dan pedagang-pedagang itu perlu memperpanjangnya lagi maka mereka harus datang kembali kepada sultan di Bandar Aceh. Mereka yang menginginkan lisensi itu disyaratkan oleh adat untuk memberikan hadiah-hadiah kepada Sultan Iskandar Muda. Tidak akan pernah diberi lisensi atau izin tanpa suatu hadiah yang dipersembahkan untuknya.²⁸

Pada bulan April 1613 beberapa pedagang berbangsa Inggris di bawah pimpinan Thomas Best dengan dua buah kapal yang bernama *Dragon* dan *Hosiander* tiba di pelabuhan Aceh.²⁹ Thomas Best membawa serta hadiah-hadiah dan sebuah surat dari Raja James I (Inggris) untuk Sultan Iskandar Muda. Surat itu berisi permintaan agar Sultan Iskandar Muda mau memberi izin kepada pedagang-pedagang Inggris untuk dapat berdagang di pelabuhan Aceh. Sultan Iskandar Muda dalam menyambut Thomas Best mengadakan suatu resepsi seperti yang telah diberikan oleh kakeknya, Sultan Alaudin Riayat Syah Al Mukammil, kepada Sir James Lancaster pedagang berbangsa Inggris yang pertama datang berdagang ke Aceh.³⁰ Kepada Thomas Best

²⁸ Julius Jacobs, *Het Familie en Kampongleven op Groot Atjeh* (Leiden : E. I. Brill, 1894), hlm. 254.

²⁹Sufi, *op.cit.*, hlm. 61.

³⁰Kumar, *op.cit.*, hlm. 130.

Sultan Iskandar Muda diberikan lisensi dagang untuk digunakan di pelabuhan Pariaman dan Tiku. Lisensi itu digunakan apabila wakil sultan di daerah tersebut dapat menerima pedagang-pedagang Inggris untuk mendapat atau membeli lada.³¹

Sultan Iskandar Muda juga memperkenankan pedagang-pedagang Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang mereka di Banda Aceh.³² Kepada Thomas Best diberikan pula suatu kehormatan dari kerajaan Aceh, yaitu dia diangkat menjadi bangsawan Aceh dengan gelar *Orang Kaya Puteh*. Itu merupakan sebuah anugerah yang kemudian hari masih dilanjutkan oleh sultan-sultan Aceh kepada orang-orang asing yang berkulit putih lainnya.³³ Pemberian gelar kepada Thomas Best didasarkan atas jasanya yang telah merebut sebuah kapal Portugis di perairan Aceh, kapal yang dirampas dari Portugis itu lalu diberikan kepada Sultan Iskandar Muda.³⁴

Setelah beberapa lama berada di Banda Aceh, rombongan Thomas Best melanjutkan pelayaran ke pantai barat Sumatera. Pada bulan Agustus 1613 rombongan itu tiba di pelabuhan Tiku. Mereka merupakan rombongan pedagang bangsa Inggris pertama yang datang ke sana. Dengan membawa lisensi dari sultan Aceh, penguasa Tiku menyambut kedatangan Thomas Best dengan suatu upacara resmi. Lisensi yang diberikan Sultan Iskandar Muda dibacakan di hadapan khalayak ramai dan para pedagang setempat yang telah berkumpul di

³¹ P.A. Tiele, "De Europeers in de Malaesche Archipel", *BKI*, 35 (1886), hlm. 302.

³² Sufi, *loc. cit.*

³³ *Ibid.*

³⁴ C.A. Gibson Hill, "Raffles, Aceh and The Order of The Golden Sword", *JMBRAS*, Part I, (1956), hlm. 6.

sana.³⁵ Sampai tahun 1614 M pedagang-pedagang Inggris itu telah mengangkut lada dari pantai barat Sumatera sebanyak 1.500 bahar atau sekitar 255.000 kg.³⁶

Namun demikian, Sultan Iskandar Muda tetap menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang Belanda, meskipun pernah membatalkan sebuah perjanjian yang telah ditandatangani oleh sultan Aceh sebelumnya dengan pihak kompeni Belanda. Iskandar Muda masih mengizinkan Belanda memiliki sebuah kantor dagang di Banda Aceh, tetapi mereka harus membayar pajak kepada sultan Aceh. Peraturan yang tegas dari Sultan Iskandar Muda menyebabkan pedagang-pedagang Belanda kurang akibat dalam melakukan perdagangan dengan Aceh. Begitu pula kapal-kapal Belanda lama tidak berlabuh di Banda Aceh. Pihak Belanda hampir memutuskan hubungan dagang dengan kerajaan Aceh apabila mereka tidak mempertimbangkan bahwa untuk merebut Malaka dari Portugis mereka tidak dapat meninggalkan Aceh begitu saja.³⁷ Hal itu membuat Sultan Iskandar Muda kurang menaruh perhatian kepada pedagang Belanda. Sultan Iskandar Muda mulai menaruh perhatian lagi tatkala sebuah kapal dagang Belanda pada bulan Oktober 1614 muncul lagi di pelabuhan Aceh.³⁸ Kapal dagang Belanda itu dipimpin oleh Hans de Hase dan tujuan mereka datang ke Aceh adalah untuk berdagang dan memeriksa kantor dagang mereka yang sudah lama mereka tinggalkan di Aceh.

³⁵Kumar, *op.cit.*, hlm. 134.

³⁶B.J.O. Schrieke, *Indonesia Sociological Studies I*. (Bandung : Sumur Bandung, 1960), hlm. 53.

³⁷A.J.A. Gerlach, "Leestafel", H. Yule, "On North Sumatra and Especially Achin", *BKI*, VIII (1873), hlm. 38.

³⁸Tiele, *op.cit.*, hlm. 304.

Kepada Sultan Iskandar Muda, Hans de Hase mempersembahkan hadiah, begitu pula kepada pembesar-pembesar kerajaan Aceh lainnya.³⁹

Dalam sebuah pertemuan dengan pedagang Belanda yang dipimpin oleh Hans de Hase, Sultan Iskandar Muda meminta agar pihak Belanda bersedia membantu Aceh dengan sebuah kapal dalam rangka penyerangan terhadap Malaka Portugis. Pada mulanya Belanda menyatakan kesediaannya memenuhi permintaan Sultan Iskandar Muda, tetapi setelah sampai waktunya Aceh menyerang Malaka tahun 1615 M, Belanda ingkar akan janjinya. Sultan Iskandar Muda marah kepada pedagang-pedagang Belanda lainnya yang datang ke Aceh pada bulan Agustus 1615 dan akhirnya menangkap seorang dari mereka, yaitu Simon Rijser. Ia kemudian tewas karena dihukum dengan diinjak oleh seekor gajah.⁴⁰ Selanjutnya, karena merasa tidak menguntungkan berdagang di Aceh dan ditambah lagi dengan sikap tegas Sultan Iskandar Muda terhadap Belanda, maka pada bulan Maret 1616 Belanda terpaksa menutup kantor dagang mereka di Banda Aceh.⁴¹

Sebenarnya Sultan Iskandar Muda masih menginginkan pedagang-pedagang Belanda berdagang di Aceh. Hal itu dapat diperhatikan ketika pada akhir tahun 1616 M Cornelis Commans, pedagang bangsa Belanda lainnya, datang ke Aceh. Ia diterima oleh bawahan Sultan Iskandar Muda secara baik. Sultan sendiri pada waktu itu dalam keadaan sakit, sehingga tidak dapat menerima sendiri pedagang bangsa Belanda tersebut. Tetapi setahun kemudian ketika

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 305.

⁴¹P.J. Veth, *Atchin en Zijne Betrekkingen tot Nederland* (Leiden : Geraith Kolff, 1887), hlm.75.

Conelis Commans kembali datang ke Aceh dengan membawa hadiah-hadiah kepada Sultan Iskandar Muda. Ia diterima secara baik oleh Sultan Iskandar Muda dan kemudian diperkenankan untuk berdagang di daerah takluk Aceh, yakni di Tiku selama dua tahun.⁴²

Pedagang asing lainnya yang datang ke Aceh dan diterima baik oleh Sultan Iskandar Muda adalah Laksamana Perancis, Augustin de Beaulieu. Ia datang ke Aceh bersama rombongan dengan menggunakan armada tiga buah kapal, *de Montmorence*, *de Esperance*, dan *Hermitage*.⁴³ Pada tahun tahun 1621 M, tiba di pelabuhan ibukota kerajaan Aceh, Augustin de Beaulieu membawa serta hadiah-hadiah yang menarik serta sebuah surat yang katanya berasal dari Raja Perancis untuk Sultan Iskandar Muda.⁴⁴

Augustin de Beaulieu dapat bebas melihat-lihat ibukota kerajaan Aceh (Banda Aceh) dan istana sultan. Ia berharap agar diberi lisensi untuk dapat berdagang di Aceh dan daerah taklukannya. Akan tetapi, setelah berada lama berada di Aceh, Iskandar Muda belum memberikan izin tersebut kepadanya. Sultan Iskandar Muda sangat berhati-hati untuk mengizinkan de Beaulieu berdagang secara bebas di Aceh dan daerah takluk. Hal itu disebabkan pedagang-pedagang berbangsa Belanda banyak mengakut lada secara diam-diam dari pantai barat Sumatera, sehingga lada yang sampai ke Bandar Aceh untuk diperdagangkan oleh Sultan Iskandar Muda menjadi semakin berkurang. Datangnya pedagang-pedagang Perancis ke Aceh memberi

⁴²P.A. Tiele, "De Europeers in de Malaesche Archipel", *BKI*, 36 (1887), hlm. 224.

⁴³Jacobs, *op.cit.*, hlm. 221.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 223.

kesempatan kepada Iskandar Muda untuk meningkatkan harga lada.⁴⁵ Setelah enam bulan lebih berada di Banda Aceh, berhasil mendapatkan sejumlah lada. Akhirnya Sultan Iskandar Muda memberi juga lisensi dagang kepadanya untuk dipergunakan di pelabuhan lada di pantai barat Sumatera dan Tiku. Di daerah itu de Beaulieu Augustin membeli lagi lada untuk muatan kapalnya.⁴⁶

Sultan Iskandar Muda sendiri ikut aktif dalam perdagangan, khususnya perdagangan lada. Dengan semakin bertambahnya permintaan lada maka harganya semakin naik. Apabila sebelum kedatangan bangsa Barat ke Aceh, harga lada sekitar 8 rial per bahar (1 bahar sekitar 375 lbs Inggris), maka setelah kedatangan bangsa Barat harga lada naik menjadi 20 rial per bahar. Dengan datangnya pedagang Perancis ke Aceh pada tahun 1621 M, maka harga lada naik lagi mencapai 48 rial per bahar. Itu adalah harga di pantai barat Sumatera,⁴⁷ sedangkan di ibukota kerajaan Aceh pada saat yang sama harga lada mencapai 64 rial per bahar.⁴⁸

Untuk mengumpulkan lada sebanyak mungkin di ibukota kerajaan Aceh, Iskandar Muda memerintahkan kepada wakilnya yang berada di pantai barat Sumatera untuk mengumpulkan lada, kemudian mengangkutnya ke Bandar Aceh, melalui jalan laut. Jumlah lada yang dihasilkan setiap tahun di pantai barat Sumatera diperkirakan sebanyak 50.000 karung.⁴⁹ Menurut perkiraan, Sultan Iskandar Muda

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 228.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 236.

⁴⁷van Dam, *loc. cit.*

⁴⁸Gerlach, *op.cit.*, hlm. 39.

⁴⁹Van Leur, *op.cit.*, hlm. 171.

mengangkutnya ke Banda Aceh sebanyak 16.000 karung (setiap karung beratnya 60 lbs), sehingga jumlah total 960.000 lbs atau 436.364 kg.⁵⁰

Lada-lada yang diangkut ke Bandar Aceh kemudian dijual kembali kepada pedagang-pedagang asing. Harga lada ditetapkan sendiri oleh Sultan Iskandar Muda. Harga lada tidak sama untuk setiap pedagang-pedagang yang datang dari luar negeri, untuk pedagang India, Arab dan Melayu harga lada yang ditetapkan jauh lebih murah daripada kepada para pedagang berbangsa Eropa. Selisihnya sangat menyolok, kadang-kadang mencapai 200 %.⁵¹

Selain itu, juga ditetapkan agar kepada para pedagang dari Gujarat dan Arab, sebagai sahabat dan pelanggan lama diberi kesempatan untuk dapat membeli lada terlebih dahulu.⁵² Cara seperti itu sebenarnya sangat mengkhawatirkan pedagang Eropa, tetapi karena kebutuhan yang tinggi akan lada untuk dibawa ke Eropa, mereka terpaksa membeli juga. Untuk menghadapi ketentuan yang ditetapkan oleh Sultan Iskandar Muda, yang dianggap kurang menguntungkan, pedagang-pedagang Belanda dan Inggris pada tahun 1619 M membuat sebuah perjanjian. Dalam perjanjian itu diputuskan agar mereka bersama-sama memaksa Sultan Iskandar Muda supaya memberi izin kepada mereka untuk melakukan perdagangan secara bebas dan langsung dengan pelabuhan-pelabuhan di pantai barat Sumatera.⁵³ Kabar mengenai maksud pedagang-pedagang Inggris dan Belanda itu

⁵⁰Kumar, *op.cit.*, hlm. 103.

⁵¹H. Kreskamp, *De Weskust en Minangkabau*, (Utrecht : Scotanus & Jens, 1931), hlm. 13.

⁵²Van Leur, *op.cit.*, hlm. 110.

⁵³Schrieke, *op.cit.*, hlm. 54.

tidak menyenangkan Iskandar Muda karena apabila hal itu dipenuhi tentu pedagang-pedagang itu tidak berusaha lagi untuk saling bersaing dan pemberian hadiah-hadiah untuknya akan terhenti. Iskandar Muda menolak permintaan pedagang-pedagang Belanda dan Inggris tersebut. Ia bahkan memperlihatkan keberaniannya dengan menyebut mereka pengemis yang tidak tahu malu.⁵⁴

Sultan Iskandar Muda berusaha memonopoli seluruh perdagangan lada di pantai barat Sumatera yang termasuk daerah takluknya, dalam persaingannya dengan pedagang Eropa. Akan tetapi sistem monopoli yang dijalankan di sana tidak seluruhnya berhasil. Hal itu disebabkan banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh penduduk setempat dan oleh para wakilnya. Caranya adalah dengan menjual lada cara sembunyi-sembunyi kepada pedagang asing dan keuntungannya diambil untuk mereka sendiri.⁵⁵ Adanya perdagangan lada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi mengakibatkan kurangnya jumlah lada yang diangkut ke Bandar Aceh setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal itu, Sultan Iskandar Muda melakukan beberapa tindakan, yaitu dengan melarang pedagang-pedagang asing mendirikan kantor dagang mereka di pelabuhan-pelabuhan pantai barat Sumatera yang di bawah kuasa Aceh. Semua perdagangan lada hanya berlangsung di Bandar Aceh saja. Selain itu, Sultan Iskandar Muda mengirim panglimanya ke pantai barat Sumatera, seperti Tiku, Pariaman dan tempat-tempat lain untuk menggantikan para panglimanya yang lama. Para panglima yang kedapatan melakukan penyelewengan akan dihukum berat dengan memindahkan atau dimutasi ke tempat lain yang

⁵⁴Tiele, *op.cit.*, hlm 245.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 304.

jauh terpencil dari pantai barat Sumatera.⁵⁶ Khusus di pelabuhan Tiku yang merupakan daerah penghasil lada terbanyak bagi kerajaan Aceh, oleh sultan Aceh mendirikan sebuah benteng dalam rangka mengawasi perdagangan lada yang dilakukan oleh penduduk setempat.⁵⁷

Larangan pendirian kantor dagang di luar Banda Aceh dapat dilihat ketika pada bulan April 1615, pedagang berbangsa Inggris yang bernama Arthur Spaight datang ke ibukota kerajaan Aceh. Ia membawa serta sebuah surat dan hadiah-hadiah dari ratu Inggris untuk diberikan kepada Sultan Iskandar Muda. Pedagang Inggris itu meminta kepada Sultan Iskandar Muda supaya diberi izin untuk mendirikan sebuah kantor dagang pada sebuah pelabuhan di pantai barat Sumatera yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Permohonan serupa dilakukan oleh John Millward, pedagang berkebangsaan Inggris lainnya di ibukota kerajaan Aceh tiga bulan setelah kedatangan Arthur Spaight. Sultan Iskandar Muda menolak dengan halus permintaan pedagang-pedagang tersebut dengan sebuah surat balasan Sultan Iskandar Muda kepada ratu Inggris. Mereka hanya diperbolehkan mendirikan kantor dagang di Banda Aceh saja dan harus mereka laksanakan sendiri. Oleh sebab permintaan mereka ditolak maka mereka tidak berhasil mendirikan kantor dagang di pantai barat Sumatera, tetapi dengan menyuap beberapa pejabat Aceh yang tidak jujur, mereka berhasil melakukan perdagangan gelap dengan penduduk setempat.⁵⁸ Demikian pula dengan pedagang-pedagang bangsa Belanda yang semenjak 1616 M telah menutup kantor dagang mereka di Banda Aceh. Pada tahun 1621 M mereka mencoba mendirikan sebuah kantor dagang baru di

⁵⁶Kroeskamp, *op.cit.*, hlm. 16.

⁵⁷Schrieke, *op.cit.*, hlm. 16.

⁵⁸Tiele, *loc.cit.*

Padang. Mengetahui maksud Belanda tersebut, Iskandar Muda memerintahkan wakilnya yang berada di sana untuk menggagalkan rencana tersebut dan menyita pedagang-pedagang Belanda yang berada di Padang untuk meninggalkan tempat itu.⁵⁹ Belanda terpaksa tunduk kepada keputusan Sultan Iskandar Muda. Meskipun demikian, mereka masih juga mendapatkan lada dari pantai barat Sumatera dengan mengadakan perdagangan gelap dengan penduduk setempat.⁶⁰

a. Pedagang

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam perdagangan internasional terdiri atas pedagang keliling dan pedagang lokal. Pedagang keliling umumnya berasal dari pendatang bangsa asing yang menyinggahi pelabuhan Aceh untuk bongkar-muat barang dagangan. Mereka terdiri atas bangsa-bangsa Eropa (Portugis, Inggris, Perancis dan Belanda), bangsa Amerika Serikat, bangsa-bangsa India (keling, Malabar, Gujarat) bangsa Turki, bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Birma (Pegu), bangsa Cina, pedagang dari Nusantara dan Semenanjung Melayu.⁶¹

Sultan Iskandar Muda biasanya melarang pedagang-pedagang asing membeli lada langsung ke daerah-daerah produksi lada yang berada di bawah kekuasaannya. Pedagang-pedagang yang ingin mendapatkan lada harus datang terlebih dahulu ke ibukota kerajaan Aceh, Bandar Aceh Darussalam. Ibukota kerajaan menjadi ramai dengan berbagai pedagang asing, pedagang-pedagang suku-suku

⁵⁹Veth, *loc.cit.*

⁶⁰Tiele, *loc.cit.*

⁶¹Lombard, *op.cit.*, hlm. 150-165.

Melayu yang berasal dari daerah-daerah di kepulauan Nusantara dan Semenanjung Melayu.

Ibukota kerajaan menjadi ramai. Kadangkala pedagang-pedagang keliling itu menetap dan membentuk kampung-kampung di dalam kota, seperti kampung Keudah, kampung Jawa, kampung Peulanggahan, atau kampung Pande, yang ada di Banda Aceh. Besar kemungkinan nama kampung yang sampai sekarang masih ada, misalnya, kampung Jawa, kampung Pahang, kampung Kedah, kampung Perak, kampung Pegu, dan kampung Keling, merupakan tempat tinggal para pedagang-pedagang tersebut. Sedangkan pedagang lokal umumnya terdiri atas kaum bangsawan atau orang kaya dan para *uleebalang* setempat.

b. Komoditas Dagangan

Seperti sudah disinggung di atas bahwa Aceh pada waktu itu banyak menghasilkan hasil bumi yang sangat dibutuhkan oleh pedagang-pedagang Nusantara dan luar Nusantara. Pada abad ke-17, bahkan semenjak abad ke-14, sutera banyak dihasilkan di daerah Aceh. Para petani mengusahakan sutera dalam jumlah yang besar, yang diolah menjadi berbagai barang yang sangat digemari di seluruh pulau Sumatera.⁶² Adapun lada telah menjadi barang ekspor utama. Sebelumnya lada banyak diekspor ke Cina, kemudian meningkat karena permintaan yang mendesak dari pedagang Barat, baik pedagang muslim maupun pedagang non-muslim Eropa. Pada mulanya tanaman lada belum begitu dikembangkan di Aceh, bahkan pada tahun 1621 M belum mencapai 500 bahar setiap tahun. Hal itu disebabkan keperluan beras

⁶²Jacobs, *op.cit.*, hlm. 99.

yang mendesak bagi kebutuhan rakyat sehingga banyak tanaman lada yang dicabut.⁶³

Pusat-pusat utama penghasil lada pada waktu itu terdapat di selatan dan barat pulau Sumatera, Semenanjung Melayu, pulau Langkawi dan di Kedah. Pada suatu waktu karena harga lada yang ditetapkan oleh Sultan Iskandar Muda terlalu tinggi, banyak pedagang yang mencari barang dagangan secara diam-diam, seperti de Beaulieu yang secara diam-diam mencari sendiri lada ke Kedah dan Langkawi.⁶⁴

Di samping berperan sebagai "*enterpot*" dari komoditas ekspor, Kota Banda Aceh memerlukan berbagai komoditas impor yang dibutuhkan bagi keperluan penduduk. Sukar sekali kita peroleh angka-angka tentang jumlah satuan barang yang diperniagakan di dalam kota. Namun bagaimanapun, jumlah barang yang dikonsumsi tentu berkaitan erat dengan jumlah penduduk yang mendiami kota dan daerah *hinterlandnya*. Nicolaus de Graaf, orang Belanda yang datang ke Aceh pada tahun 1641 M, dan Dampier, orang Inggris pada tahun 1688 M, mengatakan bahwa kota Banda Aceh mempunyai keliling 2 mil dengan jumlah rumah sekitar 7000 atau 8000 buah. Perkiraan di atas kelihatannya tidak jauh meleset dengan yang dilakukan oleh John Anderson pada permulaan tahun 1800 M yang menyatakan penduduk Bandar Aceh Darussalam adalah 36.000 jiwa.⁶⁵

Jenis mata dagangan lain yang diperdagangkan pada waktu itu adalah gajah, kuda, dan belerang (tanah cempaga). Hasil hutan yang

⁶³Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*. Vol. 1 and 2 (London : The Hakluyt Society, 1884), hlm. 98.

⁶⁴Jacobs, *op.cit.*, hlm. 80.

⁶⁵Anderson, *loc. cit.*

tinggi harganya adalah kayu cendana, sapang, damar, kemenyan putih, kemeyan hitam, kapur, akar pucuk, minyak rasa mala, kulit kayu masui, lada, gading, tali dari sabut kelapa dan sutera.⁶⁶ Dalam *Adat Atjeh* disebutkan bahwa mata dagangan yang didatangkan ke Bandar Aceh Darussalam itu antara lain beras, tembakau, opium, kain, mesiu, dan bahan tembikar, sarang burung, pewarna, senam (tarum), sidelingam (*vermiliun*), manjakani (*majakane*), kesumba, hartal, dan tawas.

Sebaliknya pelabuhan Aceh mengimpor untuk keperluannya sendiri atau untuk diekspor kembali beberapa jenis komoditas, yang terdiri atas bahan makanan, yaitu beras, mentega (minyak barang guci), gula, anggur, kurma, jenis logam, yaitu timah putih, timah hitam, besi batangan, biji besi atau lempengan baja dan jenis tekstil. Yang diimpor dari Gujarat dan Benggala, yaitu kain tenun. Beberapa barang kerajinan tangan dan berbagai macam tembikar (mangkok, batu, pinggan batu) guci pegu, cermin, paku, sabun, kipas, kertas dasa. Bahan perangsang seperti candu, kopi, teh, tembakau dan beberapa barang mewah, yaitu batu karang (pualam), air mawar peti, dan bahkan budak secara tebusan.⁶⁷

Apabila diperhatikan dari komoditas yang diperniagakan di atas, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Komoditas ekspor terdiri atas hasil hutan atau hasil perkebunan dalam bentuk ladang yang tidak menuntut teknologi tinggi atau organisasi sosial yang rumit. Lada merupakan primadona ekspor pada waktu itupun dikerjakan dengan sistem perladangan oleh petani. Apabila petani-petani itu terkonsentrasi pada sebuah areal maka terbentuklah persekutuannya yang disebut *seuneubok*, sementara jika petani

⁶⁶Lombard, *op.cit.*, hlm. 160.

⁶⁷Lombard, *op.cit.*, hlm. 161.

petani itu dimodali oleh orang lain, pemodal tersebut yang umumnya kaum bangsawan dinamai *peutuha pangkay*.

Transaksi perniagaan telah pula memunculkan sistem takaran, timbangan dan mata uang. Satuan takaran atau timbangan yang berlaku tampaknya terkait dengan sistem umum yang berlaku di kawasan barat Nusantara pada waktu itu, yaitu koyan, bahar, pikul, dan kati.⁶⁸

c. Mata Uang

Seperti disebutkan di atas, transaksi perniagaan telah pula memunculkan sistem takaran, timbangan dan mata uang. Satuan mata uang yang dipakai sebagai alat transaksi adalah mata uang asing, yaitu dollar Spanyol atau ringgit meriam dan mata uang lokal, seperti derham, mas, suku, kupang dan busuk.

Menurut catatan sejarah, semenjak abad XII dan abad XIII sudah berlangsung hubungan perdagangan antara negeri Cina dan India (Cambay) dengan kerajaan Pasai. Pedagang-pedagang Cina yang menggunakan perahu-perahu *Jong* yang berniaga pada kota-kota pelabuhan dalam wilayah kerajaan Pasai pada waktu itu telah mempergunakan mata uang perak yang bernama *ketun* sebagai alat tukar dalam mendapatkan barang-barang dari penduduk setempat. Uang *ketun* itu bentuknya panjang, lebar, dan beratnya hampir sama dengan ringgit Spanyol, yang kemudian diedarkan oleh orang-orang Portugis di beberapa kerajaan di Aceh.⁶⁹ Mata uang *ketun* itu beredar dan berlaku

⁶⁸1 koyan = 10 bahar, 1 bahar - 2 pikul atau 200 kati, 1 pikul = 100 kati, 1 kati = 0,62 Kg.

⁶⁹ K.F.H. Van Langen, "De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur Onder Het Sultanaat", *BKI* 37 (1888), hlm. 428.

hingga masa datangnya orang-orang Portugis yang pada tahun 1521 M berhasil menduduki kerajaan Pasai.⁷⁰

Orang-orang Portugis selanjutnya juga mengedarkan mata uang ringgit bergambar tiang yang populer dengan sebutan *ringgiet Spanyol* (ringgit Spanyol), namun orang-orang Aceh menamakan mata uang itu dengan nama *ringgiet meriam* karena pada mata uang itu terdapat dua buah pilar yang menyerupai meriam.⁷¹ Mata uang ringgit meriam itu dikenal secara luas di Aceh dan dinamakan juga *reyal* yang dalam istilah Aceh disebut *rieyeu*, sebagai alat tukar khususnya dalam transaksi lada. Sebagaimana disebutkan dalam karya Pieter van Dam bahwa alat pembayaran dalam pembelian lada di Aceh menggunakan uang *reyal*. Apabila sebelum datang orang-orang Belanda dan Inggris ke Aceh harga lada sekitar 8 *riyal* per *bahar* (1 *bahar* ± 375 lbs Inggris), maka setelah datang pedagang-pedagang tersebut naik menjadi 20 *riyal* per *bahar*, dan ketika datang pedagang-pedagang Perancis naik lagi hingga menjadi 48 *reyal* per *bahar*.⁷²

Selain *reyal* atau *ringgit meriam* itu orang-orang Portugis mengedarkan pula tiga jenis mata uang tembaga, yaitu mata uang tembaga yang ukurannya sebesar *ringgit meriam*, dengan tulisan Arab di salah satu sisinya yang berbunyi *empat kepeng*, disebut dengan nama *duet* (*duit*). Mata uang tembaga yang lebih kecil dengan tulisan Arab yang berbunyi *dua kepeng*. Mata uang itu tidak mempunyai nama dalam istilah Aceh. Mata uang tembaga berbentuk kecil dengan tulisan Arab

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹F.W. Stammeshaus, "Atjehsche Munten", *Culturee Indie*, (1946), hlm. 14.

⁷²Pieter van Dam, *Beschrijving van de Oost-Indische Compagnie*, deel I, (s'Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1923), hlm. 261.

berbunyi *satu kepeng*. Mata uang-mata uang tersebut kemudian hilang dari peredaran bersamaan dengan diusirnya orang-orang Portugis dari kerajaan Aceh, Pasai dan Pedir.⁷³

Selain mata uang tersebut di atas, menurut Tome Pires, di kerajaan-kerajaan pada bagian pantai timur Sumatera terutama di pusat-pusat kerajaan telah digunakan jenis-jenis mata uang tertentu sebagai alat tukar dalam perdagangan. Di Kerajaan Pedir terdapat mata uang dari timah bentuknya kecil yang disebut *keuh* dan mata uang dari emas disebut *drama* serta mata uang yang dibuat dari perak yang disebut *tanga*, yaitu jenis mata uang yang menyerupai uang Siam.⁷⁴

T. Ibrahim Alfian menyebutkan bahwa mata uang emas yang pernah ditemukan di bekas kerajaan Pasai adalah mata uang emas pertama dan dianggap sebagai *deureuham* tertua.⁷⁵ Mata uang emas itu dikeluarkan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik al Zahir (1297-1326 M). Selain itu, Alfian juga menyebutkan bahwa mata uang emas itu ditiru oleh kerajaan Aceh, setelah kerajaan itu menaklukkan Pasai pada tahun 1624 M. Pedagang-pedagang Pasai yang pergi ke Malaka memperkenalkan pula sistem penempatan mata uang emas itu kepada penduduk Malaka.⁷⁶

Kerajaan Aceh Darussalam baru mengeluarkan mata uang emas sendiri pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayatsyah al Kahhar

⁷³van Langen, *op. cit.*, hlm. 429.

⁷⁴Uka Tjandrasasmita, (ed), *Sejarah Nasional Indonesia* jilid II, (Jakarta : Depdikbud, 1981/1982), hlm. 313.

⁷⁵T. Ibrahim Alfian, *Mata Uang Kerajaan-Kerajaan di Aceh* (Banda Aceh : Museum Aceh, 1986), hlm. 8.

⁷⁶*Ibid.*

(1537-1568 M), yang populer dengan sebutan Sultan Al Kahhar. Menurut sumber lokal (kisah *lada sicupak*) sultan Al Kahhar pernah mengirim utusan kepada sultan Turki dan sebaliknya oleh Sultan Turki dikirim ke Aceh ahli-ahli dalam berbagai bidang keterampilan seperti ahli dalam pembuatan senjata (penuangan meriam) dan juga para ahli dalam pembuatan mata uang.⁷⁷ Kepada orang-orang Turki inilah Sultan Al Kahhar menyuruh membuat mata uang emas yang juga disebut dengan nama *deureuham*, menurut nama mata uang Arab. Sultan Aceh menetapkan ringgit Spanyol sebagai kesatuan mata uang yang hendak dilaksanakan itu. Ditetapkan pula bahwa dari sejumlah emas untuk satu ringgit Spanyol dapat ditempa menjadi 4 *deureuham*, sehingga 4 *deureuham* sama dengan satu ringgit Spanyol.⁷⁸ Selanjutnya, mutu emas yang diperlukan untuk mata uang emas harus pula memenuhi syarat, yaitu kadar harus *sikureueng mutu* (sembilan mutu).⁷⁹

Dari orang-orang Inggris sultan Aceh membeli mata uang tembaga yang di atasnya dibubuhi gambar seekor ayam betina, yang dinamakan *duet manok* (mata uang ayam betina). Sultan menetapkan pula bahwa untuk 1000 *duet manok* sama nilainya dengan 1 ringgit Spanyol. Adapun hitungan mata uang yang ditetapkan sultan adalah : 1 ringgit meriam sama dengan 4 *meuih* (mas), 1 *meuih* (mas) sama dengan 250 *duet manok*.⁸⁰

⁷⁷ Nuruddin Ar-Raniri, *Bustanussalatin*, disusun oleh T. Iskandar (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), hlm. 31.

⁷⁸ van Langen, *op.cit.*, hlm.430.

⁷⁹ *Ibid.*, Mutu sama dengan derajat sepersepuluh untuk menimbang emas ; emas sepuluh mutu sama dengan 24 karat.

⁸⁰ *Ibid.*,

Banda Aceh dalam Kurun Niaga

Selain membuat mata uang emas yang disebut *deureuham*, kerajaan Aceh pada waktu itu juga membuat mata uang dari timah yang dinamakan *keuh*. John Davis, nahkoda pada kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman datang ke kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah Al Mukammil (1588-1604 M), menyebutkan ada dua jenis mata uang utama yang beredar di kerajaan Aceh pada waktu itu, yaitu mata uang emas yang bentuknya sebesar uang sen di Inggris dan mata uang dari timah yang disebut *casches* (mungkin *keuh* dalam bahasa Aceh, orang Portugis menyebutnya *caxa*, dibuat dari timah dan kuningan, Belanda menyebutnya *kasja* atau *kasje*). Selain kedua jenis mata uang utama tersebut, terdapat pula jenis-jenis mata uang lain seperti *kupang* (mata uang yang dibuat dari perak), *pardu* (juga terbuat dari perak yang ditempa oleh Portugis di Goa),⁸¹ dan *tahil*. Adapun nilai dari setiap mata uang tersebut : nilai 1600 *casches* sama dengan 1 *kupang* ; 4 *kupang* sama dengan satu *deureuham*, 5 *deureuham* (uang emas) sama dengan 4 schelling Inggris, 4 uang emas sama dengan 1 *pardu* dan 4 *pardu* sama dengan 1 *tahil*.⁸²

Sistem mata uang tersebut tidak mengalami perubahan hingga pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Pada masa Sultan Iskandar Muda menetapkan suatu ketentuan baru terhadap mata uang emas yaitu dari jumlah emas yang sama tanpa mengubah kadar emasnya, 1 uang emas (1 *deureuham*) dijadikan 5 *deureuham*. Walaupun nilai emas yang sebenarnya telah dikurangi, tetapi nilai peredarannya masih tetap dapat dipertahankan seperti sebelumnya. 4

⁸¹ Alfian, *op.cit.*, hlm. 11.

⁸² Julius Jacobs, *Het Familie en Kampongleven op Groot Atjeh* deel II, (Leiden : E. J. Brill, 1894), hlm. 187.

deureuham emas tetap bernilai 1 ringgit Spanyol dalam peredarannya.⁸³

Pada masa pemerintahan Tajul Alam Safiatuddin Syah (641-1675 M), puteri Sultan Iskandar Muda, dilakukan lagi pengurangan timbangan emas dari sebuah *deureuham* ; bahkan ia juga mengurangi pula kadar emasnya. Dari jumlah emas untuk menempa satu ringgit Spanyol ia menyuruh tempa menjadi 6 buah *deureuham* dengan mengurangi kadar emasnya dari 9 menjadi 8 *mutu meuih* atau menurut hitungan emas Belanda menjadi 19,2 karat. Walaupun demikian *deureuham* itu tidak berubah dalam nilai sirkulasinya seperti sebelumnya. Sultanah Safiatuddin juga memerintahkan supaya dikumpulkan semua *deureuham* yang telah diperbuat sebelum masa pemerintahannya untuk kemudian dilebur menjadi *deureuham* baru.⁸⁴ Oleh karena itu, *deureuham-deureuham* yang berasal dari sultan sebelum ini sangat sulit diperoleh.

Baik *deureuham* yang berasal dari kerajaan Pasai maupun *deureuham* dari kerajaan Aceh, bentuknya kecil, tipis dan bulat dan bergaris tengah ± 1 cm. Beratnya tidak lebih dari 9 grein Inggris, (1 grein sama dengan 0,583 gram).⁸⁵ Dalam karya T. Ibrahim Alfian dapat dilihat bahwa berat *deureuham* itu mulai dari 0,50 gr (yang paling rendah) sampai 0,60 gr (yang paling tinggi) dan *deureuham* ini umumnya terbuat dari emas 18 karat.⁸⁶ Huruf-huruf yang terdapat pada kedua muka uang tersebut dicetak timbul dengan aksara Arab yang

⁸³van Langen, *loc.cit.*

⁸⁴Van Langen, *op.cit.*, hlm. 431.

⁸⁵Kreemer, *Atjeh*. (Laeiden : E.J. Brill, 1923), hlm. 53.

⁸⁶Alfian, *op.cit.*, hlm. 13-56.

relatif kasar di dalam lingkaran titik-titik timbul sebagai garis pinggirnya.⁸⁷

Pada sisi bagian muka uang itu umumnya tertera nama sultan dengan memakai gelar Malik az-Zahir. Hal itu berlaku baik bagi *deureuham* yang dikeluarkan oleh sultan-sultan Pasai maupun untuk *deureuham* yang dikeluarkan oleh sultan-sultan yang memerintah di kerajaan Aceh. Hal itu terjadi karena sultan-sultan di kerajaan Aceh meniru kebiasaan sultan-sultan Pasai dengan memberi gelar Malik az-Zahir pada *deureuham-deureuham* mereka.⁸⁸ Namun demikian, tidak semua sultan kerajaan Aceh membubuhi gelar Malik az Zahir karena sesudah pemerintahan Sultan Ali Riayat Syah (1571-1579 M) sultan-sultan berikutnya tidak menggunakannya lagi.⁸⁹

Pada sisi lain terdapat tulisan dalam bentuk ungkapan yang berbunyi *as sultan al adil*, sebagaimana *deureuham-deureuham* Pasai. Ungkapan itu juga digunakan oleh sultan di kerajaan Aceh, hingga masa pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Syah Al Mukammil (1589-1604 M). Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) ungkapan itu tidak digunakan lagi.⁹⁰

Mata uang *deureuham* yang dikeluarkan oleh Sultan Iskandar Muda pada sisi mukanya terdapat namanya yaitu Sultan Iskandar Muda dan pada sisi lainnya tertulis *Johan berdaulat fil Alam*. Pada masa pemerintahan Tajul Alam Safiatuddin Syah pada *deureuham* yang dikeluarkan ditulis namanya sendiri Safiatuddin Syah dan pada sisi yang

⁸⁷Kreemer, *loc.cit.*

⁸⁸Alfian, *op.cit.*, hlm. 9.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*

lain tertera nama *Paduka Sri Sultan Tajul Alam*.⁹¹ Pada semua *deureuham* yang pernah dikeluarkan oleh sultan-sultan di kerajaan Aceh tidak dinyatakan tahun pembuatannya. Ada kemungkinan untuk tetap menjamin nilai sirkulasinya, hingga pada masa-masa pemerintahan sultan berikutnya.

Sesudah pemerintahan Tajul Alam, tidak ada lagi sultan-sultan di Kerajaan Aceh yang menempa mata uang *deureuham*. Baru pada masa pemerintahan Sultan Syamsul Alam (1723 M) ditempa sejenis mata uang yang dinamakan *keuh Cot Bada*. Disebut demikian karena mata uang itu beredar di wilayah Cot Bada saja yang memiliki pasar sangat ramai. Nilainya 140 *keueh* Cot Bada itu sama dengan 1 ringgit Spanyol.⁹² Selanjutnya pengganti Sultan Syamsul Alam, yaitu Sultan Alauddin Ahmad Syah (1723-1735 M), menempa lagi pecahan mata uang timah yang juga dinamakan *keueh*. Ia menetapkan bahwa 800 *keueh* itu bernilai 1 ringgit Spanyol. Dengan demikian, mata uang berlaku di Kerajaan Aceh pada waktu itu ialah 1 ringgit Spanyol sama dengan 4 *deureuham*, 1 *deureuham* sama dengan 200 *keueh*.⁹³

Pembuatan mata uang *keueh* terus berlanjut pada masa pemerintahan sultan-sultan selanjutnya hingga yang terakhir, yaitu Sultan Alauddin Mahmud Syah (1870-1874 M). Semenjak itu dan seterusnya Kerajaan Aceh terlibat perang dengan Belanda. Bentuk uang *keueh* yang dikeluarkan oleh masing-masing sultan tidak serupa. Variasinya terdapat dalam nilai untuk setiap ringgit Spanyol pada masa pemerintahannya masing-masing. Tulisan yang terdapat di atasnya tidak

⁹¹van Langen, *op.cit.*, hlm. 431.

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*, hlm. 432.

begitu terang, kadang-kadang pada sisi depannya terdapat aksara Arab yang berbunyi *bandar atjeh dar as salam* dan di sisi lainnya terdapat tiga buah figur semacam pedang yang dibaringkan dan di atasnya diberi beberapa buah titik. Gagang pedang itu kadang-kadang mengarah ke kiri dan kadang-kadang ke kanan. Beberapa mata uang *keueh* itu ada yang memuat tahun pembuatannya, tetapi kebanyakan tidak.⁹⁴ Pembuatan mata uang *keueh* itu memakai tuangan yang dibuat dari tembaga dan batu. Acuan batu terbuat dari batu pasir berwarna abu-abu yang lazim dipakai untuk batu-batu nisan. Acuan-acuan itu terdiri atas dua buah balok kecil yang sama besar dengan sebuah saluran terbuka di antaranya dimana timah dapat mengalir ke dalam acuan tersebut. Cara pembuatannya persis sama seperti orang menuang peluru-peluru masa lalu dan menuang rantai untuk membuat jala penangkap ikan.⁹⁵

Berbeda dengan *deureuham* yang berlaku di seluruh kerajaan Aceh, sirkulasi mata uang *keueh* itu terbatas di wilayah Aceh Besar saja. Di Pidie, misalnya, mata uang itu tidak berlaku sebagai alat tukar. Di daerah itu ulebalang-ulebalangnya mendapat izin untuk menempa mata uang sendiri yang dinamakan *gupang* (kupang) dan *busok* yang dibuat dari perak. Pembuatnya ialah orang-orang Keling.⁹⁶

Pada mata uang *gupang* terdapat gambar, sedangkan pada *busok* tidak. Pada sebuah sisi *gupang* terdapat tulisan yang dapat dibaca dengan *paduka sultan Alauddinsyah*. Pada sisi yang lain tertulis 6 (=peng) *azizul berkat*. Adapun sistem nilai terhadap mata uang yang beredar di Pidie adalah 1 ringgit Spanyol sama dengan 4 *deureuham*

⁹⁴Kreemer, *op.cit.*, hlm. 54.

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶van Langen, *op.cit.*, hlm. 433.

atau *meuih*, 1 *meuih* sama dengan 4 *gupang*, 1 *gupang* sama dengan 2 *busok*, dan 1 *busok* sama dengan 3 *peng*. Mata uang *peng* dibuat dari tembaga pada masa kompeni Inggris dan Belanda yang bernilai 2,5 *duet*.⁹⁷

d. Pasar

Pasar yang terdapat di dalam kota Bandar Aceh Darussalam hendaknya jangan diartikan sebagai pasar moderen yang bersifat abstrak, melainkan lebih bersifat kongkrit. Artinya, produsen dan konsumen melakukan transaksi ditempat-tempat itu. Lokasi pasar kelihatannya kerap kali berubah sesuai dengan situasi politik dalam ibukota. Sebagai contoh pada masa permulaan pemerintahan Sultan Alaidin Jauhan Syah (1735-1760 M) saingannya, Sultan Jamal alam Badr al Munir, menjadikan kampung Jawa sebagai pusat kegiatan perniagaan. Pejabat Kesultanan yang bertanggung jawab terhadap pelabuhan dan pasar di sebut Syahbandar.

Tindakan demikian merupakan salah satu sumber keluhan Pocut Muhammad, karena pendapatan istana berkurang.⁹⁸ Menurut peta-peta ibukota yang dibuat oleh Belanda pada permulaan perang Aceh, lokasi Peukan Aceh terletak pada pertemuan Krueng Daroy dengan Krueng Aceh atau pada lokasi kantor C.P.M sekarang.

e. Pelabuhan

Upaya-upaya perluasan daerah yang di lakukan oleh sultan Aceh menjadikan Aceh meliputi jaringan yang luas. Puncaknya pada

⁹⁷*Ibid.*, hlm 434.

⁹⁸ *Hikayat Pocut Muhammad*, edited by G.W.J. Drewes, (The Hague : Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 40 42.

Banda Aceh dalam Kurun Niaga

Abad ke-17 kerajaan Aceh berdiri kuat ; tidak hanya menguasai pantai-pantai tetapi juga hampir seluruh perniagaan pantai timur dan barat pulau Sumatera dan beberapa kawasan di Semenanjung Tanah Melayu, seperti Johor, Kedah, Pahang dan Perak,⁹⁹ dikendalikan oleh kerajaan Aceh.

Sultan Aceh mewajibkan para penanam lada di setiap daerah kekuasaannya untuk menjual panen lada mereka ke pasar Aceh. Oleh sultan Aceh, hasil rempah-rempat itu dijual kembali kepada bangsa asing melalui pelabuhan di Banda Aceh. Kebutuhan akan tenaga kerja pertanian untuk menanam padi dan lada mendorong sultan untuk mendatangkan tenaga kerja, terutama dari daerah-daerah yang ditaklukkannya.

Sultan mengusahakan sebanyak mungkin pedagang untuk berdagang di pelabuhannya. Setiap orang asing yang ingin berdagang di salah satu pelabuhan vasal Aceh harus singgah terlebih dahulu di Banda Aceh dan meminta surat pas sesuai dengan peraturan yang berlaku di kerajaan Aceh. Pada tahun 1602 M Lancaster bermaksud mengambil muatan lada di Priaman karena harganya lebih menguntungkan. Untuk itu ia mengirim kapal *Susan* yang dipimpin Henry Middleton ke Aceh untuk memohon izin dari juru-juru tulis sultan.¹⁰⁰ Demikian juga yang dilakukan Beaulieu pada tahun 1620 M ketika berdagang dengan Tiku.¹⁰¹

⁹⁹G. Ferrand, *Relations de voyages et Textes Geographiques Arabes, Person et Turcr Relatifs a L'Extreme Orient du VIIIe au XVIIIe s., trad., Revue et Annotee* (Paris : Leroux, 1913), hlm. 670-1.

¹⁰⁰*JBRAS*, no. 31, (1898), hlm. 107-151.

¹⁰¹Lombard, *op.cit.*, hlm. 148.

Dalam *Adat Aceh* disebutkan bahwa ”pada hari Jumat tanggal 14 Rabi ul awal 1045 sekitar pukul 12 siang, pada suatu saat yang baik dalam pemerintahan Paduka Sri Sultan Iskandar Muda, yang dirahmati Allah, telah dikeluarkan pengumuman mengenai semua kapal yang datang berdagang di Aceh Darussalam. Pengumuman itu sebagai berikut : kapal-kapal Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, Spanyol, Keling, Pegu, dan lain-lain, hendak mengetahui bahwa jika berdagang di pelabuhan lain yang bukan Aceh Darussalam tanpa ada izin sultan, yang dirahmati Allah, mereka membuat pelanggaran dan akan kena hukuman yang disebabkan ketidakpatuhan pada undang-undang yang telah diumumkan dengan demikian”.

Perlu diketahui bahwa persepsi pelabuhan pada waktu itu jangan disamakan dengan perkembangan pelabuhan pada zaman sekarang. Pada waktu itu pelabuhan kebanyakan hanya dengan memanfaatkan muara-muara sungai, seperti muara sungai Aceh dan Teluk Ulee Lheue.

f. Pelayaran

Sebagai daerah maritim, orang-orang Aceh merupakan bangsa pelaut yang mahir mengarungi lautan. Semenjak lama orang-orang Aceh telah melayari lautan dengan kapal-kapalnya sendiri. Kapal-kapal dagang Aceh pada waktu itu telah melayari lautan ke arah barat sampai ke negeri-negeri Arab dan Persia, ke arah timur sampai ke negeri Cina.¹⁰² Pinto (petualang Portugis) menyebutkan bahwa kerajaan Aceh

¹⁰² Ibnu Bathuthah, *Rihlah Ibnu Bathuthah*. Ed. By Abd. Al-Hali al-Tazi, vol. 4. (Rabat : Akadimiyyah al Mamlakah al-Maghribiyyah, 1997), hlm. 171-172.

telah memiliki armada kapal yang besar, sehingga pernah satu armada kapal dagang Aceh sebanyak empat buah sampai ke Turki membawa barang dagangan dan pulang dengan membawa senjata.¹⁰³ Anderson juga mencatat bahwa Aceh telah memiliki kapal dagangnya sendiri yang cukup banyak. Pada tanggal 6 Desember 1815, Sultan Aceh, Jauhar Alam, tiba di pelabuhan Penang dengan sebuah armada dagang sendiri yang terdiri atas beberapa buah kapal, dengan tujuan hendak mengadakan suatu pembicaraan dengan gubernur Penang.¹⁰⁴

Orang Aceh, pada umumnya yang paling dahulu ditemukan bangsa Eropa ialah nelayan yang lalu lalang di teluk dengan perahu mereka yang bercadik dua.¹⁰⁵ Pada tanggal 2 Juni 1602 M, kata Lancaster, "kami membuang sauh di teluk *Dachen*, beberapa orang negeri itu naik ke kapal kami dari perahu mereka yang lebih besar dari yang pernah kami lihat sampai saat itu, dengan cadik di sebelah-menyebelah sehingga perahu mereka tidak mudah tenggelam".¹⁰⁶

Pejabat ahli yang diangkat untuk memajukan perikanan, yaitu : *Panglima laot*, menjadi penguasa tertinggi dalam bidang perikanan laut. *Keujrun kuala* adalah pejabat penguasa kuala. *Pawang pukut* adalah pemimpin teknis perahu pukut dan bersama-sama anak pukut ikut turun ke laut.

Berkaitan dengan kelautan itu terdapat *Hukom Adat laut*, peraturan mengenai penangkapan ikan di laut, mengatur masalah

¹⁰³Said, hlm. 101-102.

¹⁰⁴ Anderson, *op. cit.*, hlm. 64.

¹⁰⁵ Lombard, *op. cit.*, hlm. 79.

¹⁰⁶ Sir James Lancaster, *The voyages of Sir James Lancaster to Brazil and the East Indies . 1591-1603*, (London : Hakluyt Society), hlm. 129.

penangkapan ikan, alat-alat penangkap ikan, para nelayan, upah kerja, pembagian hasil antara yang punya alat dengan pekerja, pemimpin, tugas-tugas pemimpin, mengambil penyu, cukai laut, dan sebagainya.

B. Produksi Hasil Perdagangan

a. Pertambangan dan Perindustrian

Industri ringan dan berat berkembang pesat di Banda Aceh. Ahli-ahli dalam bidang industri dinamakan *pande*, seperti *pande meueh*, *pande beusoe*, *pande kaye*, *pande kapai*, dan sebagainya. Tempat-tempat industri itu dinamakan *teumpeuen*, bahkan terdapat kompleks sebagai daerah industri, yaitu Gampong Pande.

Para pengrajin, seperti pandai besi mengerjakan segala macam pekerjaan besi, baik yang berat maupun yang ringan berupa pisau, keris mata lembing dan senjata lainnya. Ada tukang-tukang tuang meriam, mereka juga menuang berbagai macam alat dari kuningan seperti kandil, lampu, dan bokor. Mereka juga banyak memakai pelarikan, baik yang dari tembaga maupun yang dari kayu.¹⁰⁷

Pandai emas sangat banyak dan terampil. Sultan Iskandar Muda yang sangat besar perhatiannya untuk batu permata dan barang emas” mempunyai lebih dari 300 pandai emas yang setiap hari bekerja untuknya.

¹⁰⁷ Augustin de Beaulieu, "Journal d' Augustin de Beulieu" dalam Thevenot, *Collection de de divers voyages curieux, qui n'ont point ete publiees ou qui ont ete traduites d'Hacluyt, de Purchas et d'autres voyageurs, anglois, hollandais, portugais, allemands, espagnols et de quelques persan, arabes et autres orientaux* (Paris : Cramoisy, Paris 1664-6), hlm. 99-100.

Banda Aceh dalam Kurun Niaga

Pada suatu hari Beaulieu mendapat kehormatan untuk mengunjungi khazanah tempat segala karya agung tukang-tukang itu. Ia melihat sejumlah besar permata yang sudah dan belum dipasang, dan kebanyakan disuruh lubang dari dua arah untuk dijadikan kalung dan rantai zamrud yang besar-besar, dan untuk baju sesuai dengan gayanya yang penuh dengan sulaman permata, dan juga berbagai hasil kepandaian logam seperti bejana emas yang besar-besar. Banyak pedang pisau dan badik menurut potongan mereka, banyak kancing kait untuk dipasang pada baju-bajunya atau pada celah baju dalam bentuk kancing. Beaulieu menambahkan bahwa pada suatu ketika karena kelengahan salah seorang pandai emas karena suhunya terlalu tinggi maka hilanglah sepuhan emas pada salah satu mata lembing yang dipersembahkan kepada sultan. Sultan sangat marah dan mengancam akan membunuh pengrajin tersebut, namun de Beaulieu menawarkan jasa salah seorang anak kapalnya, Houppenille, yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pandai emas di kota Rouen. Sultan menerima tawaran itu dan begitu puas dengan bakat orang Normandie itu hingga waktu tiba hari pemberangkatannya, ia tidak mau melepaskannya.¹⁰⁸

Dalam *Hikayat Aceh* disebutkan :

”...sekalian payung itu berkemuncakkan mas permata dan batangnya daripada kayu ungu yang keemasan...dan beberapa dari Bujang Sabil Allah memikul pedang berhulu emas permata dan bersarung emas permata dan bertalikan emas permata...memikul keris yang berhulukan zamrud yang hijau dan bersarungkan emas berpermata...dan beberapa daripada busur keemasan dan tarkas mas berpermata...”

Salah satu rahasia pandai emas adalah adukannya yang mengagumkan. Namun, jumlah pandai emas yang banyak itu merosot bersama memudarnya kesultanan. Pada tahun 1688 M, Dampier sudah tidak setinggi itu lagi pujiannya. Ia menyebutkan bahwa pandai besi di

¹⁰⁸Lombard, *op.cit.*, hlm. 81.

kota sudah sedikit, pandai emasnya kebanyakan orang asing tetapi masih ada beberapa orang Aceh yang pandai mengolah logam.¹⁰⁹

De Beaulieu menceritakan hasil-hasil hutan yang banyak dihasilkan disebutkan di antaranya minyak tanah. Di Deli terdapat sumber minyak yang mereka anggap tidak bakal bisa dipadamkan apabila dibakar, dan bisa terbakar di laut. Sultan Aceh dengan minyak itu pernah membakar dua kapal Portugis yang sedang diperangnya di dekat Malaka. Belerang (tanah cempaka) banyak dihasilkan di Sabang. Kamper (kapur banyak dihasilkan sekitar enam jam ke arah timur Banda Aceh), di Singkel didapati setiap tahun banyak kamper yang dengan tekun dikumpulkan oleh masyarakat dan dijual sekitar 15,16 real sekati, (timbangan 28 ons). Kemenyan, di daerah Barus banyak menghasilkan kemenyan, bahkan kemenyan tersebut dipakai sebagai alat tukar di pasar untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Emas, diperoleh dari hasil galian secara kecil-kecilan. Emas tersebut kadang-kadang dimanfaatkan dengan menukarnya dengan beras, senjata dan kain katun dari orang-orang Minangkabau dan dengan garam, dan baja.¹¹⁰

Karena semakin besarnya persaingan mencari emas maka pengawasan menjadi lebih ketat. Dibuatlah cerita-cerita yang menakutkan dan mengerikan tentang orang-orang gunung supaya pencari-pencari emas yang nekat tidak meneruskan usahanya.¹¹¹

¹⁰⁹Guillaume Dampier, *Suplement du voyage autour du monde (contenant une description d'Achin, ville de Sumatra, du royaume de Tonquin et autres places des Indes et de la Baye de Campeche, enrichi de cartes et figures)*, Rouen : J.B. Machuel, 1723), hlm. 159.

¹¹⁰Beaulieu, *op.cit.*, hlm. 97-99.

¹¹¹Dampier, *op.cit.*, hlm. 163.

b. Pertanian

Beras menjadi masalah pertama yang harus diatasi penduduk yang kebanyakan tinggal di kota. Untuk itu, lahan yang ada dan subur harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan segala macam padi-padian, supaya tidak selalu tergantung pada beras dari luar.¹¹²

Selain penyediaan beras dari Pidie dan Daya, beras juga banyak didatangkan dari Semenanjung Malaya. Menyadari kebutuhan beras yang begitu besar maka orang-orang Eropa mendatangkan beras dengan nilai yang tinggi, sekaligus mengimpor budak-budak untuk menanam padi.¹¹³

Hasil hutan juga dimanfaatkan semaksimal mungkin, apalagi sebagai daerah yang kaya akan hasil bumi, baik tumbuh-tumbuhan maupun tambang. Pelabuhan-pelabuhan dagang juga dimanfaatkan terutama oleh orang yang hidup dari perdagangan hasil bumi, mereka membawa hasil bumi dari pedalaman kemudian dijual kepada pedagang lintas jauh. Sumber-sumber Arab menyebutkan kamper dari Fansur termasuk salah satu mata dagangan yang sangat populer pada waktu itu.

Dalam *Hikayat Atjeh* disebutkan bahwa emas 24 karat dan belerang yang bagus sekali dalam tambang-tambang yang memberi hasil tak habis-habisnya, minyak tanah yang baik sekali di dalam danau-danau yang tak kering-keringnya, dan segala sesuatu yang dihasilkan hewan di hutan belantara, guliga dan kasturi, dan madu, dan segala sesuatu yang dihasilkan pohon di hutan seperti kamper dan kemenyan, baik yang putih maupun yang hitam, kayu kelembak, kayu gaharu, kayu

¹¹²Beaulieu, *op.cit.*, hlm. 98.

¹¹³Lancaster, hlm. 136. Beaulieu, hlm. 99.

cendana, damar, cabai, lada, dan semua hasil lain yang berasal dari tambang dalam tanah atau dari pohon di hutan.¹¹⁴

Harga lada pada waktu itu sangat bervariasi. John Davis menyebutkan bahwa harga lada di Aceh sekitar 4 real sebahar, namun pada masa Lancaster ke Aceh harga lada sudah naik lagi menjadi 20 real sebahar, kemudian naik menjadi 24, 27 dan 30, bahkan sampai 30 tays dan 54 real sebahar.¹¹⁵

Peraturan yang mengatur berkaitan dengan pertanian terdiri atas :

1. *Hukum adat Blang*, peraturan mengenai persawahan. Hukum ini mengatur masalah perairan, sewa menyewa tanah, pembagian hasil, pemakaian air, pajak hasil bumi, menghidupkan tanah mati, sawah, dan sebagainya.

Pejabat yang mengurus dalam bidang ini ialah ;

- a. *Keujrun Lueng*, tenaga ahli yang mengepalai urusan pengairan
 - b. *Keujrun Blang*, tenaga ahli yang mengepalai urusan pertanian dan persawahan.
2. *Hukum Adat Seuneubok* (peraturan mengenai perkebunan) mengatur masalah perizinan pembukaan tanah, pengangkatan pejabat-pejabatnya, pengelolaan, dan sebagainya. Setiap *seuneubok* diangkat seorang *petua seuneubok* dan *peutua Chik Seuneubok* yang di bawahnya terdiri atas beberapa orang *peutua seuneubok*.
3. *Hukum Adat Gle* (peraturan mengenai kehutanan atau rimba) mengatur kedudukan dan tugas *keujrun gle* (pejabat ahli tentang

¹¹⁴Iskandar, *op.cit* hlm. 164.

¹¹⁵Lancaster, *op.cit.*, hlm. 100, 134.

kehutanan), pembagian hasil usaha *wase glee*, larangan memotong kayu, adat merusa, kedudukan *pawang gle* (pejabat ahli tentang kehidupan rimba), cara mengambil madu lebah, dan sebagainya.

Pejabat yang diangkat untuk itu ialah ;

- a. *Keujrun Gle*, tenaga ahli kehutanan yang ditugaskan mengepalai urusan-urusan kehutanan.
- b. *Pawang Gle*, tenaga ahli kehidupan rimba, ditugaskan untuk memimpin dan melindungi para pemburu, mengatur daerah perburuan dan binatang-binatang yang boleh diburu, serta melindungi binatang-binatang rimba. Selanjutnya ada juga peraturan yang mengatur mengenai peternakan, yaitu *Hukom Adat Geumeubeu*. Hukum ini mengatur mengenai penternakan, seperti *mawaih*, pemasaran hewan, tempat memelihara ternak, dan sebagainya. Orang yang ahli dalam bidang *geumeubeu* ini disebut *pawang geumeubeu*.

c. Perikanan

Menangkap ikan merupakan bagian penting dari kesibukan orang Aceh. Ikan sangat banyak terdapat di Aceh, baik di sungai maupun di laut.¹¹⁶ Dahulunya para nelayan tergolong orang yang kaya dari semua orang yang mempunyai keahlian.¹¹⁷ namun terbatas pada mereka yang mampu membeli jaring sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang besar dengan adanya jaring tersebut.

¹¹⁶ Menangkap ikan juga dianggap sebagai sebuah hiburan. Dari *Bustanussalatin* diketahui bahwa ada tempat khusus disediakan di taman istana, di tepi sungai, supaya sultan dapat memancing dengan tenang. Lombard, *op.cit.*, hlm. 79.

¹¹⁷Dampier, *op.cit.*, hlm. 159.

Melaut sangat tergantung pada cuaca. Ketika cuaca baik banyak perahu atau kapal besar yang melaut dengan membawa jaringan besar. Apabila kapal sudah penuh dengan ikan hasil tangkapan maka ikan tersebut langsung dibawa ke pasar. Di samping penangkapan yang dilakukan secara besar-besaran, terutama yang dilakukan oleh orang-orang kaya, ada juga nelayan kecil yang bekerja sendiri-sendiri. Mereka memancing dengan menggunakan perahu kecil dan dalam setiap perahu hanya ada satu atau dua orang, juga ada budak-budak yang dipekerjakan sebagai nelayan.¹¹⁸

Seperti sudah dimaklumi bahwa laut dan sungai pada zaman dahulu selain sebagai tempat mencari rezki juga sebagai sarana transportasi. Untuk mencapai suatu tempat dalam rangka berbagai keperluan, seperti perdagangan, lebih mudah ditempuh melalui jalur laut dan sungai karena pada waktu itu transportasi darat masih sangat terbatas.

Sebagai tempat mencari rizki, dikenal istilah perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat pada waktu itu belum merupakan sistem mata pencaharian pokok bagi masyarakat. Hal itu disebabkan sebahagian besar masyarakat mendiami daerah pesisir. Masyarakat memelihara ikan di kolam hanya sebagai pekerjaan sampingan. Kecuali ikan yang dipelihara di kolam, penduduk juga menangkap ikan-ikan yang hidup tanpa pemeliharaan, yang terdapat di alur, payau, dan sungai.

Penangkapan ikan di darat dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya kail. Pekerjaan menangkap ikan dengan menggunakan kail disebut *keumawe*. Tusuk adalah cara yang

¹¹⁸ *Ibid.*

mempergunakan senjata yang dibuat dari kawat. Kawat tersebut diruncingkan pada salah satu ujungnya, yang disebut *tempuleng*. *Raba* adalah sebuah cara yang mempergunakan tangan yang disebut dengan *seumeukup*. Dengan Jaring, jala, *tanggung*, *nyap*, *bubu*, dan sebagainya.

Apabila perikanan darat belum menduduki tempat yang begitu penting, sebaliknya bidang usaha perikanan laut telah menduduki posisi penting dalam kerangka sistem mata pencaharian hidup sebahagian besar masyarakat.

Alat yang dipergunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan di laut adalah perahu kail dan perahu pukot. Perahu yang digunakan oleh nelayan pada umumnya berukuran kecil untuk dua orang pengail. Perahu tersebut biasanya dilengkapi dengan layar. Para nelayan tersebut sangat memahami keadaan cuaca yang diketahuinya dengan mengamati keadaan peredaran bintang-bintang di langit. Pekerjaan menangkap ikan dilakukan juga dengan perahu pukot. Awak pukot terdiri atas 5 hingga 10 orang. Mereka dipimpin oleh seorang pawang yang disebut *pawang pukot*.

Kegiatan turun ke laut diatur dan dikoordinir oleh *panglima laot*. Ia dipilih oleh para pawang. Tokoh yang dipilih untuk posisi ini ialah tokoh yang berwibawa di samping mempunyai pengetahuan tentang aktivitas di laut. Fungsi dan tugas *panglima laot* ialah menentukan dan mengatur jadwal kegiatan turun ke laut, mengkoordinir upacara turun ke laut, menyelesaikan dan mendamaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara para nelayan.¹¹⁹

¹¹⁹T. Syamsudin, dkk., *Adat-istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh : P2NB Daerah Istimewa Aceh, 1978), hlm. 27-39.

Banda Aceh dalam Kurun Niaga

Peraturan mengenai penangkapan ikan di laut disebut *Hukum Adat laut*, yang mengatur masalah penangkapan ikan, alat-alat penangkap ikan, para nelayan, upah kerja, pembagian antara yang punya alat dengan pekerja, pemimpin, tugas-tugas pemimpin, mengambil penyus, cukai laut, dan sebagainya.

Pejabat ahli yang diangkat untuk memajukan perikanan, yaitu ;

a. *Panglima laot*, menjadi penguasa tertinggi dalam bidang perikanan laut.

b. *Keujrun kuala*, pejabat penguasa kuala yang menjadi pangkutan dari perahu-perahu pukat.

c. *Pawang pukat*, pemimpin teknis perahu pukat dan bersama-sama anak pukat ikut turun ke laut.

C. Perdagangan Dalam Negeri

Untuk mengatur supaya perdagangan dalam negeri berjalan dengan baik dan keadaan harga tetap stabil, maka dibuat peraturan dan adat yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri, yang terdiri atas:

1. *Hukum wase adat*, yang mengatur *adat-peukan*, *adat blang*, *wase kuala*, *wase lhok*, *wase gle*, dan lain-lain.

2. *Hukum adat ukuran*, yang mengatur jenis-jenis ukuran, cara pemakaian, dan sebagainya.

3. Hukum yang menetapkan bahwa para menteri, para panglima, para pejabat tinggi dalam kerajaan sekali-kali tidak boleh berniaga, juga tidak boleh memberikan modal kepada para saudagar.

D. Perdagangan Luar Negeri

Bidang ini mengatur segala hal ikhwal perdagangan luar negeri secara umum dan prinsipil, pelabuhan internasional, barang-barang yang boleh diekspor dan diimpor, besarnya bea cukai, ketentuan bagi kapal yang berlabuh, dan sebagainya.¹²⁰

Menurut peraturan perdagangan luar negeri Aceh, dicantumkan sebanyak 73 macam barang dagangan yang diekspor-impor serta ditetapkan jumlah cukainya.¹²¹ Di antara barang ekspor yang terpenting adalah lada, pinang, padi, emas, kayu, kapur barus, gading gajah, dll.¹²²

¹²⁰ Anderson, *op.cit.*, hlm. 45-46.

¹²¹ Di Meulek, *Qamun Meukuta Alam Iskandar Muda*, (Naskah disimpan di Museum Ali Hasjmy Banda Aceh), hlm. 127-130.

¹²² Anderson, *op.cit.*, hlm. 159-167.

BAB IV

LEMBAGA PERDAGANGAN DAN KEUANGAN

A. Balai Baitul Mal

Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pengelolaan keuangan negara dan mendistribusikan dana amal masyarakat kepada yang berhak menerimanya. Balai Baitul Mal dipimpin oleh Bendahara Raja Wazir Derham. Sumber-sumber uang masuk untuk Baital Mal antara lain :

1. Zakat, sedekah, dan wakaf.
2. Jizyah, pajak atas perlindungan bagi non-muslim.
3. Kharraj, pajak hasil bumi dari non-muslim
4. Asyur (bea-cukai)
5. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan kerajaan.¹

B. Balai Furdhah

Balai Furdhah berkedudukan semacam kementerian perdagangan yang dipimpin oleh seorang Menteri Seri Paduka Wazir Pertiagaan. Untuk menjamin pemungutan bea dan pengawasan pelabuhan, sultan memperkerjakan sejumlah besar pegawai pada Balai Furdhah. Balai Furdhah ditempatkan di bawah wewenang bersama Orang Kaya Sri Maharaja Lela dan Penghulu Kawal, pegawai sipil dan

¹ Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta : Penerbit Beuna, 1983), hlm. 84.

militer dibantu oleh *karkun* (juru tulis) dan *syahbandar* (kepala pelabuhan).²

Kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh lembaga Balai Fudhah adalah memungut berbagai bea cukai yang harus dibayar oleh kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan Aceh. Jumlah pungutan bea cukai itu pada awal abad ke-17 terus bertambah. De Beaulieu mencatat bahwa sebelum itu tidak ada bea cukai kecuali *bea cap*. Dalam *Adat Aceh* disebutkan bahwa peraturan pelabuhan menunjukkan adanya bea yang sangat banyak jenisnya, seperti *adat cap* dan *adat lapik cap* yang dapat dibayar dengan bahan mentah dan uang ; untuk memperoleh cap atau izin dari sultan Aceh agar dapat mendarat (yang diberikan berupa keris atau cap). *Adat kain* adalah berupa gulungan kain yang diserahkan oleh orang asing pada saat pelunasan *adat cap*. *Adat kain yang ke dalam* adalah yang khusus diperuntukkan untuk istana. *Adat memohon kunci*, yaitu iuran yang harus dilunasi untuk memperoleh kunci dari palka kapal yang pada saat tibanya kapal harus diserahkan sampai iuran itu lunas. *Hadiah langgar* ialah yaitu hak membuang sauh. *Adat mengawal* ialah biaya para penjaga Aceh yang menjaga di atas kapal selama merapat di pelabuhan. *Adat hak ul kalam* ialah iuran pendaftaran.³

Pedagang-pedagang dari bangsa Belanda dan Inggris dikenakan biaya 7 persen dari barang dagang yang mereka turunkan ke darat berupa bahan. Tetapi ada pedagang yang harus membayar dengan emas

² Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda*. terjemahan Arifin Winarsih (Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm. 149.

³*Adat Aceh*, Manuscript India Library, ditranskrip oleh Teungku Anzib Lamyong, (PLPIIS Aceh, 1976), hlm. 22-32.

dan barang mereka yang ditaksir oleh petugas bea cukai, diberi harga 50 persen lebih tinggi dari harga yang sebenarnya.

Tugas lain yang dibebankan kepada pegawai pelabuhan adalah mengatur datangnya barang dan menggudangkannya sesuai dengan penjualan atau pembelian yang diadakan sultan atau perantaranya dengan pedagang asing.⁴

Pejabat yang ditugaskan pada Balai Furdhah, antara lain ;

1. Orang Kaya Seri Maharaja Lila
2. Penghulu Kawal (mungkin semacam panglima maritim)
3. Syahbandar Muktabar Chan, pejabat yang mengepalai pelabuhan.
4. Syahbandar Saiful Muluk
5. Syahbandar Seri Rama Setia
6. Syahbandar Mu'izzul Muluk.
7. Penghulu Keurukon.
8. Seri Purba Chan
9. Nadhar Majelis Chan
10. Nadhar Maharaja Indera Dewa.
11. Nadhar Seri Maharaja Purba
12. Nadhar Seri Muda Setia
13. Nadhar Mahsur Diraja
14. Seri Indera Su Suwara

⁴Lombard, *op.cit.*, hlm. 151.

15. Keurukon Seri Indera Muda
16. Keurukon empat
17. Keurukon enam
18. Bujang tujuh
19. Penghulu Kunci
20. Penghulu Dacing
21. Penghulu Furdhah
22. Bendahara
23. Tandil Kawal
24. Sagi Panglima
25. Sagi Kawal
26. Tandil Dacing
27. Penghulu Khalas
28. Penghulu Cap
29. Keurukon Bauwab
30. Keujrun Kawal
31. Bujang Dalam
32. Tandil Menteri Dagang
33. Lasykar Raja Tun Guna Setia Tandil.⁵

⁵ Di Meulek, *Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda*, (Naskah disimpan di Museum Ali Hasjmy Banda Aceh), hlm. 95. Naskah Di meulek ini masih perlu penelitian lebih lanjut tentang keabsahannya. *Adat Aceh*, hlm. 48-49.

C. Syahbandar

Kedudukan syahbandar dalam struktur pemerintahan kerajaan Aceh adalah sebagai pelaksana kebijakan raja di bidang pelabuhan. Semua kebijakan raja yang menyangkut pelabuhan dilaksanakan oleh lembaga syahbandar. Syahbandar bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya oleh kerajaan. Tugas dan fungsi syahbandar sebagai lembaga adat adalah (1) mengatur pemungutan pajak keluar-masuk kapal atau perahu. (2) Mengatur pelayanan surat izin keluar dan masuk pelabuhan. (3) Mengatur pemungutan cukai barang. (4) Mengatur tentang jaminan masuk pelabuhan. (5) Menjaga keamanan pelabuhan, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan.

Jabatan syahbandar merupakan jabatan yang diangkat oleh raja dan bertanggung jawab kepadanya. Tidak ditentukan berapa lama posisi itu dijabat oleh seorang syahbandar. Raja sewaktu-waktu dapat mencabut dan memberhentikan seorang syahbandar. Biasanya syahbandar diangkat dari kalangan atau keturunan raja juga secara turun-temurun. Hasil dari pengelolaan pelabuhan diserahkan kepada raja, untuk selanjutnya diserahkan ke Baital Mal.

Dalam *Adat Aceh* disebutkan ada empat macam syahbandar, yaitu syahbandar Setia Rama yang setiap hari *meugang* bertugas membawa upeti berupa pakaian untuk raja dan sumbangan bunga untuk kuburan-kuburan leluhur raja, syahbandar Saifal Muluk yang berperan sebagai pelatih pedang sultan dan juga harus menyumbangkan hadiah kepada sultan, syahbandar Muizzal Muluk yang memberikan upeti kepada sultan setiap tanggal 29 Ramadan. Yang terakhir adalah syahbandar Muktabar Khan yang bertugas membuat kereta arakan

selama pesta mandi raja pada hari Rabu terakhir dalam bulan Safar (mandi Safar).⁶

D. Haria Peukan

Terbentuknya hari peukan pada awalnya disebabkan terbatasnya sarana-sarana pasar dalam arti yang sempurna pada tingkat pedesaan, yang mampu menyerap dan menyediakan segala yang dihasilkan dan yang dibutuhkan masyarakat. Pada mulanya hal ini berjalan biasa-biasa saja. Tetapi lama-kelamaan semakin terasa adanya semacam ketidakteraturan antara tugas-tugas tersebut, karena urusan berdagang lebih diutamakan daripada ibadah. Melihat gejala seperti itu maka pemimpin agama dan penguasa pada waktu itu mulai memikirkan untuk mencari jalan keluar. Akhirnya, penguasa merasa perlu untuk menetapkan suatu hari khusus yang digunakan untuk kegiatan dagang selain hari Jumat.⁷

Pada umumnya terdapat dua jenis pasar, yaitu pasar harian biasa dan pasar mingguan. Pasar biasa adalah pasar yang kegiatannya terjadi setiap hari dan terdapat di banyak tempat. Sedangkan pasar mingguan merupakan suatu bentuk pasar yang kegiatan-kegiatannya terjadi sekali atau lebih dalam satu minggu pada tempat dan waktu yang sudah tertentu. Pasar mingguan terbagi dalam dua macam, yaitu *gantoe rayeuk* (pasar mingguan utama) dan *gantoe cut* (pasar mingguan kecil atau

⁶ L. F. Brakel, "Negara dan Kenegarawanan Aceh", dalam Hoessein Djajadiningrat, dkk., *Dari Sini Ia Bersemi*, (Banda Aceh : Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Nasional ke-12 Tahun 1981), hlm. 250.

⁷ Ibrahim Alfian, *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh* (Hasil-hasil Penelitian dengan Metode Grounded Research, Jakarta L: P3ES, 1977), hlm. 177.

lokal). *Gantoe rayeuk* diadakan sekali dalam seminggu. Yang turut ambil bagian tidak hanya pedagang-pedagang lokal yang menetap, tetapi juga sejumlah pedagang yang berdatangan dari luar. Sedangkan *gantoe cut* hanya diramaikan oleh pedagang-pedagang lokal dan pedagang menetap. Perbedaan lain terletak pada segi barang-barang yang diperdagangkan. Pada *gantoe rayeuk*, volume dan variasi barang-barang jauh lebih banyak dibandingkan dengan *gantoe cut*, yang hanya terbatas pada barang-barang produksi lokal saja.

Para pedagang yang turut mengambil bagian dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu pedagang-pedagang lokal yang menetap, pedagang lokal yang datang secara insidental dan pedagang-pedagang yang datang dari luar. Baik pedagang lokal maupun mereka yang datang pada dasarnya tidak terkena pembatasan-pembatasan dalam memasuki pasar. Mereka bersama barangnya bebas memasuki pasar.⁸

Selain para pedagang, adapula sejumlah *muge* (perantara) yang turut ambil bagian. Seperti para pedagang, *muge* ada yang berasal dari daerah yang bersangkutan, dan tidak sedikit pula yang datang dari luar daerah. *Muge-muge* lokal pada umumnya bergerak dalam bidang barang-barang yang dihasilkan penduduk setempat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Sedangkan *muge* luar lebih banyak bergerak dalam jual beli ternak dan ikan.

Barang-barang yang diperdagangkan pada saat *hari peukan* pada umumnya adalah barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, garam, cabe, rempah-rempah, ikan asin, barang-barang pecah belah, dan sebagainya. Para penjual

⁸Manning Nash, *Primitive and Peasant Economic System*, (San Francisco : Chandler Publishing Company, 1966), hlm. 70.

barang-barang itu pada umumnya adalah pedagang laki-laki, sedangkan pedagang barang-barang lainnya, seperti sayur-sayuran, kue, dan semacamnya kebanyakan oleh perempuan.⁹

E. Seuneubok

Seuneubok berasal dari kata *keubok*, maksudnya mengerubungi secara bersama-sama (oleh beberapa orang) di suatu tempat. *Seuneubok* dapat juga diartikan sebagai suatu tempat orang-orang secara bersama-sama melakukan kegiatan pembukaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, sesuai ketentuan adat yang berlaku. El Hakimi menyebutkan bahwa *seuneubok* adalah areal tanah perladangan yang dibuka secara luas (\pm 10 hektar) dengan memakai penggarap yang banyak (lebih dari 10 orang) dan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut dengan *peutua* yang sekaligus sebagai majikan.¹⁰ Dalam hubungan dengan penanaman lada, *seuneubok* diartikan sebagai sebuah kompleks perkebunan lada yang merupakan gabungan dari 10 hingga 20 atau lebih kebun lada. Setiap kebun dikerjakan oleh 5 orang atau lebih. Anggota *seuneubok* disebut *aneuk seuneubok*.¹¹ *Seuneubok* merupakan suatu kawasan yang dibuka bersama atau kumpulan *lampoh* atau ladang pada suatu kawasan tertentu dengan batas wilayah yang tegas, sesuai dengan bentang alam yang dibuka secara bersama oleh beberapa orang

⁹Maria Cristine Szanton, *A Right to Survive*, (University Park and London : The Pennsylvania State University Press, 1971), hlm. 73.

¹⁰T.I. El Hakimi, "Beberapa segi hukum adat tentang tanah pedesaan", (Penelitian Rural Development Center, Syiah Kuala, Banda Aceh, 1981), hlm. 19.

¹¹M. Gade Ismail, "Seuneubok Lada", (disertasi belum diterbitkan, Leiden, 1991), hlm.52.

Lembaga Perdagangan dan Keuangan

dan dipimpin oleh *peutua*. Selanjutnya pola hubungan antara sesama *aneuk seuneubok* dalam hubungan dengan pengelolaan kawasan diatur berdasarkan adat setempat. Setiap petakan yang dimiliki oleh *aneuk seuneubok* disebut dengan ladang (*lheu* atau *lampoh*).

Orang yang menyediakan modal bagi usaha pembukaan *seuneubok* disebut *petua pangkai*. *Peutua pangkai* menyediakan modal bagi usaha penanaman lada di *seunebok*. Modal tersebut meliputi penyediaan bahan pangan dan keperluan lainnya selama proses penanaman lada.¹²

Pembukaan *seuneubok* oleh penduduk atau mukim setempat merupakan perwujudan penggunaan hak-hak istimewa perseorangan maupun kolektif yang dimiliki setiap orang *gampong* atau *mukim*, sesuai dengan adat. Hak-hak tersebut adalah *hak dong tanoh* atau *hak dong cah rimba*. Keberadaan sebuah lembaga *seuneubok*, sebagaimana lembaga adat otonom lainnya dalam struktur pemerintahan adat tidak selalu terikat dengan suatu *gampong* atau *mukim* tertentu. Keterikatan dengan sebuah *gampong* atau *mukim* tertentu sangat tergantung pada letak dari wilayah suatu *seuneubok*. Apabila letaknya dalam wilayah sebuah *gampong*, maka lembaga *seuneubok* merupakan bagian dari wilayah *gampong* yang bersangkutan. Oleh karena itu, semua persoalan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan sengketa dalam kawasan *seuneubok* tersebut tunduk di bawah ketentuan *gampong* yang bersangkutan.

Dalam batas suatu *mukim*, *seuneubok* tersebut menjadi wilayah yang langsung tunduk pada ketentuan *mukim* bersangkutan. Selanjutnya, apabila pihak yang tidak puas dengan penyelesaian oleh

¹²Ismail, *op.cit.*, hlm. 72.

lembaga *seuneubok* maka ia dapat mengajukan masalahnya kepada pengadilan *gampong* di bawah pimpinan *geuchik gampong*.

Setidaknya ada tiga peran lembaga *seuneubok*, yaitu peran ekonomi, penegakan adat dan mendamaikan pihak yang bersengketa. Peran ekonomi adalah memajukan kesejahteraan anggotanya melalui pengaturan pemanfaatan lahan untuk ladang atau *lampoh* serta pengaturan tatacara meladang atau *melampoh*. Peran penegakan adat terlihat terutama dalam hubungannya untuk mengadakan sejenis pengadilan adat terhadap perkara-perkara yang melanggar ketentuan adat di *seuneubok* dan mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam wilayah kewenangannya.

BAB V

BANDA ACEH DALAM JARINGAN PERDAGANGAN ANTARBANGSA

A. Banda Aceh di antara Pertarungan Hegemoni Perdagangan Bangsa Asing

Banda Aceh yang terletak di ujung pulau Sumatera merupakan bagian yang paling utara dan paling barat kepulauan Indonesia. Di sebelah barat terbentang lautan (Hindia) Indonesia, sedangkan di sebelah utara dan timur terdapat selat Malaka. Semenjak zaman kuno selat Malaka merupakan jalur perniagaan yang ramai, banyak dilalui kapal dagang dari berbagai negara. Tempat-tempat di sepanjang selat Malaka silih berganti menempati kedudukan sebagai pelabuhan tempat mengambil perbekalan bagi kapal-kapal yang melewati jalur itu. Selama beberapa abad Malaka terkenal sebagai pusat perdagangan tiga jurusan antara negeri India, Cina dan negeri-negeri Asia Tenggara. Pelabuhannya banyak disinggahi kapal dari berbagai negeri yang membawa barang-barang dagangan dari India, Asia Barat, Eropa, Cina dan negeri-negeri di Asia Tenggara. Selain itu, Malaka pada waktu itu (abad XV) juga berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam yang disebarkan oleh orang-orang Islam, baik yang berasal dari negeri-negeri Asia Barat maupun Gujarat (India).

Melihat posisi yang demikian, Aceh dapat disebut sebagai pintu gerbang sebelah barat kepulauan Nusantara. Karena letaknya yang strategis itu, Aceh banyak didatangi oleh berbagai bangsa asing dengan berbagai macam kepentingan, seperti kepentingan perdagangan, diplomasi, dan sebagainya. Kedatangan berbagai bangsa asing itu merupakan hal yang penting bagi perkembangan Aceh sendiri, baik secara politis, kultural, maupun ekonomis. Meskipun demikian, di

Perdagangan Banda Aceh dalam Jaringan Antarbangsa

antara para pendatang asing itu terdapat pula pendatang yang melakukan tindakan-tindakan yang didorong oleh kolonialisme dan imperialisme, baik di Aceh sendiri maupun di kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, timbullah sikap antagonis dan reaksi dari berbagai pihak yang dirugikan, misalnya pihak Aceh, dalam bentuk perlawanan-perlawanan terhadap bangsa asing yang melakukan tindakan seperti di atas. Perlawanan-perlawanan itu terutama dilakukan hanya demi mempertahankan eksistensi pihak yang dirugikan oleh kolonialis dan imperialis.

Bangsa asing pertama, khususnya Barat, yang melakukan kontak dan kemudian berkonflik dengan Aceh adalah bangsa Portugis. Pada tahun 1498 M, bangsa Portugis telah tiba di Calicut di bawah pimpinan Vasco da Gama. Sebelum kejadian itu, telah berlangsung serangkaian usaha dari bangsa Portugal mencari sendiri jalan ke Timur. Pada abad ke-10 perdagangan di Eropa dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam yang berpusat di Byzantium dan kota-kota lain seperti Venetia, Florensa, Genoa dan Antwerpen menjadi pusat perdagangan. Setelah Perang Salib berakhir perdagangan berpusat di wilayah daratan Laut Tengah. Meskipun demikian peranan pedagang-pedagang Islam masih berpengaruh juga karena kunci perhubungan dagang Barat dan Timur masih dikuasai oleh orang Muslim. Terlebih dengan dikuasainya Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II pada tahun 1453 M, pedagang-pedagang Islam semakin memegang peranan penting. Perdagangan antara Timur dan Barat menjadi terganggu setelah timbul ide-ide baru untuk mencari jalan sendiri ke Timur, terutama ide tersebut sangat berkembang pada orang-orang Spanyol dan Portugal.¹

¹ Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520-1675*, (Medan : Manora, 1972), hlm. 24.

Orang Spanyol dan Portugal yang masih meneruskan Perang Salib untuk mengusir orang-orang Islam mendapat kemenangan-kemenangan besar. Orang Portugis pada abad ke-14 berhasil mengusir orang-orang Islam ke seberang Selat Gibraltar dan bahkan menguasai Ceuta di seberang selat tersebut di Afrika. Kemenangan-kemenangan yang diperolehnya itu merupakan dorongan besar bagi bangsa Portugis untuk mengadakan perlawatan ke berbagai tempat di dunia. Pada mulanya tujuan pokok dari perlawatan orang-orang Portugis masih tetap bersifat agama, mengejar dan memerangi orang Islam di mana saja mereka jumpai.² Pada pertengahan abad ke-15, misi-misi agama sebelumnya bertambah dengan tujuan-tujuan bersifat ekonomi dan perhitungan-perhitungan komersial.

Penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan di Eropa, seperti kepandaian membuat kompas, kemajuan dalam ilmu bumi, terutama pengetahuan tentang perpetaan, sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan pelayaran orang-orang Portugis dan Spanyol. Pada permulaan abad ke-15 itu pula Portugal diperintah oleh seorang raja yang menaruh perhatian terhadap pelayaran. Jasanya dalam bidang pelayaran menyebabkan ia diberi gelar *Henry Navigator*. Setelah ia menaklukkan Ceuta pada tahun 1415 M, Henry mengatur persiapan yang sistematis untuk penjelajahan bangsa Portugis ke beberapa tempat di dunia. Berturut-turut mereka menjumpai Madeira pada tahun 1419 M, kepulauan Azores 1432 M, Teluk Verdi 1456 M, dan Bartolamiuz Diaz menemukan ujung selatan Afrika pada tahun 1487 M. Pada tahun 1498 M sampailah Vasco da Gama di Calicut pantai barat India.

²Gurger, D.H. dan Prajudi, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, (Jakarta : Pradnjapramita, 1962), 40.

Peristiwa terakhir itu sangat penting dalam sejarah dunia sehingga dengan penemuan Vasca da Gama itu dimulai satu kurun sejarah yang dinamakan oleh Pannikar *da Gama Epoch*³

Orang Portugis yang pertama-tama menginjakkan kakinya di pulau Sumatera, khususnya di Aceh, ialah Diogo Lopes de Sequeira, yang mengemban perintah Raja Dom Manuel dari Portugal untuk menemukan pulau Madagaskar dan Malaka. Sebelum sampai di Malaka dia berlabuh di Pedir dan Pasai (Aceh) pada bulan September 1509, yang merupakan kerajaan terpenting di pulau Sumatera dan mempunyai banyak *vasal*. Di pelabuhan itu ia bertemu dengan lima buah *junk* Benggali dan Pegu. Orang-orang Portugis diterima baik oleh raja yang menunjukkan persahabatan dan perdamaian dengan Portugal. Raja Pedir juga menghadiahkan lada, damar dan barang-barang dagangan tetapi tidak diterima oleh Lopes de Sequeira karena takut akan datang terlambat ke tempat tujuannya, yaitu Malaka.⁴

Ketika orang Portugis singgah di Pasai, sedang terjadi sengketa saudara, sultan Pasai, Zainal Abidin, telah ditumbangkan oleh saudaranya yang mengaku lebih berhak menjadi sultan. Sultan Zainal Abidin lari ke Malaka dan menjadi tamu yang dihormati di sana. Selama di Malaka ia menyaksikan berbagai kekejaman Portugis sehingga sangat tidak menyenangkan. Tokoh-tokoh yang sudah membantu Portugis dan mengkhianati Sultan Malaka tidak mendapat balas jasa sebagaimana mestinya. Ada di antara mereka yang dibunuh dengan kejam. Sultan

³ K.M. Pannikar, *Asia and Western Dominance*, (London Allen & Unwin Ltd., , 1955), hlm. 12.

⁴ Dharmono Hardjowijono, "Pasai Tahun 1509-1524" dalam Susanto Zuhdi (peny.), *Pasai Kota Pelabuhan Jalur Sutra*, (Jakarta : Proyek IDSN, 1997), hlm. 156.

Zainal Abidin lalu mengambil keputusan untuk angkat kaki dari Malaka. Itu terjadi sehari sebelum Afonso de Albuquerque berangkat pulang ke India (Januari 1512), dengan suatu rencana untuk singgah di Pasai dan melantik Zainal Abidin menjadi sultan kembali di Pasai. Atas bantuan Portugis, raja yang diturunkan itu berhasil naik tahta kembali. Sebagai tanda balas jasa dari perbuatan itu, Portugis mendapat hak mendirikan kantor dagang yang dilengkapi 100 orang tentaranya dengan komandan Antonio de Miranda de Azevedo di Pasai.⁵

Selain sebagai pusat pengembangan dan studi Islam, Pasai juga merupakan pusat kegiatan politik dan perdagangan. Kedudukan Pasai pada jalur lalu lintas perdagangan internasional yang menghubungkan India dan Cina adalah faktor penting bagi perkembangan Pasai sebagai salah satu pusat politik dan perdagangan di kawasan selat Malaka.

Selain Pasai, Pedir (Pidie) pada waktu itu juga merupakan kerajaan yang berkembang, terutama dari hasil lada, sehingga wajar apabila kerajaan itu melayani kapal-kapal asing, sebagaimana halnya Portugis yang singgah di Pedir. Sebelum meninggalkan Pedir, Diogo Lopes de Sequeira mendirikan sebuah *padrao* (*padrao* merupakan gagasan D. Joao II sebagai pengumuman kepada dunia atas penemuan dan pemilikan daerah-daerah baru oleh Portugais). Adapun karakteristik *padroa* adalah sebagai berikut : sebuah monolite dengan tinggi 21/2 meter, berat $\pm \frac{1}{2}$ ton, mempunyai *kapiteel* (bagian atas dari sebuah tiang) yang dinahkodai oleh sebuah salib. Lambang kerajaan Portugal dipahatkan pada salah satu sisi *kapiteel*, juga dipahatkan dua buah tulisan ; satu dalam bahasa Portugis dan yang lain dalam bahasa latin, menyebutkan nama raja Portugal yang sedang memerintah, tahun

⁵ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, I, (Medan : Waspada Medan, 1980), hlm. 163.

penemuan dan pemimpin yang mendirikan⁶, untuk menandai perjalanannya. Dari Pedir Diogo Lopes de Sequeira menuju Pasai, yang terletak sekitar 20 *legua* (1 *legua* 3 mil) dari Pedir. Di tempat itu orang-orang Portugis diterima dengan baik dan juga diberi izin mendirikan *padrao*.⁷

Dari Pasai Diogo Lopes de Sequeira menuju Malaka dan tiba pada tanggal 16 September 1509. Pada mulanya Diogo Lopes de Sequeira diterima dengan baik oleh Sultan Mahmud di Malaka tetapi atas bujukan orang-orang Gujarat dan Jawa akhirnya Sultan Mahmud berbalik memusuhi orang-orang Portugis dengan menangkap dan menawan orang Portugis yang berada di daratan, sedangkan Diogo Lopes de Sequeira berhasil meloloskan diri dan meninggalkan Malaka.⁸

Pada waktu itu yang menjabat sebagai wakil raja Portugal di Asia adalah Afonso de Albuquerque yang berpusat di Cochin. Setelah mendengar peristiwa Diogo Lopes de Sequeira di Malaka seperti itu, Afonso de Albuquerque ingin membalas dendam dan kebetulan pada waktu itu Raja Dom Manuel mengirim ekspedisi II dengan tujuan Malaka (sebelumnya Raja Dom Manuel belum mengetahui tentang peristiwa di Malaka). Setelah Afonso de Albuquerque berhasil menguasai Goa dan Ormuz, dia berangkat dari Cochin pada bulan Mei 1511 menuju Malaka dengan kekuatan 18 buah kapal dan 800 orang

⁶ Dharmono Hardjowidjono, "Pasai Tahun 1509-1524" dalam Susanto Zuhdi, (peny.), *Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra*, (Jakarta : Depdikbud, 1997), hlm. 156.

⁷ *Ibid.*, hlm. 156.

⁸ Dharmono Hardjowidjono, "Kisah Runtuhnya Malaka menurut Sumber-sumber Portugis", *Humaniora* (Buletin Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada), No. 1, (1989), hlm. 467-480.

serdadu Portugis ditambah 400 orang Malabar. Dalam perjalanannya itu Afonso de Albuquerque singgah di Pedir. Raja Pedir yang ketakutan dengan kedatangan gubernur jenderal Portugis menyerahkan kesepuluh orang Portugis dan anak buah Ruide Araujo yang berhasil melarikan diri dari Malaka. Mereka memberi informasi tentang revolusi yang berlangsung di Malaka. Sultan Malaka memerintahkan untuk memenggal kepala bendahara. Hal yang sama juga menanti nasib syahbandar Gujarat tetapi dia berhasil melarikan diri ke istana raja Pasai. Bendahara dan syahbandar adalah pelaku utama dalam pengkhianatan yang dilakukan terhadap Diogo Lopes de Sequeira dan informasi itu menggembirakan hati sang jenderal Portugis. Armada itu kemudian meninggalkan Pedir menuju Pasai.⁹

Setelah tiba di Pasai, Afonso de Albuquerque memerintahkan kepada Joao Viegas, pemimpin pelarian dari Malaka, untuk mengunjungi raja dan mengatakan kepadanya bahwa Afonso de Albuquerque mengetahui bahwa di negeri Pasai tinggal orang yang melarikan diri dari Malaka, yang dahulu membantu membunuh orang-orang Portugis. Ia memerintahkan yang bersangkutan untuk minta maaf kepada Afonso de Albuquerque dan menyerahkan diri. Raja Pasai menjawab bahwa hal itu memang benar, yaitu bahwa orang itu pernah ada tetapi sudah tidak tahu lagi kabarnya. Raja Pasai berjanji akan mencarinya dan apabila kedapatan segera diserahkan kepada Afonso de Albuquerque. Setelah mengirim pesan itu kepada Afonso de Albuquerque, dia pun menasihati orang yang dicari itu supaya syahbandar Gujarat di Malaka yang melarikan diri langsung pergi ke Malaka untuk memberi tahu Sultan Malaka akan kedatangan Afonso de Albuquerque. Segera Afonso de Albuquerque berangkat menuju Malaka

⁹ Hardjowidjono, *op.cit.*, hlm. 157.

Perdagangan Banda Aceh dalam Jaringan Antarbangsa

karena sudah ketahuan bahwa ada sebuah kapal Melayu sudah duluan berangkat menuju Malaka untuk memberitahukan bahwa Portugis sudah berada di Pasai. Dengan terburu-buru Afonso de Albuquerque mengejar kapal Melayu itu. Kapal itu dapat diburunya, dirampok dan nahkondanya dibunuh. Sebenarnya Afonso de Albuquerque sudah tahu apa yang dilakukan oleh raja Pasai tetapi karena ingin tetap bersahabat dengan raja dia pun meninggalkan Pasai.¹⁰

Dalam perjalanan dari Pasai menuju Malaka, rombongan Afonso de Albuquerque masih harus menghadapi dua kendala. Dalam pertempuran yang pertama ternyata yang bertindak sebagai kapten kapal lawan adalah Naodabeguea, yaitu pelarian tadi, syahbandar Gujarat. Dalam pertempuran itu ia menderita luka-luka. Adapun kendala kedua yang harus dihadapi Afonso de Albuquerque hanya merupakan kesalahpahaman. Kapal yang harus dihadapi Afonso de Albuquerque ternyata membawa raja Pasai yang digulingkan yang meminta bantuan untuk mengembalikannya di atas tahta kerajaannya. Setelah tahu bahwa kapal itu tidak akan menyerangnya, Afonso de Albuquerque pun menyetujui uluran tangan raja yang terguling untuk mengadakan perjanjian perdamaian dan raja terguling itu pun dibawa dalam pelayarannya ke Malaka.¹¹

Didorong oleh semangat monopoli, Portugis tidak membiarkan daerah-daerah di Aceh dapat berdiri sendiri. Portugis berusaha dengan tipu daya untuk menguasai daerah itu dan mereka berhasil mengadakan hubungan dagang dengan daerah-daerah di Aceh dan sekaligus

¹⁰ Antonio Baião, *Comentarios do Grande Afonso de Albuquerque*, parte I e II, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, hlm. 52-53.

¹¹ Damiao de Gois, *Cronocai dos Felicissimo Rei D-Manuel*, parte III, Coimbra, Seta Universtatis Conimbrigensis, 1954), hlm. 73.

mendapat kesempatan mendirikan kantor dagang. Kantor itu diperkuat dengan kekuatan senjata sehingga secara diam-diam dapat membangun benteng di beberapa pelabuhan di Aceh. Tampaknya orang Portugis berhasil menanamkan pengaruhnya karena kekuatan daerah-daerah di pantai utara Sumatera ketika permulaan Portugis datang masih samar-samar. Hal itu dibuktikan, pada sekitar bulan Juni 1511, Afonso de Albuquerque telah memimpin armada laut yang besar, berjumlah 19 kapal perang dengan penuh tentara dan alat-alat perang yang modern ketika itu.

Orang Portugis dengan sendirinya mendapat hak monopoli hasil bumi di Pasai. Praktek-praktek dengan kekuatan senjata dan pembangunan benteng di Pasai mengesankan bahwa Pasai sudah di bawah kekuasaan Portugis. Pada tahun 1520 M, Sultan Zainal Abidin, mengirim surat kepada raja Portugis mengenai kesediaannya memberi keuntungan yang lebih besar untuk Portugis apabila dirinya didukung menjadi sultan kembali.

Kecenderungan Portugis yang hanya mencari keuntungan kembali mendukung Zainal Abidin menjadi sultan dan menjatuhkan lawannya. Akan tetapi pada tahun 1521 M, orang Portugis kembali mengkhianati jaminannya atas Zainal Abidin.¹² Sasaran Portugis selanjutnya adalah Pedir. Portugis berhasil melemahkan kekuatan penguasa di sana dengan politik pecah belah.

Pada awal Desember 1511, Afonso de Albuquerque meninggalkan Malaka dengan menumpang kapal *Flor de La Mar* yang juga membawa anak-anak, laki-laki dan perempuan serta benda-benda berharga. Dalam perjalanannya itu kapal *Flor de Mar* kandas di pantai

¹² *Ibid.* hlm. 164.

Pedir tetapi Afonso de Albuquerque berhasil diselamatkan dan tiba di pelabuhan Cochin pada awal bulan Februari 1512.¹³

Ada sedikit perbedaan pendapat tentang hal ini. Domiao de Gois menyebutkan bahwa Afonso de Albuquerque berangkat dari Cochin dalam bulan Januari 1513 dengan beberapa buah kapal untuk menjabat sebagai penguasa di Malaka. Dalam perjalanannya itu ia singgah di Pasai. Ia mendapatkan raja sebagai sahabat Portugis sedang berperang melawan salah satu *vasal* yang memberontak terhadapnya. Afonso de Albuquerque pun membantu raja Pasai dan akhirnya para pemberontak dapat dikalahkan dan banyak dari mereka yang meninggal. Setelah itu, Afonso de Albuquerque meninggalkan Pasai menuju Malaka dan tiba di sana dalam bulan Juli 1513.¹⁴

Menurut Luiz, setelah Afonso de Albuquerque tiba di Malaka, pengalaman berikutnya mengantarnya ke pulau Sumatera, memasuki pelabuhan Pasai dengan tujuan mengusahakan pengambilan tahta kerajaan kepada raja yang sah, yaitu Orpacam sesuai dengan tugas yang diembannya dari gubernur jenderal. Afonso de Albuquerque pun berlabuh di pelabuhan Pasai, memberitahukan maksud kedatangannya kepada para penguasa kerajaan, tetapi ternyata mereka itu merasa cemas dengan kedatangan raja yang sah.¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁴ Damiao de Gois, *Cronocai dos Felicissimo Rei D. Manuel*, Parte III, (Coimbra, Seta Univertatis Conimbrigensis, 1954), hlm. 273. Dalam Dharmono Hardjowidjono, *Ibid.*,

¹⁵ Frei Francisco de S. Luiz, *Portuguezes en Africa, Asia, America, e Oceania*, Vol. I. Lisboa. Typographia de Borges, 1949, hlm. 193, dalam Hardjowidjono, *op.cit.*, hlm. 159.

Perdagangan Banda Aceh dalam Jaringan Antarbangsa

Afonso de Albuquerque mengetahui bahwa raja dikelilingi benteng yang sangat kuat berbentuk segi empat dan dipersenjatai dengan meriam dalam jumlah besar. Namun demikian, hal itu tidak menjadi penghalang bagi Afonso de Albuquerque untuk memberi ultimatum kepada raja agar menyerahkan kerajaannya dengan damai atau pihaknya akan menyerang raja. Dijawab oleh raja bahwa kerajaan adalah miliknya dan alangkah hinanya apabila bersedia menjadi *vasal* raja Portugal. Mengetahui sifat keras raja, pihak Portugis memutuskan untuk melancarkan serangan.

Sementara itu, datang pula raja Aru di Pasai disertai dengan angkatan perang yang besar dan juga mengumumkan perang kepada raja Pasai karena raja yang sah adalah orang tuanya. Mengetahui akan kedatangan tentara Aru yang tidak terduga itu, Afonso de Albuquerque kemudian meminta kepada seorang berkebangsaan Pasai untuk mengatakan kepada raja Aru bahwa dia datang ke situ juga dengan maksud yang sama, yaitu mengembalikan tahta kerajaan Pasai kepada raja yang sah dan mengusir raja absolute yang telah menjatuhkannya. Karena mengetahui bahwa dia adalah sahabat raja Portugal, maka ia meminta apabila dia membuka serangan mengizinkannya untuk melakukannya juga. Karena tentaranya mengenakan pakaian yang sama dengan tentara raja maka Afonso de Albuquerque meminta supaya pada hari penyerangan anak buahnya diperintahkan untuk mengenakan ikat kepala berwarna hijau untuk membedakan dengan musuh. Raja Aru pun menyetujuinya dan perang pun berkobar. Dalam pertempuran itu pihak Pasai menderita kekalahan dengan lebih dari 3000 orang tewas, sedangkan pihak Portugis hanya empat orang yang meninggal tetapi tidak sedikit yang menderita luka-luka. Kemudian raja Aru menemui Afonso de Albuquerque untuk menunjukkan kegembiraannya dengan kata-kata. Dikatakannya bahwa hubungan antara Aru dengan Portugal

akan lebih dipererat lagi. Setelah yakin bahwa sang diktator telah tewas dalam pertempuran dengan sendirinya tidak ada kendala untuk mengembalikan tahta kerajaan kepada raja yang sah, maka Afonso de Albuquerque beserta anak buahnya pergi menuju ke armadanya. Adapun raja Pasai yang telah dikembalikan di atas tahtanya menjadi *vasal* Portugal.¹⁶

Dalam *Dicionario* disebutkan bahwa pada tahun 1520 M Afonso de Albuquerque menaklukkan raja Pasai yang memberontak terhadap raja Portugal. Dengan bantuan raja Aru didirikan sebuah benteng dan sebuah kantor dagang untuk urusan barang-barang dagangan negeri itu. Sebagai komandan pertama benteng itu adalah Antonio Miranda de Azevedo, yang pada bulan Mei 1522 digantikan oleh Andre Henriques. Adapun sebagai *alcaidemor* diangkat Antonio Barreto dan sebagai manajer ditetapkan Pero Silveira. Setelah ditambah dengan pegawai dan serdadu, jumlahnya mencapai 100 orang.

Bagian yang lebih ke arah barat di pulau Sumatera terdapat beberapa kerajaan Islam yang mengakui supremasi kerajaan Pedir, termasuk Aceh dan Daya. Tetapi kemudian Aceh yang menjadi superior pada tahun 1523 M.¹⁷ Ambisi sultan Aceh untuk menyatukan seluruh pulau Sumatera yang dimulainya dengan menguasai bagian timur laut pulau itu dihambat oleh Portugis dengan penguasaannya atas Malaka. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan yang terletak di bagian timur laut pulau Sumatera terancam, apalagi setelah gubernur memberontak

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 160.

¹⁷ Manuel de Faria e Sousa, *Asia Portuguesa, Vol I* (Terjemahan Isabel Ferreira do Amaral Pereire de Matos e Maria Vitoria Garcia Santos Ferreira), Porto, Livraria cin , Ilizacao, 1945, hlm. 90. Dalam Hardjowidjono, *op.cit.*, hlm. 160.

melawan raja Pasai. Raja Pedir mencari perlindungan bersama-sama dengan kemenakannya, penguasa dari Jawa, ke benteng Portugis tetapi ternyata kedudukan benteng Portugis terancam karena kekurangan orang, senjata dan bahan makanan.

Setelah mendapatkan informasi mengenai situasi benteng Portugis di Pasai, Gubernur Duaerte de Meneses mengirim sebuah kapal dengan persediaan makanan dan minuman di bawah komando Lopo de Azevedo, yang akan menggantikan kedudukan Andre Hendiques. Kapten yang baru itu tiba di Pasai pada bulan Juni 1523. Sultan Aceh bergerak di darat dan laut dengan kekuatan yang besar dan menghasilkan kemengangan yang satu disusul kemenangan yang lain sampai masuk ke negeri Pedir. Dalam pertempuran yang menyusul kemudian, 35 orang Portugis meninggal, yang lain melarikan diri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan benteng mereka. Dari Pedir orang-orang Aceh menuju ke kerajaan Pasai, dan mereka menaklukkan negeri itu dan menguasainya. Meskipun pada mulanya orang-orang Portugis berusaha mempertahankan benteng mereka namun akhirnya mereka harus meninggalkannya. Pasai kemudian jatuh ke tangan Aceh.¹⁸

Orang-orang Portugis melarikan diri dari Pasai, setiba mereka di pantai sudah menunggu 300 buah *lanchara*¹⁹ yang membawa bahan makanan yang dikirim oleh raja Aru, sahabat orang-orang Portugis,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

¹⁹ Kapal-kapal yang digunakan oleh Aceh. Kapal ini lebih tinggi daripada galey dan ada yang memiliki dua baris dayung, sama panjangnya dengan galey.

melalui lautan. Bersama mereka ikut pula raja Pasai yang terguling bersama ibunya, raja Pedir dan raja Daya menuju ke Aru.²⁰

Telah disinggung di atas bahwa Portugis dapat merebut Malaka pada tahun 1511 M dari Sultan Mahmud, yang menjadi sultan Malaka pada waktu itu. Tetapi sebelumnya mereka telah berusaha untuk mengadakan hubungan dengan kota tersebut. Untuk itu Gubernur Portugis yang berkedudukan di Goa (India) mengirim Lopes de Sequeira bersama dengan empat buah kapal ke Malaka. Ekspedisi itu berangkat dari Cochin pada permulaan bulan September 1509. Sebelum sampai di Malaka Lopes de Sequeira singgah di Pedir dan Pasai (Aceh), dua buah pelabuhan yang terletak di pantai utara Sumatera yang terkenal dengan ekspor ladanya. Di kedua tempat itu Lopes de Sequeira diberi izin untuk berdagang. Kemudian ia melanjutkan pelayaran ke Malaka. Setibanya di Malaka rombongan itu diterima dengan baik oleh sultan Mahmud.²¹

Suatu perjanjian diadakan antara Sultan Mahmud dengan Lopes de Sequeira dan orang Portugis diizinkan untuk mendirikan kantor dagangnya di Malaka. Tetapi ternyata kemudian hubungan itu menjadi tidak baik. Terjadi konflik antara pihak Malaka dengan pihak Portugis dan sebagian besar tentara Portugis berhasil ditawan tetapi Lopes de Sequeira berhasil melarikan diri dengan kapalnya dan kembali ke India.²²

²⁰ Hardjowidjono, *op.cit.*, hlm. 161.

²¹ P.A. Tiele, "De Europeers in de Maleische Archipel" *BKI* 36 (1877), hlm. 13-14.

²² C. Wessels SJ, "Portugeezen en Spanjaarden in den Indischen Archipel tot aan de komst van de O.I Compagnie 1515-1606", dalam F.W.

Kecewa dan dendam atas peristiwa tersebut, pada tahun 1511 M pimpinan Portugis di India mengirim suatu armada di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque untuk menyerang Malaka.

Setibanya di Malaka, Afonso de Albuquerque mengadakan kontak dengan Sultan Mahmud melalui surat yang intinya menuntut pelepasan para tawanan Portugis. Dalam hal ini Sultan Mahmud selalu mengulur-ulur waktu sehingga Afonso de Albuquerque habis kesabarannya dan melancarkan serangan terhadap Malaka. Akhirnya runtuhlah Malaka dan Sultan Mahmud melarikan diri meninggalkan Malaka.²³

Sultan Mahmud pindah dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk menghindari kejaran Portugis maupun untuk mengadakan penyerangan melawan orang Portugis. Pada mulanya Sultan Mahmud dan anaknya, Alauddin, pindah ke Pahang dan kemudian ke Bintan (1513 M).²⁴ Dari tempat itu Sultan Mahmud diserang oleh orang Portugis, lalu pindah ke Johor Lama dan kemudian ke Kampar. Setelah Sultan Mahmud meninggal, ia digantikan oleh anaknya, Alauddin Riayat Syah. Ia pindah dari Kampar ke Johor. Pada tahun 1536 M, Estavao de Gama memimpin penyerangan terhadap benteng Alauddin. Alauddin terus dikejar oleh Portugis dan akhirnya ia mengajukan permintaan damai dengan Portugis. Alauddin mendirikan ibukota baru di Muar tidak jauh dari Malaka pada tahun 1536 M.

Stapel (ed) *Geschiedenis van Nedelandsch Indie*, deel II, (Amsterdam : Joost van de Vondel, 1938), hlm. 153.

²³ Hardjowidjono, *op.cit.*, hlm. 158.

²⁴B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Part two, (The Hague : W. van Hoeve, 1955), hlm. 246.

Perdagangan Banda Aceh dalam Jaringan Antarbangsa

Afonso de Albuquerque, yang oleh raja Portugal diangkat sendiri menjadi “Raja Muda”, India, berhasil merebut Bandar Malaka pada tahun 1511 M.²⁵ Kedatangan mereka tidak saja mengakibatkan kemerdekaan rakyat setempat menjadi hilang tetapi juga kebangisan, kekuasaan dan senjata adalah alat yang mereka lancarkan terhadap penduduk. Keleluasaan berdagang menjadi punah dan memang itu yang menjadi salah satu tujuan orang Portugis. Keadaan itu mengakibatkan penduduk Malaka menjadi tidak aman. Orang-orang Nusantara yang tadinya berdagang di Malaka merasa tidak tentram dan akhirnya pindah mencari tempat lain, seperti Sumatera Utara, Pasai, Pedir dan Aceh. Namun, orang Portugis itu juga mencari barang dagangan yang ada di daerah luar Malaka, yaitu ke pantai-pantai di kepulauan Nusantara hingga ke Aceh.

Beralihnya pedagang-pedagang Muslim ke Aceh menyebabkan Aceh menjadi ramai dan mulai berkembang sebagai tempat berdagang. Sebelumnya, atau pada saat orang-orang Portugis pertama muncul di perairan sekitar selat Malaka, Aceh masih merupakan sebuah kerajaan kecil yang tunduk kepada kerajaan tetangganya, Pedir. Para saudagar Islam menggunakan Aceh sebagai pengganti Malaka untuk tempat berdagang dan tempat menyebarkan agama Islam. Hal itu tidak disia-siakan oleh sultan Aceh (yang pada waktu itu bernama Sultan Ali Mughayat Syah) yang memanfaatkan kesempatan untuk membina kerajaan supaya benar-benar dapat menjadi pusat perdagangan sebagai pengganti Malaka.²⁶

²⁵ Said, *op. cit.*, hlm. 159-160.

²⁶ Zakaria Ahmad, dkk., *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta : Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek ISDN, 1982/1983), hlm. 7.

Setelah menguasai Malaka, pihak Portugis selanjutnya berusaha menguasai lalu lintas perdagangan di kawasan selat Malaka. Tujuan mereka tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga bersifat religius, yaitu menyebarkan agama kristen dan meneruskan memerangi orang-orang Islam sebagai kelanjutan Perang Salib. Oleh karena itu, selat Malaka menjadi tidak aman lagi bagi pedagang-pedagang Muslim, yang akhirnya mencari tempat-tempat lain di sekitar itu, seperti Aceh, Pedir (Pidie) dan Pasai. Namun ternyata tempat-tempat tersebut juga menjadi incaran pihak Portugis. Portugis tidak menginginkan daerah-daerah di sekitar selat Malaka berkembang menjadi saingan Malaka yang sudah mereka kuasai.

Pihak Portugis di Malaka mengirim armadanya ke Pedir dan Pasai. Sesampai di kedua tempat itu pihak Portugis belum menampakkan keagresifannya, karena mereka mendapat sambutan baik dari penguasa Pedir dan Pasai. Mereka menerima hadiah-hadiah sebagai tanda persahabatan dengan kedua kerajaan itu.²⁷ Khusus di Pedir pihak Portugis berhasil mendapatkan izin untuk mendirikan sebuah kantor dagang. Kantor itu oleh Portugis diperkuat dengan mendirikan sebuah benteng di sekelilingnya.

Semenjak Sultan Ali Mughayatsyah hingga Sultan Iskandar Muda terjadi peperangan antara pihak Aceh dengan Portugis hingga perang besar 1629 M. Akibat kekalahan dalam perang pada tahun 1629 M, armada laut Aceh menjadi lemah. Dengan sendirinya pengontrolan atas daerah-daerah takluknya seperti di kota-kota pelabuhan pantai barat Sumatera, daerah Aceh menjalankan sistem monopoli perniagaan lada, emas, dan hasil bumi lainnya juga menjadi lemah. Begitu pula atas

²⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

kerajaan-kerajaan di Semenanjung Tanah Melayu. Kerajaan Aceh menjadi kurang berpengaruh, kecuali dalam kerajaan Perak. Di sana Aceh masih dapat menguasai perdagangan timah. Kekalahan yang dialami Aceh pada peperangan 1629 M merupakan suatu pukulan berat bagi Aceh, seperti yang disebutkan oleh Bernard H. M. Vlekke bahwa kekalahan armada laut Aceh dalam peperangan dengan pihak Portugis dan sekutu-sekutunya di Malaka pada tahun 1629 M merupakan titik balik atau perubahan kearah kemunduran dalam sejarah Aceh.²⁸ Sementara itu, berangsur-angsur kegiatan kerajaan Aceh di laut mulai berkurang, sedangkan sebuah kekuatan baru, yaitu kompeni Belanda, mulai tampak keaktifannya, terutama keaktifan dalam menjalin hubungan dengan daerah-daerah takluk Aceh yang jauh dari pengawasan Aceh seperti Johor.

Akibat lebih lanjut setelah kekalahan dalam perang 1629 M itu angkatan laut kerajaan dengan armada yang besar dan tangguh yang dipimpin oleh laksamana perkasa berangsur-angsur menghilang dalam sejarah. Hal sama juga dialami Portugis di Malaka yang semakin kehilangan ketangguhannya akibat kerugian besar dalam peperangan yang lama, sangat mahal dan melelahkan, sehingga Portugis terpuruk di segala sektor. Akhirnya, Portugis bangkrut dan dengan mudah dapat dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1641M.

Istana kerajaan banyak memperoleh penghasilan dari perdagangan di ibukota, yang tetap menjadi pelabuhan utama bagi pelayaran dari berbagai negeri. Setiap tahun sekitar dua belas kapal membawa candu dan kain dari pantai Coromandel untuk ditukarkan dengan pinang dan lada, yang tumbuh di pantai utara Aceh, emas dan

²⁸ Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara A History of Indonesia*, ('s-Gravenhage : N.V. Uitverij W. Hoeve, 1959), hlm. 122.

kapur barus di pantai barat, dan timah yang diimpor dari Semenanjung Malaya. Perdagangan itu semakin lama semakin dikuasai oleh pedagang Inggris yang bermarkas di India, sehingga mendorong Perusahaan India Timur Inggris untuk mempertimbangkan Aceh sebagai tempat yang mungkin dapat dijadikan pusat pengumpulan hasil bumi Nusantara untuk ditukarkan dengan teh Cina, dan tempat memperbaiki armada dagang India selama musim angin Timur Laut. Namun, orang Aceh tidak pernah curiga terhadap pos militer asing di wilayah mereka. Serangkaian pendekatan yang dilakukan oleh Inggris semenjak tahun 1786 M ditolak oleh Aceh, sehingga Inggris mencari tempat lain di Penang.²⁹

Berdirinya sebuah pelabuhan transit Inggris di Penang merupakan alah satu dari dua perkembangan pada masa itu, yang sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan politik Aceh setelah tahun 1786 M. Perkembangan yang lain adalah diperkenalkannya budidaya lada di wilayah-wilayah yang belum digarap di pantai barat antara Singkil dan Meulaboh. Sekitar tahun 1787 M, Leube Dapa, penguasa Susoh menutup kontrak sebagai pemasok barang dagangan untuk seorang saudagar di pos dagang Inggris yang sudah terlantar di Bengkulu.

Leube Dapa berhasil membangun koloni dagang di pantai barat-selatan sedemikian rupa sehingga serangkaian koloni dagang di bawah kekuasaannya di sepanjang pantai itu menghasilkan 83.000 pikul (5.000 ton) lada pada tahun 1803 M.³⁰ Pada tahun 1820-an M angka itu terus

²⁹H.R.C. Wright, *East Indian Economic Problems of the Age Cornwallis and Raffles* (London, 1961), hlm. 249-254.

³⁰J.W. Gould, "Sumatra-America's Peppercorn, 1784-1873," *Essex Institute, Historical Collection*, 122 (1956), hlm. 102-104.

naik hingga mencapai puncaknya pada sekitar 150.000 pikul, atau separuh dari produksi total dunia.³¹ Sebagian besar pasokan dari sumber baru itu diserap oleh pedagang Amerika yang sangat aktif dari Salem dan Boston, bukan oleh perusahaan India Timur. Dua puluh satu kapal Amerika berkunjung ke daerah tersebut pada tahun 1802 M, dan perdagangan lada terus dikuasai pedagang Amerika hingga tahun 1850-an M.³²

Baik pedagang Amerika di pantai barat maupun pedagang Penang yang ingin berdagang di pantai utara menolak pandangan sultan bahwa orang asing boleh berdagang hanya di pelabuhan kesultanan saja. Pada masa pemerintahan Sultan Jauhar al-Alam Syah (1795-1823 M) pertarungan terjadi antara sultan yang ingin mewujudkan perdagangan terpusat dan akhirnya keinginan itu tidak dapat dibendung untuk mewujudkan perdagangan yang sebebaskan-bebasnya.³³

Stamford Raffles, Letnan-Gubernur Perusahaan Inggris di pos dagang Bengkulu, berpendapat lain. Kebijakan perdagangan bebas yang dijalankan Penang dilandaskan pada perpecahan politik. Hal itu bertolak belakang dengan impiannya mengenai raja Inggris di Asia Tenggara yang mendapat dukungan dari penguasa setempat. Sedangkan kebijakannya di Sumatera adalah membendung perpecahan, dengan

³¹ William Milburn, *Oriental Commerce*, ed. Revisi (London, 1825), hlm. 153.

³² Gould, *op.cit.*, hlm. 116-132.

³³ Antony Reid, *The Contest for North Sumatra. Atjeh, the Netherlands and Britain 1858 - 1898*, (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1969), hlm. 7

membatasi kegiatan perdagangan hanya di beberapa pelabuhan kerajaan saja.³⁴

Di Calcuta, pada bulan Oktober 1818, Raffles meyakinkan Lord Hastings bahwa untuk keamanan Selat Malaka diperlukan tempat berpijak bagi kekuatan Inggris di Sumatera Utara dan ujung selatan Selat Malaka, yang akan dibangun Raffles di Singapura. Raffles diberi hak suara dalam komisi gabungan bersama Kapten Coombs, yang diberi wewenang menandatangani perjanjian pertahanan dengan sultan Aceh.³⁵

Situasi politik di Aceh pada waktu itu situasi agak memanas, dimana beberapa panglima sagi di Aceh Besar kembali menolak dukungan terhadap Sultan Jauhar al-Alam. Namun, Raffles berhasil membujuk Coombs untuk menyetujui sebuah perjanjian dengan Jauhar al Alam, yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1819. Perusahaan India Timur memasok senjata dan uang kepada Jauhar al Alam dan menggunakan pengaruhnya untuk mengusir Saiful Alam. Jauhar al Alam berjanji tidak akan campur tangan dalam urusan pelayaran Inggris di pelabuhan-pelabuhan yang masih berada di bawah kekuasaan Saiful Alam seperti Ulhee Lheue, Banda Aceh, dan Lhokseumawe. Perjanjian menetapkan persekutuan pertahanan antara Inggris dengan Aceh. Aceh tidak akan mengizinkan orang Eropa menetap dan tidak akan membuat perjanjian dengan orang asing tanpa persetujuan Inggris. Perusahaan India Timur diberi hak berdagang di semua pelabuhan Aceh dan menempatkan utusan di istana sultan Aceh.³⁶

³⁴J. Bastin, *The Native Policies of Sir Stamford Raffles in Java and Sumatra*, (Oxford, 1957), hlm. 98-99.

³⁵Reid, *op.cit.*, hlm. 8.

³⁶*Ibid.*, hlm. 9.

Campur tangan Raffles di Aceh sebagai salah satu akibat dari peristiwa dalam perselisihan kolonial antara Inggris dengan Belanda. Selama bagian kedua abad ke-18 pedagang Inggris telah memperluas kegiatan mereka ke sebelah timur India dan Penang. Perdagangan Inggris mendapat dorongan yang sangat besar untuk meluaskan diri ke dalam arus perdagangan Asia Tenggara yang sangat menguntungkan. Pada akhir periode itu pabrik kain Inggris telah menguasai pasar Nusantara, sedangkan hasil bumi dari kepulauan Nusantara merupakan barang dagangan yang tinggi nilainya untuk ditukarkan dalam perdagangan dengan Cina, salah satu dari kegiatan perusahaan India Timur yang paling menguntungkan.³⁷

Pada tahun 1814 M diambil keputusan di Eropa untuk mengembalikan kepada kerajaan Belanda semua wilayah yang dirampas dari Belanda. Pengembalian itu ditentang oleh orang-orang Inggris yang memiliki kepentingan besar di Asia Tenggara karena dapat menghancurkan perdagangan Inggris di Asia Tenggara.³⁸

Pada tanggal 17 Maret 1824 ditandatangani perjanjian antara Inggris dengan Belanda di London, yang menyerahkan semua wilayah Inggris di Sumatera kepada Belanda. Perjanjian Raffles dengan Aceh sangat bertentangan dengan perjanjian London tersebut karena Inggris menghormati kedaulatan Aceh. Namun, Belanda berjanji akan mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk menata hubungannya dengan Aceh, sehingga Aceh tidak kehilangan sedikitpun kedaulatannya.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁹ W.G. Maxwell dan W.S. Gibson (ed.), *Treaties and Engagements the Malay States and Borneo*, (London, 1924), hlm. 8-16.

Perdagangan Banda Aceh dalam Jaringan Antarbangsa

Pengaturan mengenai Aceh itu tidak mendapat perhatian yang semestinya dari sisi pelaksanaan, dibandingkan dengan pasal-pasal perjanjian 1819 M dengan Inggris. Pemerintah India mengizinkan Penang memutuskan sendiri bagaimana akan menerapkan pengaturan itu dalam keadaan yang telah berubah setelah Jauhar al Alam meninggal. Namun, Gubernur Penang, Robert Fullerton, memutuskan bahwa perubahan yang dijanjikan itu tidak pernah efektif bahkan merugikan karena mengakui kekuasaan Aceh.⁴⁰ Oleh karena itu, Penang menjaga hubungan dengan sultan-sultan Aceh seperlunya saja, dan tidak pernah memberi tahu para pengganti Jauhar al Alam bahwa perjanjian Raffles sudah tidak lagi diakui oleh Inggris. Ketika Sultan Muhammad Syah (1823-1838 M) sendiri merujuk perjanjian itu pada tahun 1826 M, ia tidak diberi tahu bahwa perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi.⁴¹ Namun, kadang-kadang Gubernur Straits Settlements menghidupkan kembali perjanjian Raffles apabila hal itu menguntungkan mereka. Pada tahun 1844 M, Butterworth mengingatkan sultan Aceh mengenai perjanjian itu, yang secara khusus memberikan izin kepada Inggris untuk berdagang di semua pelabuhan Aceh.⁴² Kejadian-kejadian di tingkat lokal tidak dihiraukan oleh London karena adanya anggapan di London pada tahun 1860-an bahwa janji yang diberikan kepada Belanda telah dipenuhi.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh John Anderson pada tahun 1823 M dengan kerajaan-kerajaan pantai timur juga menemui

⁴⁰Nicholas Tarling "British Policy in the Malay Peninsula and Archipelago, 1824-1871" *JMBRAS* 30 (1957), part 3, hlm. 130-131.

⁴¹P.H. Van Der Kemp, "Raffles Atjeh-overeenkomst van 1819." *BKI* 51 (1900), hlm.184.

⁴²Tarling, *op.cit.*, hlm. 136-137.

nasib yang sama. Pejabat-pejabat lokal Inggris bertindak atas dasar anggapan bahwa perjanjian Inggris - Belanda tahun 1824 M membatalkan semua perjanjian itu, meski mereka tidak pernah melakukan apapun untuk memberi tahu para penguasa Melayu mengenai hal itu. Baru pada masa-masa kemudian perjanjian-perjanjian Sumatra pra-1824 M dihidupkan kembali di Straits Settlements sebagai senjata untuk melawan Belanda yang terus mengembangkan wilayah kekuasaannya.⁴³

Walaupun secara tegas disebutkan dalam Nota Belanda, sebagai lampiran perjanjian 1824 M, bahwa Belanda tidak akan mengganggu kedaulatan Aceh, namun berbagai tafsiran ahli hukum Belanda menyebutkan ketentuan itu bukan berarti Belanda tidak boleh menapakkan kakinya di Aceh. Semenjak perjanjian London 1824 M, Belanda sudah tidak dapat menahan diri untuk merong-rong kedaulatan Aceh melalui penguasaan wilayah demi wilayah Aceh dengan berbagai alasan yang di antaranya adalah untuk pembasmian bajak laut sesuai dengan pasal 5 perjanjian London 1824 M dan pembasmian budak berdasarkan Konvensi Wina 1814 M.⁴⁴

Persoalan bajak laut sesungguhnya sangat tergantung pada keinginan Belanda, memanfaatkan ketentuan tersebut untuk kepentingan Belanda sendiri. Apabila merasa perlu menarik keuntungan dari itu maka kerajaan Aceh yang menyeret ke pelabuhannya kapal-kapal yang tidak membayar cukai dapat saja dikatakan sebagai pembajak. Tromp pada abad ke-17 justru menahan kapal-kapal Aceh di perairannya sendiri, pembajakan yang terang-terangan dilakukan seperti

⁴³Reid, *op.cit.*, hlm. 14.

⁴⁴Said, *op.cit.*, hlm. 484.

itu dikatakan sebagai suatu tujuan baik karena mereka mengatakan bertujuan menghindari perdagangan budak.⁴⁵

Karena selalu dirugikan oleh taktik Belanda, Aceh membicarakan persoalan itu secara mendalam. Aceh sendiri tidak ada hubungan dengan Konvensi Wina 1814 M, sehingga pembasmian budak tidak boleh dilampaui dari daerah negara-negara yang bersangkutan. Selain itu, Konvensi Wina 1814 M hanya ditujukan untuk menghentikan perdagangan budak dari Afrika. Namun dalam kenyataannya, Belanda sendiri saudagar yang paling aktif dalam perdagangan perbudakan. Pada saat mengawasi perdagangan budak, Belanda sendiri sedang giat menjalankan perdagangan budak.⁴⁶ Hal itu seperti diungkapkan oleh E. S. De Klerk bahwa kapal-kapal Aceh yang membawa muatan manusia dari Nias dicegat, tetapi Gubernur Belanda sendiri semenjak tahun 1825 M mencegat kapal Aceh itu membawa sendiri budak dari pulau Nias ke Sumatera Barat. Pada mulanya hanya ratusan orang namun pada tahun 1833 M sudah meningkat sampai 3000 orang.⁴⁷

Sangat lama pihak Aceh menghadapi penyerobotan Belanda atas kapal-kapal mereka yang lalu-lalang di perairannya sendiri. Sudah lama diketahui bahwa Belanda sendiri sedang menjalankan perdagangan budak dengan sangat giat. Namun, pihak Aceh belum dapat berbuat apa-apa, karena belum cukup kuat untuk bertindak terhadap Belanda. Namun, praktek Belanda lama-kelamaan tidak dapat ditolerir juga. Pada

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 495.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 496.

⁴⁷E.S. De Kleck, *De Atjeh Oorlog* Vol. I, (s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1912), hlm. 158.

satu pihak Belanda berdagang budak, pada sisi lain pihak Belanda menyerobot kapal Aceh yang memuat hasil-hasil bumi. Pengawasan di perairan Aceh sendiri semakin ketat, kesempatan mengangkut alat-alat yang dibutuhkan untuk memelihara keamanan terutama pembelian senjata dari luar negeri menjadi terhambat.

Dengan perjanjian London 1824 M, mestinya Belanda tidak dapat lagi memperluas daerah jajahan karena sudah terikat dengan pengakuannya, di antaranya Aceh tidak boleh diganggu kemerdekaannya dan apabila Belanda hendak memperluas wilayah ke daerah lain di Sumatera, mereka harus memberi tahu lebih dahulu pemerintah tinggi Inggris di London.⁴⁸

Dua pengakuan Belanda di atas telah dilanggar begitu saja oleh Belanda sendiri setelah tahun 1825 M, karena antara Inggris dengan Belanda telah selesai pertukaran pos-pos militer. Di Sumatera, Inggris menyerahkan Bengkulu, Padang, Air Bangis, Natal, dan Tapanuli.⁴⁹

Ketika Sultan Muhammad Syah menjabat tahta Kesultanan Aceh, saudara mudanya Tuanku Ibrahim ditugaskan menjaga stabilitas wibawa kerajaan Aceh di pantai barat dan selatan Aceh, terutama semua raja-raja atau panglima pelabuhan pantai tersebut mematuhi Banda Aceh, dan membayar *wase* (semacam upeti) secara reguler.

Raja Trumon yang merasa senang dengan perdagangan langsung ke luar negeri telah berhasil didorong oleh Belanda untuk menyatakan diri merdeka dari Aceh. Ia pun memasang bendera sendiri dan membuat uang logam sendiri. Pada bulan November 1830 Residen

⁴⁸Said, *op.cit.*, hlm. 497.

⁴⁹*Ibid.*, hlm.497.

Belanda di Padang, Mac Gillavry, berhasil mengikat perjanjian dengan raja Trumon yang menyatakan lepas dari kerajaan Aceh. Namun, perjanjian itu tidak pernah disahkan oleh pemerintah tinggi Belanda. Di lain pihak raja Trumon (raja Bujang) tidak merasa terikat untuk berhubungan dagang dengan Belanda. Sultan Aceh tidak dapat menerima tindakan raja Trumon tersebut. Tuanku Ibrahim sebagai wakil sultan kemudian bertolak ke Trumon untuk melakukan pengecekan. Karena membangkang, Tuanku Ibrahim menyita dua buah kapal Raja Trumon, *Lexmey* dan *Bagiana* yang sudah penuh dengan muatan lada seharga sekitar 112.000 dollar,⁵⁰ dan dibawa ke Banda Aceh. Berbeda dengan raja Trumon, saudaranya Muhammad Arif yang menjadi raja di Singkel, tidak mau bekerjasama dengan Belanda untuk melepaskan diri dari Sultan Aceh, sebagaimana yang dilakukan oleh raja Bujang.⁵¹

Dengan usaha penertiban itu, Tuanku Ibrahim berhasil mengatur sedemikian rupa, sehingga pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi oleh kapal-kapal dan pedagang asing, seperti Amerika, Inggris dan lain-lain, tidak mau lagi membuat perjanjian-perjanjian dagang yang merugikan, terutama akibat sistem panjar yang diperhitungkan oleh si pembeli akan mendapatkan harga murah. Hal itu seringkali berakibat sengketa antara pedagang-pedagang asing dengan penguasa atau pengusaha setempat.

Perkembangan selanjutnya mencerminkan tindak-tanduk Belanda yang menunjukkan bahwa pada satu sisi ingin berdagang dengan Aceh, sebagaimana pedagang-pedagang asing lainnya, namun pada sisi lain terus berusaha merong-rong kedaulatan Aceh. Pada tahun

⁵⁰ W.L. Ritter, "Korts Aanteekeningen over het Rijk van Atjin, enz," *TNI*, X-2, hlm. 11.

⁵¹ Said, *op.cit.*, hlm. 499.

1837 M, Belanda mengirim semacam utusan perdagangan sebanyak dua orang, yaitu Kapten Laut Van Loon, komandan kapal perang *Circe* dan W. L. Ritter, seorang pegawai tinggi Belanda. Mereka diberi surat tugas oleh Gubernur Jenderal Belanda untuk bertemu sultan Aceh mengenai pemberontakan awak kapal *Dolphin*, terbunuhnya kapten kapal dan melarikan kapal yang penuh muatan, uang tunai dan barang-barang berharga sebesar f300.000 dan muatan seharga 112.000 ringgit Spanyol. Ternyata mereka mendapat suaka dari sultan Aceh. Tuntutan Belanda supaya kapal dan semua awak kapal diserahkan ditolak oleh sultan Aceh.⁵²

Vanloon dan Ritter akhirnya diterima oleh sultan Aceh karena ia mengatakan ingin mengadakan perundingan mengenai hubungan dagang. Hasil pertemuan itu gagal karena Belanda tidak mau tahu kenapa Aceh tidak mau berdagang dengan Belanda. Veth menyebutkan bahwa cukai yang dikenakan oleh Belanda terlalu tinggi, sedangkan barang-barang yang ingin dipasarkannya jauh lebih mahal dari harga barang yang sama dengan barang yang dimasukkan oleh pedagang asing lainnya.⁵³ Selanjutnya Vanloon dan Ritter menganjurkan agar dilancarkan tindakan yang lebih keras, yaitu blokade terhadap sekeliling pantai Aceh.

Setelah Sultan Jauhar Alam tidak ada sultan yang berupaya menggiring kegiatan dagang ke Ulhee Lheue, Banda Aceh yang sempat kehilangan peran penting yang dimainkannya selama itu dalam perdagangan ekspor. Hak sultan memungut bea di pelabuhan-pelabuhan

⁵²Ritter, "Korts...*op. cit.*, hlm. 287.

⁵³P.J. Veth, *Atchin en zijner betrekkingen tot Nederland*, (Leiden : Geraht Kolff, 1887), hlm. 88.

lain tidak teratur bahkan sumber penghasilan sultan dikembalikan kepada upeti tahunan dari para uleebalang.⁵⁴

Kesultanan menjadi lemah dalam hubungan dengan vasal di kerajaan-kerajaan yang ada di pantai barat dan utara. Namun di sisi lain, ada kekayaan baru, yang lebih dari dua kali lipat pendapatan ekspor seluruh negeri selama pemerintahan Jauhar al Alam. Pada tahun 1820-an Aceh bahkan jauh mengungguli produksinya pada abad ke-16, dan menghasilkan lebih dari setengah hasil lada dunia. Menurut perkiraan Penang mengenai produksi pada periode itu, nilai ekspor Aceh mencapai sekitar 1,9 juta dolar Spanyol. Dari jumlah itu \$400.000 dibawa ke Penang dengan kapal-kapal kecil Asia; senilai \$1 juta diangkut oleh pedagang Amerika dari wilayah lada pantai barat; dan sisanya diangkut oleh kapal-kapal India, Prancis, dan Arab.⁵⁵

Pada tahun 1820 M, produksi lada seluruh Aceh mencapai puncaknya di atas 230.000 pikul, tetapi itu lebih besar dari daya serap pasar dunia. Produksi lada Aceh turun-naik mengikuti gerakan harga yang tidak stabil di Eropa. Produksi rata-rata pada periode 1830-1870 M sekitar 150.000 pikul setahun, dengan harga sekitar \$6 sepikul.

Selama bagian pertama abad ke-19, pengaruh orang Eropa dan sultan-sultan di wilayah-wilayah penghasil lada bawahan Aceh tidak cukup besar dan langgeng untuk mencegah wilayah-wilayah itu menjadi sasaran "diplomasi kapal meriam". Praktek curang yang biasa terjadi antara penjual dan pembeli semakin merajalela pada saat-saat harga

⁵⁴Reid, *op.cit.*, hlm. 15.

⁵⁵C.D. Cowan, "Early Penang and the Rise of Singapore", *JMBRAS* 23, part 2 (1950), hlm. 155.

turun. Pembunuhan, perampokan, atau pemberontakan awak kapal sangat sering terjadi.⁵⁶

Situasi yang lebih tenang diciptakan oleh Tuanku Ibrahim (1838-1870 M). Pemerintahannya kuat dan berlangsung lama, hanya terganggu pada tahun 1850 M, ketika Sulaiman mencapai usia dewasa meminta hak berkuasa yang diwarisinya. Pada tahun 1857 M, ketika sultan yang masih remaja itu meninggal, Ibrahim menerima baik permintaan otonomi "raja-raja lada" baru, dengan memanfaatkan perpecahan yang terjadi di antara raja-raja itu untuk meneguhkan dan memperluas kekuasaannya sendiri.⁵⁷

Di lain pihak, konflik kepentingan dagang antara Inggris dengan Belanda ternyata tidak selesai dengan perjanjian London 1824 M. Belanda yang sangat membutuhkan pemasukan dari hasil barang dagangan tidak dapat membiarkan Inggris terus mendominasi perdagangan di imperium Belanda. Dominasi itu hanya dapat dibendung melalui langkah-langkah proteksi, akan tetapi itu jelas melanggar semangat perjanjian London. Selisih pendapat segera muncul mengenai bea masuk yang dikenakan di Jawa. Selisih pendapat itu diperburuk oleh peraturan yang mewajibkan semua barang ekspor diserahkan kepada pemerintah di bawah *cultuurstelsel* (sistem tanam paksa) yang dimulai oleh Van den Bosch pada tahun 1830 M dan dibawa ke Belanda oleh *Nederlandsche Handel-Maatschappij*. Dengan demikian, tidak

⁵⁶Reid, *op.cit.*, hlm. 16.

⁵⁷K.F.H. van Langen, "De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat," *BKI* 34 (1888), hlm. 397,405-406.

dapat dihindari bahwa perdagangan Inggris di Jawa tergeser oleh perdagangan Belanda.⁵⁸

Melihat situasi yang demikian, maka kebijakan Inggris menjadi lebih keras terhadap setiap upaya Belanda untuk memperluas kekuasaannya dari Jawa ke pulau-pulau lain, terutama ke Sumatera. Pada tahun 1824 M, Inggris telah diyakinkan mengenai hal itu bahwa Belanda tidak memiliki keinginan untuk meraih keunggulan politik atau monopoli perdagangan di kepulauan timur. Namun, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Den Bosch (1830-1833), pendukung mutlak kolonialisme untuk mengejar keuntungan sebanyak mungkin, berpendapat bahwa kekuasaan Belanda hendaknya diperluas sehingga mencakup Jawa, Bangka dan Sumatera. Dengan menggunakan pengaruhnya, ia berharap dapat memperoleh pengakuan sukarela dari semua penguasa Sumatera di selatan Aceh dan dapat mendirikan kantor dagang kecil Belanda di muara-muara sungai terpenting, kemudian dapat menaikkan pajak di daerah-daerah itu bagi keuntungan perdagangan Belanda.⁵⁹

Pada tahun 1840 M, jabatan Menteri Luar Negeri Inggris dipegang oleh Lord Palmerston. Ia sudah bertarung melawan Belanda selama lima tahun mengenai bea cukai di Jawa dan ingin menghindari situasi serupa di Sumatera. Tanpa merasa terancam oleh kelemahan kasusnya melawan Belanda, dilihat dari sisi perjanjian 1824 M, Palmerston menggunakan kesempatan untuk mengikuti saran Gubernur Samuel Bonhm, untuk menegaskan keabsahan kesempatan Farquhar tahun 1818 M dengan Siak.⁶⁰ Selain itu, perjanjian Belanda dengan

⁵⁸Tarling, 1957, *op.cit.*, hlm. 86-122.

⁵⁹Reid, *op.cit.*, hlm. 18.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 20.

Jambi, yang baru diberitahukan kepada Inggris pada tahun 1841 M, melanggar pasal perjanjian London. Penaklukan Barus dan Singkil tampaknya melanggar jaminan bagi kedaulatan Aceh. Palmerston juga mempersoalkan pasal keenam perjanjian London, yang mewajibkan persetujuan dari Den Haag bagi semua gerakan Belanda di Timur.

J.C. Baud (1839-1848), seorang menteri kolonial di Den Haag, lebih bersedia mendengarkan keluhan-keluhan semacam itu daripada pendahulunya. Baud terkesan oleh sebuah memorandum dari mantan Gubernur Pantai Barat Sumatera yang memperingatkan agar Belanda tidak merebut wilayah lebih banyak dari yang dapat diurus oleh sistem kolonial. Selain itu, ia mempertimbangkan, karena sebagian besar hasil bumi Minangkabau telah disalurkan ke pantai barat akibat pendudukan Belanda, kendali atas sungai-sungai timur tidak dapat lagi digunakan sebagai alasan untuk bertengkar dengan Inggris.⁶¹

Sesuai dengan instruksi Baud bulan September 1841, Pemerintah Hindia Belanda menarik diri dari pos Panai-Bila dan Pos Inderagiri dan menghentikan perundingan dengan Siak. Namun, Batavia tetap mendirikan pos di Jambi untuk mempertahankan Palembang. Di lain pihak tidak banyak pejabat Belanda di Batavia yang mematuhi instruksi menteri itu agar menjaga kedaulatan nominal di tempat-tempat yang dikosongkan dan terus mengibarkan bendera di tempat itu.⁶²

Baud juga tidak mau mengakui keabsahan argumen Palmerston. Pihak Inggris hanya diberi tahu begitu saja bahwa pos-pos di pantai timur diperlukan hanya untuk keperluan militer sementara dan sedang dikosongkan. Sebuah usul Inggris untuk berkompromi mengenai

⁶¹Reid, *op.cit.*, hlm. 20.

⁶²*Ibid.*, hlm. 20.

interpretasi Perjanjian London tidak ditindaklanjuti, sehingga interpretasi tetap menjadi persoalan.⁶³

Aceh juga tidak masuk hitungan serius dalam rencana Van Den Bosch atau Baud. Perdagangan Aceh berada pada pihak lain dan kebebasan perdagangan menjamin bahwa Aceh dapat terhindar dari gerak ekspansi Belanda. Memenuhi kewajiban tahun 1824 M untuk melindungi perdagangan di Aceh jelas tidak mungkin. Beban bagi sumber daya Belanda sudah terlalu berat, bahkan untuk melindungi kepentingan dagangnya sendiri susah apalagi untuk melindungi kepentingan dagang Inggris, Perancis dan Amerika, yang mendominasi perdagangan Aceh. Kontak resmi Belanda sebelum tahun 1850 M adalah putusan tingkat rendah tahun 1837 M yang mengajukan protes menentang perlindungan yang diberikan Aceh atas awak kapal Belanda yang meberontak. Bahkan putusan itu menghina protokol kesultanan, karena mereka mengunjungi pelabuhan-pelabuhan bawahan sebelum berkunjung ke ibukota, dan mendapat sambutan dingin ketika mereka tiba. Batavia menolak saran putusan agar Aceh dikurung dengan blokade. Namun demikian, tidak ada prakarsa yang diambil untuk melunakkan hubungan atau bahkan untuk merumuskan kebijakan yang jelas mengenai kesultanan Aceh.⁶⁴

Sebaliknya, justru pejabat Belanda di pantai barat Sumatera diizinkan menarik pemerintah ke dalam kancah permusuhan terbuka melawan Aceh dalam kaitan dengan perang melawan kaum Padri. Semua di wilayah paling selatan yang dituntut oleh Aceh sebagai miliknya, yaitu Barus, Tapus, Singkil, dan Trumon, berpenduduk

⁶³Tarling, *op.cit.*, hlm. 144-146.

⁶⁴Reid, *op.cit.*, hlm. 21.

campuran orang Melayu dan orang Aceh. Di Singkil dan Tapus setidaknya orang Aceh menduduki tempat di atas semenjak kekuatan Belanda pudar pada abad ke-18. Serangkaian konflik perbatasan dan permohonan dari kepala suku Melayu mendorong pihak berwenang Belanda di tingkat lokal untuk menjadikan Trumon kerajaan merdeka sebagai perisai menghadapi Aceh dan langkah untuk menaklukkan tiga kerajaan lainnya di selatan. Tidak banyak perhatian yang diberikan kepada kemarahan yang datang dari pihak Aceh, meski sudah banyak diketahui orang bahwa penduduk dari berbagai wilayah kerajaan Aceh telah memberikan bantuan pada perlawanan yang penuh semangat yang diberikan Singkil dan Tapus untuk menentang perdagangan Belanda. Tidak heran apabila banyak orang Aceh pantai barat yang memperoleh kesan bahwa ada situasi perang antara Aceh dan Belanda.⁶⁵

Pada tahun 1852 M, Aceh mulai tampak muncul sebagai *Tumit Achilles* bagi Belanda. Napoleon III telah menerima seorang utusan Aceh, Sidi Muhammad, dan Napoleon memberinya sepucuk surat dan sebilah pedang kehormatan untuk disampaikan kepada Sultan Ibrahim.⁶⁶

Menteri Kolonial Belanda, Charles Ferdinand Pahud (1803-1873), cukup terganggu oleh bahaya yang bakal muncul sehingga ia mengeluarkan perintah pada bulan April 1853, yang diperbanyak kemudian dalam bentuk instruksi resmi yang dikeluarkan kepada dirinya sendiri sebagai gubernur jenderal yang baru pada tahun 1855 M. Belanda tidak perlu terlibat lebih lanjut dalam pemerintahan di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, tetapi harus diupayakan membuat perjanjian dengan tegas menolak kemungkinan campur tangan asing dengan semua kerajaan itu. Dalam hal kerajaan-kerajaan Sumatera yang

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 22.

⁶⁶Klerck, *op.cit.*, hlm. 208.

masih merdeka, terutama Aceh dan Siak, kekuasaan Belanda tidak boleh dijalankan di sana guna menghormati penafsiran Inggris atas pasal tiga perjanjian London.⁶⁷

Meskipun ada instruksi itu, Pemerintahan Belanda di Batavia tetap saja tidak meninggalkan sikapnya merendahkan Aceh. Pada tahun 1854 M wakil pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi agar mengibarkan bendera Belanda secara berkala di Aceh, namun Belanda tidak menunjukkan tanda persahabatan karena tidak ada upaya dari pihak Aceh untuk membina hubungan persahabatan dengan Belanda.⁶⁸ Kapal meriam Belanda yang dikirim ke Aceh di bawah kebijakan baru itu, pada tahun 1853 M melakukan kesalahan lama yang sama, yaitu mengunjungi pelabuhan-pelabuhan kecil terlebih dahulu sebelum mengunjungi Banda Aceh dan tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki citra Belanda di Aceh.⁶⁹

Sultan Ibrahim sangat peka untuk mengamati perselisihan dengan Belanda. Ia menyambut dengan sopan seorang utusan yang lebih tua dan lebih berpandangan luas yang dikirim Pahud kepadanya pada tahun berikutnya. Sikap yang memperlihatkan kesediaan untuk melupakan perbedaan pendapat pada masa lalu pada akhirnya meyakinkan Batavia untuk mengubah kebijakannya menjadi kebijakan mencoba mengupayakan Sultan Ibrahim sebagai fokus ketertiban daripada menentanginya. Jenderal van Swieten, yang ketika itu menjabat Gubernur pantai barat Sumatera, diberi kuasa untuk merundingkan

⁶⁷Graham Irwin, "Nineteenth Century Borneo : A Study in Diplomatic Rivalry," *VKI* 15 (1955), hlm. 151-156.

⁶⁸Klerck, *op.cit.*, hlm. 213.

⁶⁹Reid, *op.cit.*, hlm. 23.

perjanjian persahabatan. Ditandatangani di Kutaraja (Banda Aceh) pada tanggal 30 Maret 1857, perjanjian itu mencabut keluhan masing-masing pihak dan memuat ketentuan dalam garis besar untuk persahabatan dan perdagangan antara Aceh dan Belanda. Namun, Van Swieten menolak permintaan Sultan Ibrahim untuk mengadakan kerjasama pertahanan dan ofensif.⁷⁰

Kecurigaan keduanya masih tidak dapat dihilangkan, bahkan perjanjian itu dapat menjadi tonggak bagi pengaruh Belanda yang lebih permanen di Aceh. Gubernur Jenderal Belanda berkeinginan terus memelihara hubungan itu dengan mengirim kapal setiap tahun ke Aceh, namun baru dilakukan pada tahun 1858 M. Kunjungan berikutnya terjadi pada tahun 1861 M.⁷¹

Pada tahun 1836 M, Sultan Ibrahim meminta saran Gubernur Straits Settlements tentang apakah sultan sebaiknya membina hubungan persahabatan dengan Belanda. Blundell menjawab bahwa hal itu akan meningkatkan prestise sultan Aceh.⁷² Penegasan seperti itu penting karena dikhawatirkan orang-orang Aceh menolak persekutuan dengan Belanda apabila hal itu merugikan persekutuan mereka dengan Inggris sebagai rekan dagang utama Aceh pada waktu itu. Aceh membina hubungan baik dengan Belanda pada waktu itu karena Belanda juga masih menjalin hubungan baik dengan Inggris.

Kemampuan berlayar yang semakin cepat dan jadwal tetap kapal-kapal dagang pada waktu itu mendorong pertumbuhan pelabuhan tetap memungkinkan muatan dapat dimuat dengan cepat. Kapal

⁷⁰Said, *op.cit.*, hlm. 283-298.

⁷¹Klerk, *op.cit.*, hlm. 229-232.

⁷²Tarling, 1957, hlm. 164-165.

Amerika yang lambat dan bersedia menunggu berbulan-bulan sampai muatan lada terkumpul tidak lagi menguntungkan. Armada besar Amerika terakhir berkunjung ke pantai barat Aceh pada tahun 1853 M sehingga selama beberapa tahun sebagian besar lada Aceh dipasarkan ke Penang.⁷³ Nilai ekspor lada Sumatera ke Penang naik dari \$155.000 pada tahun 1851-1852 M ke puncak sementara sebesar satu juta dollar pada tahun 1857-1858 M, ketika harga lada tinggi. Dalam periode yang sama, perdagangan Penang-Sumatera secara keseluruhan naik dua kali lipat.⁷⁴

Seperti sudah disebutkan bahwa Tuanku Ibrahim sangat aktif dalam pemerintahan semenjak Sultan Muhammad Syah naik tahta. Turut serta mendampingi sultan adalah dua orang saudaranya yang lain, yaitu Tuanku Raja Muda yang mendapat tugas memelihara tertib hukum perdagangan dan pelayaran untuk kawasan pantai utara dan timur Aceh. Saudaranya yang satu lagi, yaitu Tuanku Abbas bertanggungjawab atas wilayah Pidie. Tuanku Ibrahim sendiri khusus mendapat tugas untuk wilayah barat dan selatan Aceh, yang terkenal dengan daerah yang sering membangkang terhadap sultan Aceh.⁷⁵

Suasana politik yang dipengaruhi desakan dan laju ekonomi pedagang-pedagang Inggris tidak lagi melihat sejauhmana ia harus mengindahkan kedaulatan Aceh, yang pada tahun 1819 M pernah menyatakan untuk tidak mengganggu Aceh. Suasana kestabilan Aceh

⁷³James W. Gould, "Sumatra-America-s Pepperpot, 1784-1873." *Essex Institute, Historical Collections* 92 (1956), hlm. 322-327.

⁷⁴*Tabular Statements of the Commerce and Shipping of Prince of Wales Island, Singapore and Malacca, 1853-1854, 1854-1855, 1857-1858, 1862-1863 and 1867-1868.*

⁷⁵*Sumatra Courant*, 28 Agustus 1871, hlm. 2-3.

terus terancam, bahkan Belanda terus mengancam kedaulatan Aceh melalui daerah terselatan Aceh di Tapanuli, Barus, Tapus, Singkil dan Trumon, dengan alasan pembasmian bajak laut dan perdagangan budak dari Nias. Di lain pihak, Inggris semakin merasakan pentingnya kelancaran lalu lintas perdagangan bebas antara Malaka dengan Sumatera. Untuk itu, Inggris merasa terikat untuk melindungi kelancaran itu tanpa merasa bertanggung jawab apakah dengan kelancaran itu terjadinya pelanggaran kapal-kapal dagang asing terhadap tertib hukum kerajaan Aceh, terutama mengenai cukai yang merupakan syarat utama bagi setiap kapal dagang yang mengeluarkan dan memasukkan barang.

Akibat dari kapal-kapal dagang Inggris atau lainnya yang mengacuhkan tertib hukum itu, maka sering terjadi pelaksanaan kerja sama antara kapal-kapal dagang asing dengan kelompok penyeludup setempat. Bahkan ada juga kapal dagang asing yang tidak mau memenuhi janji dalam transaksi perdagangan. Menurut perjanjian Inggris dengan Aceh tahun 1819 M, menjadi kewajiban kapal-kapal dagang Inggris yang ingin mencapai salah satu pelabuhan Aceh untuk melapor terlebih dahulu ke Banda Aceh atau ke pejabat sultan yang bertugas di tempat itu. Namun, hal itu tidak pernah dipatuhi oleh kapal-kapal dagang Inggris. Akibatnya, tidak ada pilihan lain bagi pihak sultan Aceh kecuali melakukan tindakan terhadap kapal dagang yang melanggar ketentuan.

Pada tahun 1827 M, Tuanku Raja, wakil sultan Aceh untuk wilayah utara dan timur yang berkedudukan di Samalanga, memerintahkan sita atas sebuah kapal tongkang Tionghoa Penang karena menolak membayar 5 % cukai yang diperintahkan. Sesuai dengan ketentuan, isi kapal disita dan nahkodanya diadili. Selanjutnya,

Perdagangan Banda Aceh dalam Jaringan Antarbangsa

tindakan serupa juga dilakukan terhadap kapal *Glory* milik Inggris. Sultan Aceh menginginkan agar kapal-kapal dagang asing tidak diizinkan masuk sebelum memperoleh izin terlebih dahulu.⁷⁶ Namun, Inggris tetap membiarkan kapal-kapal dagangnya melakukan apa saja tanpa mengindahkan hukum laut Aceh yang berlaku dan tidak mau membayar cukai. Di pihak lain, Aceh tetap melakukan penyitaan terhadap kapal-kapal dagang asing yang melanggar ketentuan.

Statistik Inggris di Penang pada tahun 1811 M menunjukkan ragam barang yang diekspor oleh Aceh ke pulau itu, untuk tujuan re-eksportnya ke Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Tiongkok. Buah pinang saja yang dikeluarkan dari Pidie telah dire-eksport oleh Penang ke Madras, Kalkuta, Bombay, Tiongkok, Siam, dan Pegu, dan telah memberi keuntungan sekitar 30 % bagi pedagang Penang. Banyak barang-barang ekspor dari Aceh dijadikan oleh Penang menjadi sumber kekayaannya lewat hasil re-eksport, termasuk beras, lada, merica, rotan, pinang, nilam, kemenyan, kapur barus, sarang burung, madu lebah, damar, gambir, gading gajah, lilin kayu sapan, gula tebu, tembakau, kopra, ikan asin, kayu balok, minyak tanah dan emas. Sebaliknya di antara barang yang dimasukkan ke Aceh hampir sepertiga nilai volumenya adalah candu.⁷⁷

Pada tahun 1836 M terjadi pemberontakan oleh awak kapal dagang Inggris sendiri, Zoroaster. Dalam pemberontakan itu kapten kapal dan isterinya serta seorang puteranya mati terbunuh. Kapal dikaramkan dan semua awak kapal pergi ke Banda Aceh untuk mencari perlindungan. Kemudian diketahui pula bahwa sebuah kapal dagang

⁷⁶Tarling, *op.cit.*, hlm. 188-189.

⁷⁷John Anderson, *Acheen and the ports on the North and Eastcoasts of Sumatra*, (London : Allen, 1840), bagian statistik.

Inggris lari dari Pidie sebelum membayar cukai, namun ketika di tengah laut kapal itu juga ditangkap oleh pihak Aceh.⁷⁸

Gubernur Inggris di Penang, Muchirson, yang menerima laporan itu segera menugaskan kapten Congalton memimpin kapal *Zephyr* untuk mengusut peristiwa tersebut. Hasil pengusutan diketahui bahwa kapten kapal *Zoroaster* memang seorang yang kejam dan jahat, sedangkan awak kapal yang memberontak tidak dijumpai di Aceh. Mengenai penangkapan kapal dagang Inggris yang tidak membayar cukai diperoleh keterangan bahwa itu dilakukan di perairan Aceh sendiri. Meskipun demikian, Gubernur Muchirson mengusulkan ke Calkuta supaya Aceh diberi pelajaran dengan mengirim kapal perang.⁷⁹

Tidak lama setelah itu terjadi lagi peristiwa yang menegangkan hubungan dagang antara Aceh dengan Inggris secara kebetulan pada tahun 1844 M, Gubernur Inggris, Muchirson, digantikan oleh Gubernur Butterworth yang lebih cenderung dengan kekerasan. Peristiwa tenggelamnya kapal dagang Inggris *Robert Spankie* pada tahun 1843 M dari Penang dan terbunuhnya kapten kapal itu di Meureudu, Pidie, menyebabkan gubernur Inggris itu memerintahkan keberangkatan kapal perang ke Aceh, dan pada waktu yang bersamaan sebuah kapal dagang Inggris ditahan pihak Aceh.

Dalam suatu pertemuan dengan sultan Aceh, sultan menjanjikan bantuan serta mengirim beberapa panglima untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Setelah tiba di Pidie, segera ditemui raja Pidie. Raja Pidie mengusulkan untuk mengganti kerugian. Akan tetapi, Inggris menuntut supaya Tuanku Abbas diserahkan, namun

⁷⁸ Said, *op. cit.*, hlm. 544.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 544.

tuntutan Inggris ditolak dan akhirnya kapal perang Inggris pun dikirim ke Aceh. Kapal itu selanjutnya bertolak ke Meureudu, Pidie, untuk menemui Tuanku Abbas, namun tidak berhasil.⁸⁰

Di lain pihak, tindakan agresi yang dijalankan oleh Belanda sambil melupakan perjanjiannya dengan Inggris telah berjalan semenjak awal tahun 1850 M. Pada tahun itu Belanda sudah menganggap bahwa perairan Aceh adalah wilayah perdagangannya. Pada tahun 1853 M seorang pemimpin *Nederlandche Handel Mij.*, PJG. Sem telah mengadakan peninjauan ke Aceh. Belanda kagum melihat peta dunia tahun 1849 M yang dikeluarkan oleh JH. Golton di New York. Dalam peta itu dicatat bahwa Sumatera saja menghasilkan lada setiap tahun 35 juta dollar, lebih dari seluruh produksi semua kawasan lain di seluruh dunia.⁸¹ Diketahui juga bahwa jumlah yang dihasilkan dari daerah lain di Sumatera hanya sedikit sehingga menjadi bahan pemikiran Belanda bahwa bagian terbesar yang puluhan juta dollar itu adalah dihasilkan oleh Aceh. Ketika tiba di Banda Aceh, Sem diterima oleh sultan Aceh. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh sultan Aceh kepadanya adalah mengapa sedemikian lamanya sudah tidak pernah muncul lagi kapal dagang Belanda. Sem mengesankan bahwa perdagangan bebas dengan Aceh untungnya sangat sedikit. Selain itu, sultan Aceh juga menanyakan apakah Belanda tidak merasa kuatir untuk datang ke Aceh, padahal antara Aceh dengan Belanda sudah terjadi permusuhan semenjak Belanda berdagang di Singkel. Sem mengatakan bahwa ia tidak kuatir apa-apa karena kedatangannya untuk menjajakan barang dagangannya sendiri. Pada pertemuan selanjutnya dengan sultan Aceh. Sem mengatakan bahwa ia gagal menjual barang-barangnya di Aceh.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 545.

⁸¹*Sumatra Courant*, Padang, 29 Nopember 1871, hlm. 2.

Pada kesempatan itu, menurut Sem, sultan Aceh membuka pembicaraan tentang hubungan Aceh dengan Istanbul dan kedatangan kembali seorang duta besar Aceh, Muhammad Rus, yang baru pulang dari Perancis dan pernah melawat ke Belanda dan Inggris atas biaya Perancis dan kemudian diantar pulang oleh kapal Perancis "*Robert Peel*". Sultan Aceh mengatakan bahwa kapal itu nantinya akan kembali ke Perancis dengan membawa muatan lada yang akan dimuat dari pantai selatan, sekaligus membawa surat muhibbah sultan Aceh.⁸²

Melihat keramah-tamahan sultan Aceh, Sem berharap mendapat surat dari sultan Aceh untuk dibawa ke wilayah-wilayah pelabuhan di Aceh yang ingin disinggahinya, namun sultan Aceh tidak memberinya surat izin dagang kepada PJG. Sem. Setelah sekitar dua tahun kemudian, datang lagi utusan Belanda ke Aceh, Courier Dit Dubekart, seorang komandan kapal perang Belanda "*De Haai*".

Pada tahun 1851 M, datang ke Aceh sebuah kapal dagang Itali *Clementina*, yang sebelumnya sudah pernah ke Aceh untuk membeli hasil bumi. Namun kapal tersebut ditindak oleh pedagang Aceh. Itali mengajukan protes atas kejadian itu dan menuntut pertanggungjawaban sultan Aceh. Ketika hasil pertanggungjawaban itu tidak memuaskan, Itali meminta bantuan Belanda untuk menghadapi Aceh.⁸³ Tindakan serupa juga dilakukan oleh Aceh terhadap kapal dagang Inggris *Courey Castle* pada tahun 1852 M karena melanggar ketentuan perdagangan di wilayah Aceh.

Langkah Aceh melakukan tindakan terhadap kapal asing itu ternyata dimanfaatkan oleh kapal dagang tersebut untuk meminta

⁸²Said, *op.cit.*, hlm. 562.

⁸³*Ibid.*, hlm. 565.

bantuan Belanda dalam rangka menghadapi Aceh. Dengan demikian, semakin bertambah alasan Belanda untuk menguasai perdagangan di wilayah Aceh. Itu terbukti dengan perintah Raja Belanda kepada Gubernur Jenderal di Batavia supaya segera "mengikat" raja-raja di Indonesia yang belum takluk. Untuk melaksanakan perintah tersebut gubernur Belanda di Padang, Van Swieten, menugasi Courier dit Dubekart untuk mengadakan pengintaian di Aceh dan mengibarkan bendera Belanda di setiap pelabuhan lada di Aceh serta memberi jasa terhadap silang sengketa antara rakyat dengan saudagar.⁸⁴

Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 1857 datang delegasi dagang Belanda di bawah Van Swieten dari Padang tiba di Aceh. Tetapi syahbandar Aceh pada waktu itu, yang juga bertindak sebagai Menteri Perdagangan, menolak kapal dagang tersebut mendarat di pantai Aceh dengan alasan barang dagangan Belanda dalam kapal tersebut tidak begitu bagus, masih jauh lebih bagus barang dagangan dari Amerika dan lebih murah. Namun, akhirnya delegasi Belanda itu diizinkan menghadap sultan Aceh.

Selama berada di pelabuhan Aceh, Van Swieten ternyata tetap melakukan tindakan subversif. Secara rahasia, ia menerima kunjungan-kunjungan pengkhianat ke kapalnya. Ia menerima seorang bernama Ali Sulaiman yang melaporkan tentang situasi di Banda Aceh. Selanjutnya Van Swieten juga berhasil membuat berbagai perjanjian dengan sultan Aceh (Ibrahim Mansyur Syah) pada tahun 1857.⁸⁵ Setelah itu, terus menerus terjadi manuver politik Belanda ke Aceh hingga terjadi penyerbuan Belanda pertama ke Aceh pada tahun 1873 M.

⁸⁴Klerck, *op. cit.*, hlm. 215.

⁸⁵F.G. Hoffman, *Verhaal der Expeditie van 1857*, dalam Muhammad Said, *op. cit.*, hlm. 565.

B. Jaringan Perdagangan

a. Arab

Jauh sebelum orang-orang Eropa melakukan ekspansi pelayaran ke Timur, orang-orang Arab telah memegang peranan penting dalam perdagangan di kawasan selat Malaka. Namun, perlu ditegaskan bahwa tujuan utama orang-orang Arab tersebut adalah untuk dakwah Islam, dan tidak mustahil mereka juga melakukan perdagangan secara meluas ke seluruh wilayah yang mereka singgahi.

Menjelang wafat Nabi Muhammad, agama Islam telah berkembang luas di seluruh Jazirah Arab. Pengembangan ke luar Jazirah Arab terus berjalan, bahkan pada masa Khalifah Usman sudah mencapai Tiongkok.⁸⁶ Van Leur menyebutkan bahwa perkampungan orang Arab sudah ada di Canton semenjak abad ke-4 Masehi.⁸⁷ Orang-orang yang tiba di Tiongkok tentu melintasi selat Malaka dan tidak mustahil mereka singgah di Sumatera, baik untuk menambah perbekalan bahkan juga melakukan barter perdagangan.

Groeneveldt menyebutkan, seperti yang terdapat dalam hikayat Dinasti T'ang, bahwa di pantai sebelah barat Sumatera (Aceh/Pasai) sekitar tahun 674 M telah bermukim orang-orang Arab.⁸⁸ Orang Tiongkok menyebut mereka dengan orang Tashi. G. E. Gerini menjelaskan lebih lanjut bahwa pernah ada permukiman orang Arab maupun Parsi di wilayah Aceh dan bahkan di tempat-tempat lain di

⁸⁶ Said, *op.cit.*, hlm. 52.

⁸⁷ J. C. Van Leur, *Indonesian Trade and Society: Essay in Asian Social and Economic History*, (The Hague-Bandung, 1955), hlm. 111.

⁸⁸ W. P. Groeneveldt, "Historical Notes on Indonesia and Malacca Compiled from Chinese Sources". VBG vol. 39 bag. 1 (1877), hlm. 7-9.

kedua belah pantai utara dan barat Sumatera dan sangat mungkin sekali bahwa pantai-pantai itu terletak dekat sekali dengan pulau-pulau Nikobar, tempat yang sudah dikenal sebagai persinggahan utama bagi pelaut Arab dan Persi pada jalur pelayaran Teluk Benggala. Sering kali pantai barat laut Sumatera disinggahi oleh mereka, apalagi ketika terjadi angin ribut yang memaksa mereka dengan sendirinya harus berlindung ke sana. Sebagai buktinya, para pelangcong Arab tidak hanya bercerita tentang Lambri tetapi juga Barus, pelabuhan yang mereka ketahui semenjak pertengahan abad ke-10 M.⁸⁹ Orang-orang Arab yang tiba di Aceh mendapat berbagai fasilitas dan keringanan berbagai macam pungutan. Hal itu dikarenakan persamaan keyakinan dan misi dakwah Islam yang diemban oleh orang-orang Arab tersebut. Semenjak Kerajaan Pasai dan Perlak hingga kerajaan Aceh Darussalam orang-orang Arab mendapat keistimewaan di Aceh, bahkan pernah menjadi sultan di Kesultanan Bandar Aceh Darussalam.

b. Cina

Kehadiran kapal-kapal Cina di pelabuhan-pelabuhan bagian utara Sumatera setidaknya sudah dicatat pada awal abad ke-15, seperti yang disebutkan dalam laporan-laporan yang dibuat sesudah ekspedisi sida-sida *Zheng He* ke lautan selatan. Istana Aceh masih menyimpan kenangan atas kunjungan yang termasyhur itu: sebuah genta besar dengan sebutan angka tahun 1409.⁹⁰ Genta tersebut dibawa ke Banda Aceh dari Pasai oleh sultan Aceh ketika menaklukkan kerajaan Pasai.

⁸⁹ Pendapat G.E. Gerini dalam Said, *op.cit.*, hlm. 56-57.

⁹⁰ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda*. Terjemahan Arifin Winarsih (Jakarta : Balai Pustaka, 1986,) hlm. 162.

Dalam sebuah panduan lautan Cina yang berasal sebelum abad ke-17, ada pemberian nama jalan dari Banten ke Aceh (melalui barat Sumatera), juga mengenai jalur-jalur lintasan dari Aceh ke Malaka dan ke India. *Dong xi yang kao* yang ditulis pada tahun 1618 M mengetahui kejadian-kejadian di Aceh dari beberapa dasawarsa sebelumnya dan mencatat betapa pelabuhan tersebut menarik para pedagang.⁹¹

Orang-orang Eropa juga menyebutkan tentang kehadiran orang Cina, seperti disebutkan oleh John Davis bahwa "di Aceh pedagang Cina banyak sekali...."⁹² Beaulieu mencatat adanya orang Cina yang kebiasaan mereka untuk menggunting pinggiran mata uang mas dari emas.⁹³ Peter Mundy mencatat bahwa melimpahnya barang-barang dari Cina di Aceh, di antaranya diekspor kembali ke India.⁹⁴ Bahkan dalam *Adat Aceh* juga disebutkan tentang adanya tembakau yang berasal dari Cina. Boleh jadi ada jenis barang yang lain seperti porselin, beras, teh, dan kipas, dan candu.⁹⁵

Peranan yang lebih besar dilakukan oleh orang Cina dalam perdagangan di Aceh terjadi pada pertengahan abad ke-17. Hal itu

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 163.

⁹² John Davis, *The voyage of capitaine John Davis to the Eastern India, pilot in a Dutch ship* (London, 1625), hlm. 117.

⁹³ Augustin de Beaulieu, "Journal d' Augustin de Beulieu" dalam Thevenot, *Collection de de divers voyages curieux, qui n'ont point ete publiees ou qui ont ete traduites d'Hacluyt, de Purchas et d'autres voyageurs, anglois, hollandais, portugais, allemands, espagnols et de quelques persan, arabes et autres orientaux* (Paris : Cramoisy, Paris 1664-6), hlm. 70.

⁹⁴ Peter Mundy, *The Travels of Peter Mundy in England, Westrn India, Achen, Macao and the Canton Province 1634-1637*, (London : Hakluyt Society, 1919), hlm. 338.

⁹⁵ Lombard, *op.cit.*, hlm. 164.

ditegaskan oleh Dampier bahwa pada tahun 1688 M bahwa banyak orang Cina. Di antara mereka ada yang tinggal di Aceh sepanjang tahun, tetapi yang lain hanya datang sekali setahun. Mereka datang pada bulan Juni dengan 10 atau 12 kapal layar yang mengangkut beras dan beberapa bahan lain. Mereka semua mengambil rumah yang berdekatan satu sama lain, di salah satu ujung kota, di dekat laut, dan daerah mereka itu dinamakan kampung Cina, karena di sanalah mereka selalu tinggal dan mereka turunkan barang-barang untuk dijual. Ada juga pengrajin dari Cina yang datang dengan kapal-kapal, seperti tukang kayu, tukang mebel, dan tukang cat. Mereka bekerja membuat koper, peti uang, lemari dan segala macam karya kecil dari Cina yang setelah selesai, mereka pameran di toko atau di depan pintu rumah untuk dijual. Untuk itu, selama dua bulan atau dua bulan setengah berlangsung pasar Cina. Toko-toko penuh dengan barang dan semua orang datang membeli atau bermain judi. Semakin banyak barang terjual semakin sedikit tempat yang mereka tempati dan semakin sedikit rumah yang mereka sewa. Semakin sedikit penjualan mereka semakin gencar permainan judi mereka. Pada sekitar penghujung September mereka kembali ke kapal dan meninggalkan kampung Cina.⁹⁶

c. Siam

Adanya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang Siam sudah tercatat di Pasai pada sekitar tahun 1520 M.⁹⁷ Hubungan dagang dengan Siam terus berlangsung secara teratur dengan Aceh. Hal itu

⁹⁶Dampier, *op.cit.*, hlm. 168.

⁹⁷Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires*, (London : The Hakluyt Society, 1884), hlm 142.

sesuai dengan penegasan yang terdapat dalam *Hikayat Aceh* tentang adanya utusan dari Siam dan adanya hasil hutan yang datang dari Siam, yaitu gaharu Siam.

Pada tanggal 19 Agustus 1613, Thomas Best berjumpa di Aceh dengan seorang utusan dari Siam. Ditegaskan oleh orang Siam bahwa betapa senangnya sang raja seandainya bangsa Inggris datang ke Ayuthia. Sekitar 20 tahun kemudian Van Vliet menceritakan bagaimana Prasat Thong, yang ingin sekali membalas dendam terhadap penduduk Patani yang memberontak, mulai dengan mencari ketegasan mengenai kenetralan Aceh. Supaya di sekitar mereka tidak ada yang dapat memperkuat pemberontakan mereka dan mengganggu ketenangan kerajaan, maka ia mengirim utusan ke raja Aceh dan Arakan untuk memperbaharui perjanjian persekutuan, persahabatan, dan kerukunan yang selalu dijunjung tinggi oleh pendahulu-pendahulunya. Hubungan-hubungan baik itu dimanfaatkan oleh orang Islam Aceh, yang hingga tahun 1668 M datang ke Siam dengan tujuan menyebarkan agama Islam.⁹⁸

d. India

Orang-orang India memegang besar dalam perdagangan di Aceh. Ketika Lancaster pada tanggal 5 Juni 1602 membuang sauh di Aceh, terdapat 16 hingga 18 buah kapal yang dihitungnya di pelabuhan Aceh dan beberapa di antaranya berasal dari Gujarat, Benggala, Malabar

⁹⁸Van Vliet, *Historuael Verhael der Sieckte en de Doot van Pra Interra-Tsia, 22en Coninck in Siam, en de den Regberenden Coninck Pra ongh Srij. With French translation of part thereof taken from "Les relations arrivees au royaume de Siam" par J. Van Vliet, Paris 166*. Transkrip oleh Seiichi Iwao (ed.), Tokyo, 1958, hlm. 166-167.

dan Pegu.⁹⁹ Pedagang-pedagang dari Pegu biasanya membawa tembikar sebagai barang dagangan.¹⁰⁰ Pedagang-pedagang dari Benggali membawa kapas, kain, candu, dan guci besar berisi mentega atau minyak yang sangat digemari di Aceh.¹⁰¹

Raja Golkonda banyak mengekspor barang dagangan ke Aceh melalui Masulipatam yang terdiri atas besi dan baja, kain putih dan beberapa intan. Sebagai gantinya ia mengimpor kemenyan, kamper dari Barus, lada dari Pariaman atau dari Tiku, barang porselin atau lainnya dari Cina,¹⁰² begitu juga dengan sutera.¹⁰³ Dalam *Adat Aceh* juga disebutkan bahwa pedagang dari Malabar banyak membawa ikan asin dan terasi.

e. Turki

Hubungan antara Aceh dengan Turki sudah berlangsung lama. Disebutkan bahwa di Banda Aceh terdapat kampung Bitai dan terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai keturunan Turki-Suriah. Namun, ia disebutkan sebagai seorang kelahiran Baitulmukaddis (Jerusalem). Terlekat dengan nama kelahirannya disebutlah tempat kediamannya di Aceh dan tempat ia dimakamkan itu dengan Kampung Baital, yang akhirnya berubah menurut lidah Aceh menjadi Bitai.

⁹⁹Lancaster, *op.cit.*, hlm. 90.

¹⁰⁰Lombard, *op.cit.*, hlm. 168.

¹⁰¹Dampier, *op.cit.*, hlm. 178.

¹⁰²Thevenot, *Relations de Divers Voyage Curieux* vol. II. Paris, 1664, hlm. 12.

¹⁰³Beaulieu, *op.cit.*, hlm. 99.

Mengenai peristiwa *lada si cupak*, sumber Portugis menyebutkan bahwa pertengahan abad ke-16 (sekitar tahun 1540 M), Aceh telah mengadakan hubungan dengan Turki.¹⁰⁴ Pinto, seorang petualang Portugis menyebutkan bahwa Aceh telah mendapat sumbangan dari Turki sebanyak 300 orang ahli dan bantuan tersebut dibawa oleh kapal Aceh sebanyak 4 buah yang sengaja datang ke Turki untuk mendapatkan alat-alat senjata dan pembangunan.¹⁰⁵

Suatu ketika perutusan Aceh diberangkatkan ke Turki (Rum) untuk mengadakan perhubungan antara Aceh dengan Turki. Bingkisan yang dikirim untuk sultan Turki yang terpenting adalah lada, memenuhi semua kapal-kapal yang diberangkatkan. Karena terlalu lama dan banyak rintangan di laut, muatan lada menjadi habis di jalan dan tinggallah secupak lada saja yang dapat disampaikan sebagai bingkisan kepada Sultan Turki. Disebutkan bahwa kapal Aceh menempuh rute laut Merah lewat Mecha (suatu pelabuhan di Jazirah Arabia), lintasan laut sempit, dari situ berjalan darat melewati Palestina dan Suriah.¹⁰⁶

Selama abad ke-16 dan ke-17 itu selalu terjalin hubungan baik antara Aceh dengan Turki sehingga selalu terjadi pertukaran, baik dagang maupun diplomatik dan budaya. Kunjungan Aceh yang pertama ke Konstantinopel terjadi pada tahun 1562 M, yang dikirim oleh Sultan Ala Ad-din Riayat Syah Al Kahhar.¹⁰⁷ Selain itu, dalam *Hikayat Aceh* terdapat cerita panjang lebar tentang penyambutan perutusan Turki oleh

¹⁰⁴Said, *op.cit.*, hlm. 182.

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 182.

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm. 183.

¹⁰⁷Lombard, *op.cit.*, hlm. 169.

Sultan Iskandar Muda. Sebuah perutusan yang dipimpin oleh dua orang datang mencari kamper dan nafta yang diperlukan untuk obat.

Untuk memperoleh bantuan dari Kerajaan Islam terbesar pada waktu itu dalam rangka menghadapi Portugis pada tahun 1563 M sultan Aceh mengirim utusan ke kerajaan Turki. Utusan tersebut membawa serta hadiah-hadiah berharga dari sultan Aceh kepada penguasa kerajaan Turki. Hadiah-hadiah itu berupa emas, rempah-rempah, dan lada.

Selain memberikan hadiah, para utusan Aceh juga telah meyakinkan pihak Turki mengenai keuntungan yang akan diperoleh pihak Turki dari perdagangan rempah-rempah dan lada di Nusantara, apabila orang-orang Portugis dapat diusir dari Malaka oleh Aceh dengan bantuan Turki.¹⁰⁸ Perutusan Aceh itu dapat dikatakan berhasil karena keputusan Sultan Selim II Turki bertanggal 16 Rabiul Awal 975 atau 20 September 1567, yang berisi penyambutan positif atas permintaan sultan Aceh yang dibawa oleh wazirnya bernama Husin. Dari pertemuan itu, Sultan Selim II mengetahui betapa besarnya tekad kaum muslimin di kepulauan Nusantara untuk mengusir kafir Portugis. Akhirnya pihak Turki bersedia mengirim bantuan kepada Aceh, berupa dua buah kapal perang dan 500 orang tenaga berkebangsaan Turki untuk mengelola kapal-kapal itu. Di antara 500 orang Turki itu juga terdapat ahli-ahli militer yang mampu membuat kapal-kapal perang, baik ukuran besar maupun kecil dan meriam berukuran besar. Selain itu, pihak Turki juga memberikan sejumlah meriam berat beserta perlengkapannya.

¹⁰⁸C. R. Boxer, "A Note on Portuguese Reactions to the Revival the Red Sea Spice Trade and the Rice of Aceh 1540-1600", *International Conference on Asia History*, Paper no.2. Kuala Lumpur : Departement of history, University of Malaya, 5th-10th, August, 1968, hlm. 9.

perlengkapan militer kepada pihak Aceh.¹⁰⁹ Salah seorang Laksamana Turki, Kurt Oglu Hizir, disertai tugas memimpin ekspedisi tersebut dengan tugas khusus mengganyang musuh Aceh, mempertahankan agama Islam dan merampas benteng-benteng kafir Portugis.¹¹⁰

Di lain pihak, Portugis juga meningkatkan kegiatan-kegiatan dan manuvernya. Sekitar tahun 1554-1555 M armada Portugis mengendap terus di pintu masuk laut Merah khusus untuk menyergap kapal-kapal yang datang dari Gujarat dan Aceh. Namun, pengalaman Portugis menunjukkan tidak begitu berhasil mematahkan perlawanan Aceh. Lebih merepotkan lagi Portugis adalah karena di samping menghadapi Portugis di laut lepas, Aceh juga tidak henti-hentinya menyerang Malaka. Atau, seperti dikatakan oleh Couto, bahkan di tempat tidurnya pun Sultan Riayat Syah (Al Kahhar) tidak pernah diam untuk memikirkan pengganyangan Portugis.¹¹¹

Di samping bantuan militer yang diperoleh dari Turki, Aceh juga berusaha mendapatkan dari beberapa pemimpin kerajaan di Nusantara dan India namun Aceh hanya mendapatkan sekedar bantuan yang terbatas dari pemimpin Calicut dan Jepara.¹¹² Selain itu, dalam rangka mengenyahkan Portugis dari kawasan selat Malaka, Aceh juga menggunakan tentara-tentara sewaan yang terdiri atas orang-orang Gujarat, Malabar dan Abyssinia.¹¹³

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ Said, *op.cit.*, hlm, 199.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 200.

¹¹² Boxer, *op.cit.*, hlm. 9.

¹¹³ R.O. Winstedt, *A History of Malaya*, (Kuala Lumpur, Singapore : Marican & Sons, 1968) hlm. 79.

f. Perancis

Pada abad ke-17 ada tiga ekspedisi Perancis yang singgah di Aceh. Pertama dipimpin oleh Jenderal Frottet de la Bardeliere dengan kapalnya *Croissant* (400 ton) yang berangkat dari Saint Malo pada tanggal 18 Mei 1601 bersama kapal *Corbin* yang mencapai Sumatera melalui Ceylon dan Nikobar. Pada tanggal 26 Juli 1602, ia menghadap Sultan Ala Ad-din Riayat Syah al-Mukammil dan memperoleh izin untuk berdagang di Aceh. Empat bulan kemudian ia memberi perintah untuk berangkat karena menghindari kemungkinan penyitaan kapalnya yang sudah bermuatan setengah kapal barang dagangan. Kapal *Croissant* berhasil kembali ke laut Eropa, tetapi ditahan di laut pesisir Spanyol oleh kapal-kapal Belanda dan merampas muatannya pada tanggal 21 Mei 1603.¹¹⁴

Kapal Perancis kedua yang tiba ke Banda Aceh untuk berdagang adalah *Saint Louis*, kepunyaan *Montmorency*, sebuah perusahaan dagang yang mencakup pedagang Perancis dari daerah Vlaanderen. Kapal itu diperlengkapi di Brest pada tahun 1613 M dengan tujuan Hindia Timur, Arab, Hindia, Kerajaan Cina dan pulau-pulau di sekitarnya. Ada kemungkinan kapal itu singgah di Aceh karena Beaulieu menceritakan Sieur Reinaud dari Nantes yang berangkat bersama saudaranya dengan kapal-kapal *Tuan de Montmorency* mencapai Aceh untuk membeli batu-batu mulia.¹¹⁵

Ekspedisi ketiga dipimpin oleh Augustin de Beaulieu dengan menggunakan tiga kapal (*Montmorency*, *Esperance*, dan *Hermitage*) Laksamananya terpaksa menghadapi orang-orang Belanda yang sedang

¹¹⁴Lombard, *op.cit.*, hlm. 173.

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 173.

bermusuhan dengan mereka. Salah satu kapalnya dibakar oleh orang Belanda di pelabuhan Batavia dan satu lagi ditangkap bersama muatannya. Beaulieu pulang dengan satu kapal saja yang bermuatan lada dari Sumatera dan tiba di Le Havre pada tanggal 1 Desember 1622.¹¹⁶

g. Inggris

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa utusan Inggris pertama tiba di Aceh pada tanggal 5 Juni 1602. Sr James Lancaster, pemimpinnya, membawa surat dari Ratu Elizabeth kepada Sultan Ala Addin Riayat Syah al-Mukammil.¹¹⁷ Sultan Aceh menerima Lancaster dengan baik, atas permintaan Inggris, sultan Aceh membebaskannya dari pajak, hak tawanan karang, dan hak raja atas warisan.

Pada tahun 1613 M tiba utusan kedua di bawah pimpinan Thomas Best, yang membawa membicarakan perjanjian baru dengan Sultan Iskandar Muda. Dengan meninggalnya Sultan Ala Addin Riayat Syah al-Mukammil, perjanjian lama tidak berlaku lagi. Sultan Iskandar Muda menyambut Thomas Best dengan penuh persahabatan, menjamunya dengan berbagai perayaan dan menyediakan baginya jasa-jasa seorang Aceh terkemuka yang sudah pernah pergi ke Belanda pada tahun 1602 M.¹¹⁸

¹¹⁶Lombard, *op.cit.*, hlm. 174.

¹¹⁷Lancaster, *op.cit.*, hlm. 92.

¹¹⁸Lombard, *op.cit.*, hlm. 174.

Pada tahun 1615 M, Nicholas Downton datang ke Aceh untuk berdagang dan memenuhi kapalnya dengan muatan lada.¹¹⁹ Demikian juga pada tahun 1637 M Peter Mundy datang ke Aceh untuk membeli lada.¹²⁰ Selain itu, tentunya banyak juga pedagang Inggris lainnya yang melakukan hubungan dagang dengan Aceh. Pada tahun 1621 M, Beaulieu melihat pedagang-pedagang Inggris dengan muatan kain katun dan pada tahun 1637 M Mundy bertemu di Aceh dengan seorang Digby Penkeu off St Minver yang sudah beberapa tahun berdagang di Nusantara.¹²¹

h. Belanda

Pada waktu Lancaster tiba di Aceh tahun 1602 M, ia menemukan dua orang Belanda sedang belajar bahasa, dan masih pada tahun itu selain kedatangan kapal-kapal Belanda yang baru, ada utusan dari Aceh yang sudah tinggal beberapa waktu di negeri Belanda.

Mengenai kapal Belanda yang singgah untuk berdagang di Aceh selama periode awal di antaranya adalah rombongan kapal Cornelis de Houtman yang disewa oleh Balthasar de Moucheron. Mereka berangkat dengan dua buah kapal dari Zelandia tanggal 25 Maret 1598 dan tiba di Aceh pada tanggal 24 Juni 1599.¹²² Kemudian rombongan Jakob Wilkens dengan empat buah kapal berangkat dengan eskader milik Van Neck pada tanggal 21 Desember 1599 bersama Hans

¹¹⁹*The voyage of Nicholas Downton to the East-Indies, as recorded in contemporary narratives and letters*, Sir. W. Foster (ed), Hakluyt Soc., no. LXXXII. London, 1939.

¹²⁰Mundy, *op.cit.*, hlm. 330.

¹²¹*Ibid.*, hlm. 337.

¹²²Lombard, *op.cit.*, hlm. 176.

Decker dan tiba di Aceh pada tanggal 31 Juli 1600 (ketika Frederik de Houtman masih ditawan di Pedir). Ia membawa surat dari Pangeran Maurits van Nassau. Sultan Aceh meminta supaya ia datang ke istana, namun orang-orang Belanda itu kemudian menghilang. Selanjutnya, rombongan kapal Pouwels van Caerden, yang disewa oleh sebuah kompeni di Amsterdam, *Nieuwe Brabantse Compagnie*, satu kapal, *De Verenichde Provintie* tiba di Aceh pada tanggal 31 Desember 1600, dan kemudian berangkat meninggalkan Aceh pada tanggal 22 Januari 1601, setelah membeli lada di Aceh untuk pertama kalinya.¹²³ Rombongan kapal Cornelis Bastiaensz, yang disewa oleh *Verenigde Zeeuwse Compagnie* berjumlah empat buah kapal (*Zeelandia*, *Middelburch*, *Langebercke*, *Son*), bersama Gerard Leroy dan Laurens Bicker, mereka berangkat pada tanggal 28 Januari 1601 dan tiba di Aceh pada tanggal 23 Agustus 1601. Orang-orang *Zelandia* itu membawa surat dari Pangeran Maurits van Nassau untuk sultan Aceh. Mereka diterima dengan baik dan memperoleh izin agar dua dari mereka ditinggalkan dalam kantor dagang yang mereka namakan *Zeelant*. Rombongan kapal Jan Grenier dengan sebuah kapal, *Zwarte Leeuw*, tiba di Aceh pada tanggal 16 Desember 1601, namun tidak ada lada yang dapat ia beli. Mereka berangkat dari Aceh pada tanggal 18 Februari 1602 ke arah Tiku.¹²⁴ Rombongan kapal Joris van Spilbergen, yang disewa oleh Balthasar de Moucheron dengan tiga buah kapal (*Ram*, *Lam*, *Schaap*), berangkat tanggal 5 Mei 1601 dan tiba di Aceh pada tanggal 16 September 1602 lewat Ceylon. Di Aceh ia menemukan kumpulan kapal *Lancaster* yang tiba pada bulan Juni 1602 kemudian meninggalkan

¹²³J.E. Heeres, "Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum", *BKI* III (1907), hlm. 19.

¹²⁴Lombard, *op.cit.*, hlm. 177.

Aceh pada tanggal 3 April 1603. Rombongan kapal *Sebald de Weert*, yang disewa oleh *Verenigde Zeeuwse Compagnie* dengan dua buah kapal (*Vlissingen* dan *Der Goes*), berangkat dengan eskader W. Van Warwijck pada tanggal 31 Maret 1602 dan tiba di Aceh pada bulan Januari 1603.

Pyrard, menceritakan bahwa Belanda mempunyai kantor dagang di Aceh dan ketika Beaulieu mendarat orang Belanda menerimanya di loji mereka dengan segala kehormatan.¹²⁵ Sebuah perjanjian dagang yang lebih tegas antara Belanda dengan Aceh ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1607. Belanda diperbolehkan mendirikan kantor dagang yang dilindunginya sendiri. Namun, realisasi dari perjanjian itu tidak banyak dilakukan. Peristiwa-peristiwa dalam negeri dan perkembangan selanjutnya merupakan salah satu sebab.¹²⁶

Ketika Peter Mundy singgah di Aceh pada tahun 1637 M, orang Kristen yang ditemukan di Aceh hanya tiga orang Belanda yang baru saja diberi oleh raja rumah milik East India Company.¹²⁷ Pada tahun 1641 M, Nicholas de Graaff memberi keterangan lebih banyak mengenai perdagangan bangsanya. Pada waktu itu ada delapan orang Belanda di loji yang dipimpin oleh Jacob Compostel.¹²⁸

¹²⁵Beaulieu, *op.cit.*, hlm. 52.

¹²⁶Said, *op.cit.*, hlm. 243.

¹²⁷Mundy, *op.cit.*, hlm. 118.

¹²⁸Nicolas de Graaff, *Voyage de Nicolas de Graaf aux Inde Orientales et en d'autres lieux de l'Asie*, terjemaham Prancis, Amsterdam, 1719 ; nomor Perpustakaan Ecole des Langues Orientales : R. IX. 19., hlm. 22.

i. Amerika

Di antara pedagang Amerika yang datang berdagang ke Aceh ialah Jonathan Carnes, nahkoda kapal *Rajah*. Lada sebanyak 158.544 pon diangkutnya ke pelabuhan Salem pada bulan Oktober 1799 yang mendapatkan keuntungan 700 persen. Untuk ekspor dari Amerika sendiri atau dari pelabuhan lain kebanyakan didatangkan barang-barang yang tidak dibutuhkan langsung oleh rakyat, bahkan meracuni rakyat, seperti brandy, gin, candu, tembakau, di samping senjata api atau besi. Kapal-kapal Amerika yang menuju pantai Aceh sekaligus mendatangi pelbagai pelabuhan di Nusantara. Di Sumatera, pedagang Amerika menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di pantai barat dan selatan Aceh, terutama untuk membeli lada. Pelabuhan-pelabuhan yang dikunjungi itu antara lain Meulaboh, Tapaktuan, Trumon, dan Singkil. Adapula pelabuhan-pelabuhan yang didatangi langsung seperti Rigaih, Meukek, Labuhanhaji, Kuala Batu, Susoh, Asahan dan lain-lain. Hasil-hasil bumi yang diekspor dari Aceh, selain lada, adalah kapur barus, belerang, kemenyan, kayu manis, juhar, emas, dan lain-lain.¹²⁹

Perlombaan sengit dalam perdagangan terjadi semenjak masa peralihan abad ke-18-19, tidak hanya antara kapal-kapal yang berlainan bendera, melainkan juga sesama kapal Amerika. Dengan adanya persaingan itu, kapal-kapal umumnya datang dengan mempersenjatai diri. Kesulitan yang dihadapi oleh pedagang Aceh adalah pembeli yang berupa paksaan, terutama apabila pemilik-pemilik kapal mengetahui bahwa barang-barang impor yang mereka bawa menarik selera bagi raja dan masyarakat setempat untuk memilikinya.

¹²⁹Said, *op.cit.*, hlm. 509.

Menurut Ducan, selama masa suksesnya perdagangan lada orang Amerika tidak kurang setengah juta dollar dalam setahun uang cukai dari hasil bumi Sumatera yang dibawa masuk oleh kapal-kapal Amerika mengalir ke kas pemerintah Amerika hanya dari satu pelabuhan Salem (Boston).¹³⁰ William Bantley menyebutkan tentang keberhasilan nahkoda Jonathan Carnes masa kembalinya yang pertama dari pantai barat Aceh. Ia membawa barang-barang berharga yang belum pernah dikenal di Amerika yang diperlihatkannya sendiri kepada Bentley, antara lain kepah besar (tiram), gading gajah dengan belainya, kotak emas yang diukir, dan sebagainya.¹³¹

Keberhasilan pedagang-pedagang Amerika yang datang ke pantai barat dan selatan Aceh ditandai dengan dibukanya cabang kantor perdagangan mereka di Meulaboh yang bernama Firma A. Gardner & Co, berkantor pusat di Boston. Kantor itu ternyata ingin menguasai semua produksi dari kawasan barat Aceh dengan harga semurah mungkin dan menjualnya dengan harga yang setinggi mungkin.¹³²

Berbagai cara mereka lakukan untuk menghasilkan pembelian murah itu. Kemarahan tentu akan timbul apabila persetujuan jual-beli tidak tercapai, sedangkan yang paling merasa dirugikan adalah penduduk yang tadinya berharap dapat menjual barang dagangan dengan harga yang mahal. Selain itu, sumber-sumber dari pihak pedagang luar senantiasa menceritakan bahwa pedagang-pedagang Aceh adalah orang yang curang. Di lain pihak, ternyata pedagang-

¹³⁰James Duncan Phillips, "Salem and the Indies", *The Story of the Great Commercial Era of the City*, Cambridge, 1847.

¹³¹Said, *op.cit.*, hlm. 511.

¹³²*Ibid.*, hlm 513.

pedagang Amerika, seperti yang disebutkan oleh Punam bahwa kegiatan perdagangan Amerika sesudah revolusi Amerika antara Salem dengan Sumatera ditempuh secara sukacita dengan penuh derita, malapetaka, tapi juga dengan memperoleh kemakmuran yang luar biasa.¹³³

Begitu berhasratnya pedagang Amerika sehingga sesama mereka saling memperebutkan hasil bumi di Sumatera. Hal itu, seperti dikesankan oleh salah seorang nahkoda kapal *Active* pada tahun 1801 M, keserakahan nahkoda Briggs dari Amerika. Ia menyebutkan bahwa segala jalan ditempuh oleh Briggs untuk menghindari agar Nicols tidak mendapatkan lada. Ia mengungkapkan bagaimana ia berusaha membujuk Briggs supaya bekerjasama, namun ditolak oleh Briggs.¹³⁴

Pedagang Amerika tampaknya sangat bangga dan tertarik dengan keberhasilan perdagangan lada dan lainnya dengan Sumatera (Acch), sehingga perhatian mereka semenjak menjelang abad XX dan seterusnya sangat besar untuk mendengarkan cerita-cerita maupun kesan-kesan para pedagangnya. Cerita tentang pengalaman Endicott yang sudah dibukukan sangat menarik bagi penduduk Amerika. Setelah sekitar 25 tahun tragedi Kuala Batu (1831 M), Endicott berceramah di depan Essex Institute. Pada permulaan ceramah ia memperkenalkan tentang orang Aceh, suku bangsa, masa lampau, adat-istiadat dan sifat-sifat khusus orang Aceh. Juga dipaparkan peristiwa-peristiwa yang seringkali dialami oleh orang Aceh dari penipuan-penipuan yang

¹³³George Graville Putnam, *Salem Vassels and their voyages*, (The Essex Institute, 1922), hlm. 1.

¹³⁴*Ibid.*

dilakukan oleh saudagar-saudagar asing, yang segera pergi setelah memuat lada ke kapalnya tanpa membayar kepada si penjual.¹³⁵

Endicott juga mengisahkan tentang kenapa kapal *Friendship* mengalami bajakan. *Friendship* yang dinahkodai berawak kapal 17 orang tiba di Kuala Batu (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya) 22 September 1830. Pada mulanya ia sudah berhasil memuat, lada namun untuk memenuhi secara penuh harus menunggu panen lada berikutnya yang jatuh pada bulan Maret atau Juni. Untuk itu pada akhir Januari 1831 mereka pindah ke pulau Kid, sekitar 2 mil dari Kuala Batu sambil menunggu panen lada. Namun, tiba-tiba pada tengah malam Endicott menyebutkan ada perahu penduduk hendak merapat, kesiagaan segera diperintahkan. Tatkala ditanya dalam bahasa Melayu siapa orang diperahu itu, diperoleh jawaban bahwa mereka adalah teman dari Kuala Batu, yang ingin menyeludupkan lada ke kapal itu. Dalam kesiagaan yang cukup Endicott menyambut baik maksud itu dan berhasil dimuat ke kapal sejumlah 50 hingga 60 karung lada.¹³⁶

Penjelasan Endicott itu dapat diartikan bahwa ia sendiri telah turut ambil bagian menjalankan perdagangan terlarang tanpa memikirkan orang-orang yang sebenarnya berhak atau yang dirugikan atas barang yang diseludupkan itu. Ia tidak menceritakan sebab-musabab mengapa pedagang Aceh menyerang kapal *Friendship* pada tanggal 7 Februari 1831 tersebut. Beberapa hari setelah pengapalan lada seludupa 50 hingga 60 karung itu, datang perutusan pihak penjual kepadanya untuk memberitahu bahwa lada sudah tersedia di Kuala Batu. Ia dipersilakan untuk datang ke sana. Disebutkan bahwa setiap hari

¹³⁵*Ibid.*, hlm. 70.

¹³⁶*Ibid.*, hlm. 72.

dapat dimuat ke kapal sekitar 100 hingga 200 karung lada. Untuk kesiagaan menghadapi pelaksanaan transaksi itu, Endicott menginstruksikan kepada bawahannya agar membeli lada dengan harga yang sangat murah dan hanya dibolehkan untuk dua orang saja yang naik ke kapal, selain itu tidak boleh satupun perahu yang mendekati ke kapal. Namun, datang Po Adam (teman Endicott), orang terkemuka Aceh yang tinggal di Pulo Kayu, bersamanya lalu naik ke bot kapal untuk pergi ke pelabuhan. Ketika di bot, Po Adam berkata kepada Endicott untuk mewaspadaikan orang-orang Melayu. Ketika sampai di pantai, seseorang menyambutnya dengan ramah dan bersama-sama pergi ke pekan (pasar).

Karena pengangkutan lada ke perahu sangat lambat, hingga petang hari baru sebuah perahu yang bermuatan lada siap akan ke kapal. Akibat kerja sangat lambat, Endicott dan teman-temannya terpaksa masih berada di darat. Ketika mereka masih di darat itulah terjadi penyerangan ke kapal *Frienship*. Para awak kapal memperhatikan bahwa ketika perahu yang membawa lada merapat terlihat orang-orang dari perahu lada yang tidak pernah mereka kenal, berpakaian rapi, menyandang keris berhulu gading. Tidak ada kecurigaan, semuanya dibenarkan naik ke kapal, yang tinggal di perahu hanya orang-orang yang akan melonjakkan karung lada. Seorang awak kapal yang menjadi penyambut karung lada ditegur orang pendatang itu supaya menjalankan kewajibannya saja. Cheter, seorang awak kapal yang bertanya dengan isyarat tangan kenapa ramai-ramai naik ke kapal, segera ditusuk dengan keris, lalu tewas. Rombongan penyerang ternyata sudah mengatur siasat, dua orang yang naik ke kapal segera mengejar perwira pertama, Knight. Ia ditusuk dengan keris, demikian juga dengan awak kapal yang lain. Ada yang berusaha membela diri dengan mengambil senjata ke kabin kapal, namun di kabin sudah dijaga oleh pihak penyerang. Awak

kapal yang terkejut dan merasa tidak mungkin melawan langsung melompat ke laut dan menyelamatkan diri. Segera kapal berhasil dikuasai penyerang. Mereka yang di darat terus lari ke hutan hingga beberapa hari di hutan dan pada malam harinya mereka mencari rumah Po Adam di Pulau Kayu untuk mendapatkan pertolongan dan makanan. Dalam peristiwa itu dikabarkan lima orang tewas.¹³⁷

Setibanya kembali kapal *Friendship* ke Amerika, masyarakat menuntut pembalasan. Putusan presiden Amerika Serikat Jenderal Andrew Jackson memerintahkan hukuman berat terhadap penduduk Kuala Batu. Departemen Angkatan Laut Amerika menyerukan hantaman jahanam-jahanam dengan bogem raksasa. Segera bertolak sebuah kapal perang yang bernama *Potomac* dengan komandan ekspedisi John Dowes dibantu oleh komandan dua, Shubrick, dan beberapa perwira tinggi laut, yaitu Pinkham, Edson Ferret, Ingersol, Hoff, dan lain-lain. Sebagai petunjuk jalan disertakan Barry perwira kedua kapal *Friendship* yang pernah pergi ke Kuala Batu. Kapal *Potomac* tiba di perairan Kuala Batu, berlabuh sekitar 5 mil jauh dari pantai. Untuk mengetahui situasi di Kuala Batu, diturunkan tim di bawah pimpinan komandan kedua Shubrick karena diperhitungkan akan adanya rombongan pendaratan ini mendapat instruksi siap tempur. Raja dan hulubalang yang berwenang menolak syarat-syarat yang diajukan oleh rombongan kapal *Potomac*. Syarat dimaksud adalah menuntut pertanggungjawaban dan menyerahkan penyerang semuanya untuk ditembak mati di kapal atau setelah dibawa ke Amerika.

Mereka kemudian turun semuanya dengan berpakaian sipil, lalu memberi tahu maksud kedatangan mereka untuk membeli lada.

¹³⁷Said, *op.cit.*, hlm. 523.

Kapal perang akan segera bertindak dan tentara laut akan didaratkan begitu ultimatum tidak dipenuhi. Sebelumnya penduduk Kuala Batu sudah memperhitungkan akan ada pembalasan. Karena itu, setiap datang kapal Amerika selalu mereka curigai, apalagi ketika itu mereka tidak mengenal orang-orang yang mendarat, kecuali Barry yang sudah biasa ke Aceh. Rombongan kapal turun dari kapal tengah malam. Informasi yang mereka peroleh cukup lengkap, di antaranya ada beberapa benteng terdapat di Kuala Batu, yang dipimpin oleh panglimanya masing-masing.¹³⁸

Di darat penduduk Kuala Batu ternyata juga sudah mempersiapkan kemungkinan serangan balasan itu, sehingga ketika pasukan Amerika mendarat dengan bot-bot kecil, langsung saja diserbu dengan meriam oleh penduduk Kuala Batu. Pihak Amerika yang dipimpin perwira Hoff juga memerintahkan penyerbuan ke benteng, disusul oleh perwira Pinkham dan Edson, sehingga dalam tempo singkat terjadi perang total. Setelah terjadi peperangan yang melelahkan, akhirnya penduduk Kuala Batu menjadi kewalahan membendung serangan pasukan Amerika, sehingga mereka mengundurkan diri. Pasukan Amerika lantas membakar perkampungan yang ditinggalkan penduduk dan menghujannya dengan tembakan-tembakan senjata berat. Komandor Downer segera melaporkan peristiwa itu ke konsul Amerika di Batavia, selanjutnya konsul Amerika menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Amerika, Edward Livingstone.¹³⁹

¹³⁸*Ibid.*, hlm. 525.

¹³⁹*Ibid.*, hlm. 531.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Kontak perdagangan Aceh dengan bangsa luar sudah lebih awal terjadi. Catatan J. C. Van Leur (1983) menunjukkan bagaimana Aceh telah menjadi bagian penting dari suatu jaringan perdagangan antarpulau dan antarnegara. Salah satu keunggulan potensi wilayah Aceh bagi perdagangan internasional sepanjang sejarah adalah adanya pengaruh geografis yang strategis, yakni letak wilayah Aceh yang berada pada posisi yang mudah dijangkau. Faktor itu berpengaruh besar terhadap berbagai kemudahan bagi para pedagang luar untuk berdagang ke Aceh, sehingga Banda Aceh menjadi pusat perdagangan internasional.

Masuknya kekuasaan Belanda ke Aceh pada abad ke-19 menyebabkan munculnya berbagai kota sebagai pusat administrasi kolonial dan kegiatan ekonomi. Apabila dibandingkan dengan masa prakolonial, Kutaraja (Banda Aceh) yang dikenal dengan sebutan Bandar Aceh Darussalam sebagai pusat kerajaan. Kedudukannya tidak jauh berbeda karena pada masa kolonial yang juga menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda untuk daerah Aceh.

Pada masa kesultanan Aceh, terutama pada masa kuatnya pemerintah pusat, pelabuhan Bandar Aceh Darussalam merupakan satu-satunya pelabuhan ekspor untuk daerah Aceh. Para pedagang asing tidak dibenarkan berhubungan langsung dengan para uleebalang setempat di luar Bandar Aceh, apalagi dengan rakyat biasa, sebelum mendapat izin dari sultan Aceh.

Bandar Aceh dapat diidentikkan sebagai pusat kerajaan yang dihuni oleh sejumlah pejabat pemerintahan kerajaan beserta rakyat yang berdiam di

sekitarnya, atau pusat-pusat pemerintahan kenegerian yang berada di bawah kekuasaan pusat yang mempunyai ciri lain, yaitu sebagai bandar atau pelabuhan tempat impor-ekspor berlangsung. Pusat kerajaan atau pusat pemerintahan dapat terjadi sekaligus sebagai bandar atau pelabuhan.

Sulit dipisahkan antara pejabat pemerintahan yang secara murni melakukan tugasnya hanya dalam bidang pemerintahan saja dengan para pedagang bebas yang semata-mata berusaha dalam bidang perdagangan saja. Hal itu didasarkan pada kenyataan yang sering dijumpai pada waktu itu para penguasa sebagian besar juga aktif dalam bidang perdagangan. Berhubung perdagangan berada pada tangan para penguasa maka para pedagang asing jarang dapat berhubungan langsung dengan penduduk setempat dalam transaksi perdagangan. Apabila mereka mempunyai tempat-tempat tinggal yang kelihatan permanen pada sekitar pelabuhan, dapat diartikan sebagai tempat tinggal sementara dalam menunggu tersedianya barang-barang yang mereka butuhkan untuk angkutan kapal atau perahu mereka, atau menunggu habis terjualnya barang bawaan mereka. Dengan demikian, kota mempunyai ciri yang sederhana, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan berada pada tangan penguasa, dan jarang terjadinya hubungan perdagangan antara pedagang asing dengan penduduk setempat. Di samping sebagai pusat pemerintahan, ibu kota juga merupakan tempat pengumpulan komoditas ekspor yang berasal dari pedalaman dan sebagai tempat masuknya barang-barang kebutuhan penduduk dan seluruh jaringan perdagangan itu berada dalam kekuasaan penguasa.

Selanjutnya, dapat disimpulkan juga dari pengalaman Banda Aceh dalam perniagaan bahwa adanya pertautan yang erat antara kegiatan perniagaan dengan politik. Kejayaan kota itu sebagai salah satu pusat perniagaan di kawasan barat Nusantara pada permulaan pertama abad ke-17 hendaklah dilihat dalam konteks kemampuan sultan untuk menjadikan

Penutup

Banda Aceh sebagai pusat kekuasaan pada waktu itu. Ketika kekuasaan sultan merosot, posisi Banda Aceh sebagai *entrepot* itu bukan saja diambil alih oleh pusat-pusat baru, seperti Penang dan Singapura, dengan fasilitas infrastruktur modern yang dibangun oleh pemerintah kolonial, melainkan juga Banda Aceh terpaksa berbagi kegiatan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan lain yang muncul di pantai barat dan utara Aceh. Demikian pula era pelabuhan bebas Sabang yang telah menghidupkan kegiatan perdagangan di Kota Banda Aceh harus juga dilihat dalam kerangka pertautan politik dengan dunia dagang.

Kegiatan perniagaan pada waktu itu tampaknya bertumpu atau bersumbu pada istana. Artinya, ia berfungsi untuk mensuplai barang mewah atau konsumsi bagi keperluan istana dan perangkatnya serta sekaligus bagi menghidupi istana melalui berbagai bentuk bea atau pungutan (*adat cap* atau *lapik*) yang dikenakan oleh Sultan. Karenanya pelaku-pelaku dalam kegiatan perniagaan itu - kecuali pedagang asing - adalah pejabat-pejabat kerajaan atau kaum bangsawan, sementara sebagian besar penduduk lainnya tetap terserap dalam kegiatan pertanian tradisional yang hampir bersifat swasembada.

Apabila disimak pertumbuhan dan perkembangan Kota Banda Aceh dalam siklus perniagaan internasional, kita dikesankan oleh kurangnya perubahan yang bersifat kualitatif dalam struktur perniagaan. Walaupun ada, perubahan itu lebih bersifat pengrumitan atau variasi bentuk permukaan dari elemen-elemen perniagaan itu dalam upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar atau waktu. Perubahan itu belum begitu menyentuh hal-hal yang bersifat substansial, sebagaimana disaksikan pada pelaku ekonomi, jenis komoditas impor-ekspor, dan manajemen pengelolaan.

Para pedagang atau pengusaha mempunyai status sosial tertentu karena potensinya yang dapat meningkatkan pendapatan kerajaan. Mereka menonjol dalam sistem pelapisan sosial sebagai akibat dari

Penutup

peranannya dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Pada waktu itu, usaha-usaha perdagangan sepenuhnya dikuasai oleh sultan, sedangkan para uleebalang dan para pedagang lainnya hanya diizinkan berdagang sebagai pedagang perantara, antara sultan dengan pedagang asing.

Sultan sebagai penguasa pemerintahan menjalankan sistem monopoli perdagangan, sehingga terjadi pembatasan terhadap aktivitas perdagangan para kelompok pedagang yang berkedudukan pada tingkat kenegerian, yang pada umumnya didominasi oleh para uleebalang. Para uleebalang sebagai pemimpin kenegerian dan juga sekaligus sebagai pedagang dalam kerajaan Aceh tidak memperoleh kebebasan untuk mengadakan perdagangan secara langsung dengan pedagang asing. Para pedagang diwajibkan untuk memasukkan semua komoditas ekspor ke pusat kesultanan, setelah itu komoditas tersebut baru diekspor ke luar negeri. Oleh karena itu, pedagang pada tingkat kenegerian tidak berkembang secara optimal. Hal itu pula yang menyebabkan para uleebalang dan kelompok pedagang pada tingkat kenegerian berusaha menentang kekuasaan sultan pada waktu-waktu yang memungkinkan.

Sultan Aceh mendominasi usaha perdagangan secara intensif pada akhir abad ke-16 hingga permulaan abad ke-17, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Alkahhar dan Iskandar Muda. Dominasi Sultan Iskandar Muda dalam bidang perdagangan karena berkuasa penuh dalam bidang politik dan militer, sehingga berhasil dalam bidang ekonomi.

Bandar Aceh Darussalam sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Aceh adalah salah satu Bandar perdagangan yang ramai semenjak abad ke-16. Berbeda dengan Malaka pada periode sebelumnya yang hanya mengambil keuntungan dari fungsinya sebagai pelabuhan transit saja,

Bandar Aceh justru menggabungkan kedua unsur, baik sebagai pelabuhan transito maupun daerah agraris penghasil berbagai hasil bumi yang berasal dari daerah pedalaman.

Berbagai hasil bumi dari daerah pedalaman bahkan dari daerah-daerah *uleebalang* harus diangkut terlebih dahulu ke pusat pemerintahan di Bandar Aceh Darussalam. Hal itu karena pengaruh pemerintahan pusat sangat kuat. Pedagang asing yang melakukan perdagangan dengan Aceh harus melalui pemerintah pusat di Banda Aceh. Ketika pemerintahan pusat dalam keadaan lemah, berbagai pelabuhan kecil di sepanjang pantai barat dan utara Aceh melakukan transaksi perdagangan dengan pedagang asing tanpa mengindahkan kekuasaan pusat (sultan).

Perkembangan Kesultanan Aceh semenjak awal abad ke-16 menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perdagangan dengan kekuasaan negara, bahkan perdagangan itu sendiri merupakan basis kekuasaan politik. Apabila kekuasaan pusat berhasil melakukan monopoli perdagangan berarti pula berhasil menguasai kekuasaan politik yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan ekonomi. Dengan demikian, keadaan politik dalam negeri sangat menentukan bagi perkembangan perdagangan.

B. Saran

Satu pernyataan yang menarik untuk dijawab pada akhir tulisan ini adalah: bagaimana prospek kota Banda Aceh dalam perniagaan internasional pada masa kini dan mendatang? Memang sukar untuk menjawab pertanyaan ini. Namun bagaimanapun, faktor *hinterland*, faktor perkembangan pasar dunia, faktor politik, dan faktor perbaikan kualitas struktur perniagaan merupakan variabel-variabel yang saling tumpang tindih dalam menentukan posisi kota Banda

Penutup

Aceh pada hari-hari mendatang sebagai salah satu mata rantai perniagaan di jalur Selat Malaka. Semua faktor itu harus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman demi terciptanya Banda Aceh sebagai pusat perdagangan di kawasan barat Nusantara. Demikian juga dengan barang dagangan harus ditingkatkan dan dikembangkan di setiap daerah, sehingga selain menjadi pusat perdagangan, Banda Aceh juga sebagai pusat penghasil bahan ekspor yang bertaraf internasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Zakaria. *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520-1675*. Medan : Manora, 1972.
- *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta : Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek ISDN, 1982/1983.
- Alfian, T. Ibrahim. *Mata Uang Kerajaan-Kerajaan di Aceh*. Banda Aceh : Museum Aceh, 1986.
- *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Hasil-hasil Penelitian dengan Metode Grounded Research, Jakarta L: P3ES, 1977.
- Anderson, John. *Acheen and the ports on the North and Eastcoasts of Sumatra*. London : Allen, 1840.
- Bathuthah, Ibnu. *Rihlah Ibnu Bathuthah*. Ed. By Abd. Al-Hali al-Tazi, vol. 4. Rabat : Akadimiyyah al Mamlakah al-Maghribiyyah, 1997.
- Beaulieu, Augustin de. "Journal d' Augustin de Beulieu" dalam Thevenot, *Collection de de divers voyages curieux, qui n'ont point ete publiees ou qui ont ete traduites d'Hacluyt, de Purchas et d'autres voyageurs, anglois, hollandais, portugais, allemands, espagnols et de quelques persan, arabes et autres orientaux*. Paris : Cramoisy, Paris 1664-6.
- Boxer, C.R. "A Note on Portuguese reaction to the revival of the Red Sea Spice trade and the rise of Aceh 1540-1600". *JSEAH* 10,3 (1969).
- Branddel, T. "On the History of Acheen", *JIAEA*, vol. V. Singapore : 1851.

Daftar Kepustakaan

- Ibrahim, Muhammad, (ed). *Sejarah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta : Depdikbud, 1977/1978.
- Casparis, J.G. De. *Perkembangan Pengetahuan Sejarah Indonesia Lama*, terjemahan Said Raksakusumah. Bandung : Tetai, 1961.
- Cowan , C.D. "Early Penang and the Rise of Singapore". *JMBRAS* 23, Part 2 (1950).
- Dampier, Guillaume. *Suplement du voyage autour du monde (contenant une description d'Achin, ville de Sumatra, du royaume de Tonquin et autres places des Indes et de la Baye de Campeche, enrichi de cartes et figures*. Rouen : J.B. Machuel, 1723.
- Dasgupta, A.K.,. *Aceh in Indonesia Trade and Politic ; 1600-1641*, unpublished Ph. D, Thesis (Cornel University, 1962).
- Djajadiningrat, R. Hoesein " Critisch Overzicht van de in Maleische Werken Vervatte Gegevers oever Geschiedenis van het Sultanaat van Atjeh", *BKI*, 65, (1911).
- Dari Sini Ia Bersemi*. Banda Aceh : Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Nasional ke-12 Tahun 1981.
- Drewes, G. W. J. *Hikayat Pocut Muhammad*. The Hague : Martinus Nijhoff, 1979.
- Ferrand, G. *Relations de voyages et Textes Geographiques Arabes, Person et Turcr Relatifs a L'Extreme Orient du VIIIe au XVIIIe s., trad., Revue et Annotee*. Paris : Leroux, 1913.
- Gerlach, A.J.A. "Leestafel", H. Yule, "On North Sumatra and Especially Achin", *BKI*, VIII (1873).

Daftar Keputakaan

- Graaff, Nicolaus de. *Voyage de Nicolaus de Graaff aux Indes Orientales et end'autres Lieux de l'Asie*. Amsterdam, J. Fred. Bernard, 1719.
- Groeneveldt, W.P. *Historical Notes on Indonesia Malaya Complied from Chines Sources*. Jakarta : CV. Brata, 1960.
- "Notes on the Malay Archipelago and Malacca Compiled from Chinese Sources". *VBG* Vol. 39 bag.1 (1887).
- Hasjmy, Ali. *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta : Penerbit Beuna, 1983.
- Heeres, J. E. "Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum", *BKI* III (1907).
- Iskandar, T. *De Hikayat Atjeh*. s-Gravenhage : N.V. De Nederlandsche Boek en Steendrukkerij V.H.H.L. Smits, 1959.
- Ismail, M. Gade. "Seuneubok Lada". disertasi belum diterbitkan, Leiden, 1991.
- Jacobs, Julius. *Het Familie en Kampongleven op Groot Atjeh*. Leiden : E. I. Brill, 1894.
- Kam Hing, Lee. *The Sultanate of Aceh : Relation With the British 1760-1824*. Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1995.
- Kreemer, J. *Atjeh*. Laeiden : E.J. Brill, 1923.
- Kleck, E.S. De. "De Atjeh Oorlog" Vol. I. s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1912.
- Kreskamp, H. *De Weskust en Minangkabau*, (Utrecht : Scotanus & Jens, 1931.

Daftar Kepustakaan

- Krom, Nj. *Zaman Hindu*, terjemahan Arif Effendi. Jakarta : PT. Pembangunan, 1956.
- Kumar, Dasgupta Arum. "Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641". Unpublished Ph. D. Thesis, Cornell University, 1962.
- Lancaster, Sir James. *The voyages of Sir James Lancaster to Brazil and the East Indies 1591-1603*. London : The Hakluyt Society.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda*. terjemahan Arifin Winarsih. Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- Marsden, William. *The History of Sumatra*. Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1975.
- Mundy, Peter. *The Travels of Peter Mundy in England, Westrn India, Achen, Macao and the Canton Province 1634-1637*. London : Hakluyt Society, 1919.
- Nash, J.M. Manning. *Primitive and Peasant Economic Syatem*. (San Fransisco : Chandler Publishing Company, 1966.
- "The Indonesian City : Studies in Urban Development and Planning", *VKI*, 117. Foris Publication, 1986.
- Pannikar, K.M. *Asia and Western Dominance*. London Allen & Unwin Ltd., 1955.
- Pires, Tome. *The Suma Oriental of Tome Pires*. Vol. 1 and 2. London : The Hakluyt Society, 1884.
- Reid, Antony. *The Contest for North Sumatra. Atjeh, the Nederlands and Britain 1858 – 1898*. Kuala Lumpur :: Oxford University Press, 1969.
- *Southeast Asia in the Age of Commerce*. New Haven: Yale University Press, , 1993.

Daftar Keputakaan

- Said, Muhammad. *Aceh Sepanjang Abad*, I. Medan : Waspada Medan, 1980.
- Sufi, Rusdi. *Pahlawan Nasional Sultan Iskandar Muda*. Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2003.
- Syamsudin, T. dkk. *Adat-istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh : P2NB Daerah Istimewa Aceh, 1978.
- Schrieke, B.J.O. *Indonesia Sociological Studies I*. Bandung : Sumur Bandung, 1960.
- Tarling Nicholas. "British Policy in the Malay Peninsula and Archipelago, 1824-1871". *JMBRAS* 30. Part 3 (1957).
- The Suma Oriental of Tome Pires*, Edisi Bahasa Inggris diedit oleh Armando Cortesio, vol. 1. The Hakluyt Society, 1944.
- Tichelman, *De Indische Gids*, 61. Amsterdam : N.V. Drukkerij Ingervery, 1939.
- Tiele, P.A. "De Europeers in de Malaesche Archipel", *BKI*, 35 (1886).
- "De Europeers in de Maleische Archipel" *BKI* 36 (1877).
- Tjandrasasmita, Uka (ed). *Sejarah Nasional Indonesia* jilid II. Jakarta : Depdikbud, 1981/1982.
- van Dam, Pieter. *Beschrijving van de Oost-Indische Compagnie*, deel I. s'Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1923.
- Van Langen, K.F.H. "De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur Onder Het Sultanaat", *BKI* 37 (1888).
- Van Leur, J.C. *Indonesian Trade and Society: Essay in Asian Social and Economic History*. The Hague-Bandung, 1955.

Daftar Kepustakaan

- Veth, P.J. *Atchin en Zijne Betrekkingen tot Nederland*. Leiden : Geralth Kolff, 1887.
- Veth, P.J. *Atchin en zijner betrekkingen tot Nederland*. Leiden : Geralth Kolff, 1887.
- Vlekke, Bernard H.M. *Nusantara A History of Indonesia*. 's-Gravenhage : N.V. Uitverij W. Hoeve, 1959.
- Winstedt, R.O. *A History of Malaya*. Kuala Lumpur, Singapore : Marican & Sons, 1968.
- Zuhdi, Susanto, (peny.). *Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra*. Jakarta : Depdikbud, 1997.

Lampiran 1

Nilai Ekspor Aceh ke Penang (dalam Dollar Spayol) Tahun 1810/11-1822/23

Tahun	Nilai
1810/11	216,558
1811/12	118,282
1812/13	143,597
1813/14	223,935
1814/15	150,602
1815/16	181,530
1816/17	125,613
1817/18	122,555
1818/19	106,296
1819/20	166,714
1820/21	164,879
1821/22	175,992
1822/23	193,972

Lee Kam Hing, *The Sultanate of Aceh : Relation with the British, 1760-1824*, Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1995, hlm. 249.

Lampiran 2

Aceh mengekspor lada ke Penang Tahun 1814/15-1822/23

Tahun	Pantai Timur (pikul)	Pantai Barat (pikul)	Jumlah (pikul)	Nilai (Dollar Spayol)
1814/15	2,846.99	18,798.49	21,645.48	118,163.00
1815/16	2,404.03	19,723.71	22,127.74	151,284.00
1816/17	1,748.00	9,534.87	11,272.87	88,803.60
1817/18	1,861.35	11,564.77	13,486.12	106,809.60
1818/19	5,514.39	2,957.73	8,572.12	79,640.15
1819/20	8,205.62	13,433.95	21,639.57	180,825.00
1820/21	15,667.14	15,988.72	31,655.86	290,486.55
1821/22	21,790.40	14,670.02	36,213.42	278,539.10
1822/23	30,277.51	8,373.48	38,650.99	303,290.56

Sumber : Kam Hing, hlm. 250

Lampiran 3

Aceh Mengekspor Pinang ke Penang Tahun 1810/11-1822/23

Tahun	Jumlah (pikul)	Nilai (dalam Dollar Spayol)
1810/11	23,164	46,328
1811/12	5,530	11,060
1812/13	7,290	14,580
1813/14	38,420	76,840
1814/15	42,486	84,972
1815/16	36,255	72,310
1816/17	21,347	42,697
1817/18	7,163	27,163
1818/19	31,250	39,062
1819/20	24,810	43,417
1820/21	36,890	38,612
1821/22	29,141	-
1822/23	38,155	57,232

Sumber : Kam Hing, hlm. 251.

Ekspor Aceh ke Penang tahun 1868-1873

Tahun	Lada		Pinang	
	Jumlah (pikul)	Harga per pikul	Jumlah (pikul)	Harga per pikul
1868	114.400	\$ 5,2	79.000	\$ 1,9
1869	113.900	6,8	93.700	1,7
1870	141.200	8,2	84.700	1,4
1871	170.900	13,5	82.800	1,5
1872	141.900	1,6	50.400	2,5
1873	105.700	13,5	42.500	3,3

Angka-angka itu mencakup seluruh Sumatera tetapi hampir seluruh lada dan pinang berasal dari Aceh.

Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra Acheh, the Netherlands and Britain 1858-1898*, Malaya : Oxford University Press, 1969.

Lampiran 4

Acehnese Commercial Regulations, May 1814

1st. That, without a special license, no vessel of whatever description shall be permitted to trade at any of the ports of His Majesty's dominions, saving that of Acheen [Banda Aceh], and during the continuance of the westerly monsoon, at Telusamoy; but at the latter they are permitted only to deal in betelnut, rice, and paddy; any person offending against this regulation will incur such fine as his Majesty may be pleased to impose.

2nd. The master of any vessel, the property of an European or Christian, visiting the port of Acheen, is required to present to His Majesty an offering of one piece of broad cloth, and a barrel of gunpowder. If such person reside on shore, he will be provided with meat, ghee, and rice.

3rd. Any person landing goods at the port of Acheen, and having them marked with the seal of His Majesty, in token of the royal dues arising from them having been levied, may dispose of such goods wherever he may please, having a house for that purpose, excepting the article of opium, which is permitted to be sold by His Majesty alone.

4th. That goods shall yield a duty of six and a quarter per cent, viz. goods imported in prows from Pinang or Malacca, shall pay three dollars and a half per cent. The duty charged on tobacco is three mayain on each bahar.

5th. Any person importing gunpowder, saltpetre, or fire-arms, without giving notice thereof to the proper officer appointed by His Majesty to take cognizance of the same, shall forfeit the articles thus clandestinely imported, and of which His Majesty in all cases reserve to himself the exclusive monopoly.

6th. The duties of anchorage are as follows, viz. for a ship, sixty dollars; for a brig, forty dollars; and a sloop or one-masted vessel, twenty dollars.

7th. No vessel touching for water, or to supply any such want, shall be subjected to any charge.

8th. His Majesty reserves to himself the exclusive monopoly of salt.

9th. The duty on betelnut is established at ten per cent.

0th. It is ordered by His Majesty, that all vessels, laden with pepper or any other merchandize coming to Acheen, shall pay a duty to His Majesty

of six and a quarter per cent; and in like manner, any goods sold on board of vessels in harbour, shall bear a duty to His Majesty at the same rate.

Lampiran 5

Text of the Aceh Treaty between Sultan Ala'ad-din Jauhar al-Alam Syah and the English East India Company, 22 April 1819

TREATY of friendship and alliance between the Honourable English East-India Company and the kingdom of Acheen, concluded by the Hon. Sir Thomas Stamford Raffles, Knt., and Captain John Mohck'ton Coombs, agents to the Governor-General, in the name and on behalf of the most noble Francis Marquess of Hastings, Knight of the most noble Order of the Garter, one of his Britannic Majesty's most honourable Privy Council, Governor-General in Council of all the British possessions in India, on the one part; and his highness Sri Sultan Alla-ud-deen Johar Alum Shah, King of Acheen, for himself, his heirs and successors, on the other.

In consideration of the long and uninterrupted peace, amity, and good understanding, which has subsisted between the Honourable English East-India Company and his highness's ancestors, the kings of Acheen, and in order to perpetuate and improve their friendship, to the advantage and prosperity of their mutual states and subjects, it is hereby agreed and determined—

1. There shall be a perpetual peace, friendship and defensive alliance between the states, dominions, and subjects of the high contracting parties, neither of whom shall give any aid or assistance to the enemies of the other.

2. At the request of his highness, the British Government engages to require, and to use its influence to effect, the removal of Syful-Alum from his highness's territories; and of his family, as far as they may be subject to their authority, from doing or committing, in future, any act or acts, tending to prevent or impede the full establishment of his highness's authority. His highness the king engages himself to place at the disposal of the Supreme government of British India, such pension or annuity, as it may in its wisdom deem meet to recommend, for the said Syf-ul Alum, on the condition of his retiring to Pinang, and engaging to relinquish all claims to the sovereignty of Acheen, within three months from the date hereof.

3. His highness the king grants to the British Government the free trade of all his ports, and engages that the duties on merchandize, levied at those ports, shall be fixed and declared, and shall also be payable by the resident merchant. His highness likewise engages not to grant or authorize a monopoly of the produce of his states by any person whatever.

4. His highness engages, whenever the British Government may desire it, to receive and protect an accredited agent of the British Government, with a suitable establishment, who shall be permitted to reside at his highness's court, for the purpose of conducting the affairs of the Hon. Company.

5. In consideration of the injury which might result to the British trade from its exclusion from the ports of his highness's state, not at present subject to his authority, his highness agrees and consents, that the ships and vessels of Great Britain shall continue their commercial intercourse with the ports of Acheen and Teluksamoy in the same manner as heretofore, unless a temporary blockade of these ports, or either of them, shall at any time be established by and with the consent of the British Government, or resident authority. It is clearly understood, however, by the contracting parties, that no warlike stores, or arms of any kind, shall be furnished, given, or sold by the vessels so trading to the aforesaid ports, under penalty of confiscation of ship and cargo.

6. His highness Sri Sultan Alia ud-deen Johor Alum Shah agrees, promises, engages himself, his heirs and successors, to exclude the subjects of every other European power, and likewise all Americans, from a fixed habitation or residence in his dominions: he also engages not to enter into any negotiation, or to conclude any treaty with any power, prince, or potentate whatsoever, unless with the knowledge and consent of the British Government.

7. His highness engages not to permit the residence in his dominions of any British subject to whom the resident agent shall offer any objection.

8. The British Government agrees to give and furnish to his highness, without delay, all the arms and military stores which are detailed in _____ the paper appended to this treaty, and signed by his highness. The British Government likewise agrees to advance to his highness the sum of _____ money therein mentioned, as a temporary loan, to be paid by his

highness
earliest convenience.

at

his

9. This treaty, consisting of nine articles, has this day been concluded, subject to the ratification of the Governor-General within six months from the date hereof; but it is to be understood, that the several provisions herein contained may be carried into immediate effect, without awaiting the said ratification.

Done at Sreduli, near Pedir, in the country of Acheen, the 22nd day of April, in the year of our Lord 1819, corresponding with the year of the Hegira, 1234, and the 26th day of Jemadil Aker.

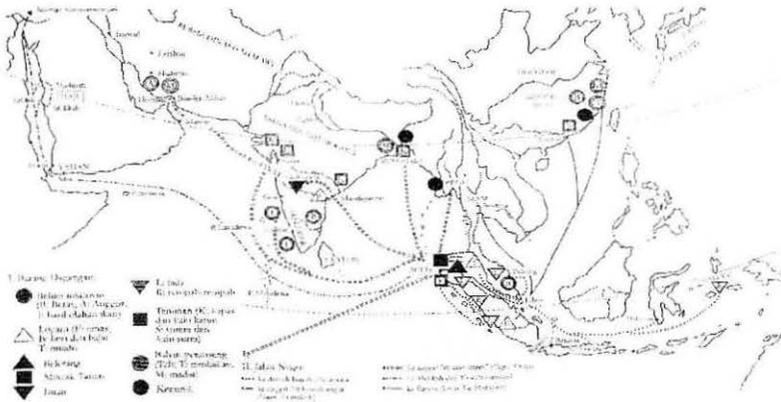
Seal of the East India Company

Seal of His Highness the King of Acheen

(Signed) T.S. Raffles
J. M. Coombs

Sumber : Lee Kam Hing

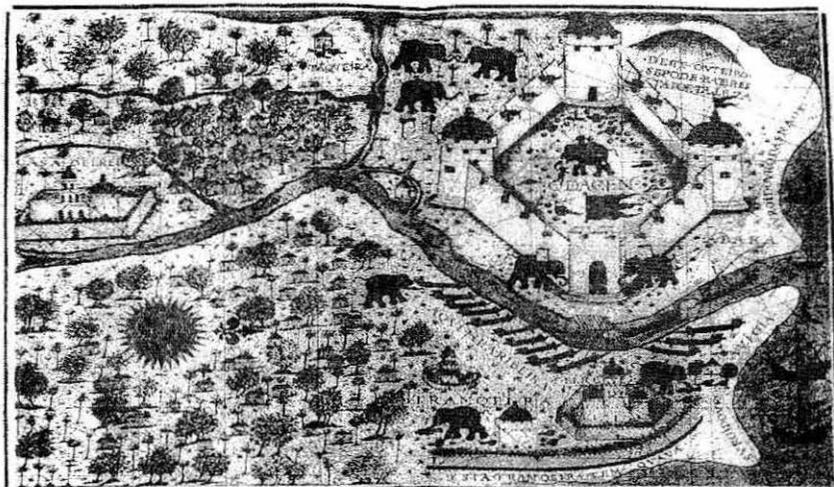
Lampiran 6



Peta Perdagangan Aceh awal Abad ke-17

Denys Lombard, *Le Sultanat d'Atjeh au temps d'Iskandar Muda (1607-1636)*, (Paris : Ecole française d'Extreme-Orient, 1967.

Lampiran 7



Teluk Aceh dengan kota dan benteng-benteng sekitar tahun 1564

Fernao Vas Dourado, *Dachem* (fol.4), dalam Pierre-Yves Manguin, "Demografi dan Tata Perkotaan di Aceh pada Abad ke-16", Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed.), *Panggung Sejarah (Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard)*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 199).

Lampiran 8



Deureuham (mata uang emas) kesultanan Aceh masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636)

Susanto Zuhdi, (peny.), *Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra : Kumpulan Makalah Diskusi*, Jakarta : Depdikbud, 1997, hlm.101.

Lampiran 9



1/1



a. Dirham mas Aceh seharga f0,62^s



1/1



b. Dirham mas Aceh seharga f0,62^s



1/1



c. Keuch yang dikeluarkan oleh Sultan Alaud-din Ahmad Syah seharga 50/10 wan g sen Hindia Belanda



1/1



d. Kupang perak Pidie seharga f0,15

K.F.H. Van Langen, "De Inrichting Van Het Atjehsche Staatbestuur Onder Het Sultanaat", *BKI* 37 (1888), hlm. 426.

ISBN : 978 - 979 - 9164 - 74 - 2

Perpu
Jend